



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan Laporan Keuangan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Magelang mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan menyajikan informasi serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodis.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan informasi mengenai apakah pendapatan periode berjalan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah dianggarkan.

2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.



- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 7) Laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka di dalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Kota Magelang. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Magelang dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Surplus/ defisit

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar.

Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang Pajak dan bukan pajak
- c) Persediaan
- d) Aset Tetap
- e) Ekuitas Dana

3) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.



- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit LPE pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang berlangsung menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
- 5) Laporan Perubahan SAL
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara Komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:
 - a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
 - d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; dan
 - e) Lain-lain;
 - f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 6) Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:
 - a) Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
 - b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
 - c) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi

2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2017;
- 19) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017;
- 20) Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Magelang;
- 21) Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- 22) Surat Edaran Walikota Magelang Nomor 900/1164/440 Tanggal 19 Desember 2017 perihal Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2017.

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.



Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran; kebijakan keuangan yang ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Arus Kas, serta keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi dan hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian mana pun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.



BAB II

GAMBARAN UMUM EKONOMI

DAN KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kondisi atau kerangka ekonomi daerah yang secara nyata dipengaruhi oleh faktor internal yang merupakan kondisi perekonomian di daerah itu sendiri, maupun faktor eksternal antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Kerangka ekonomi ini menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan terkait pencapaian kinerja pembangunan daerah, yang dalam hal ini diwujudkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017.

Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2017, ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Serta Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

1. Gambaran Umum Ekonomi

Perekonomian Kota Magelang pada tahun 2015-2016 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha dominan.
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah Kota Magelang dengan perbaikan peraturan perundang-undangan daerah, perbaikan kualitas pelayanan, efektifitas pajak dan penyederhanaan birokrasi.



- c. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan daya saing dan produksi ekspor daerah. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.
- e. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan variasi infrastruktur yang berkualitas.
- f. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Magelang.
- g. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Magelang sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
- h. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
- i. Mengelola inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.
- j. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjangkaran riset novatif sehingga dapat meningkatkan daya saing Kota Magelang dalam menarik atensi investor untuk memperbesar peluang percepatan pertumbuhan ekonomi.



Berdasar kondisi eksisting perekonomian Kota Magelang tahun 2014 dan prediksi tahun 2015-2017, maka pada tahun 2017 perekonomian Kota Magelang memiliki prospek antara lain:

- a. Dengan menyesuaikan data historis PDRB penyesuaian tahun dasar 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang diprediksi tumbuh sekitar $5,35 \pm 0,14\%$ dengan kecenderungan naik.
- b. Inflasi diperkirakan pada kisaran angka $4,04 \pm 1,65\%$ dengan kecenderungan menurun.
- c. Laju pertambahan penduduk diprediksi mencapai $0,35\%$.
- d. PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan mencapai Rp 7.887.579,1 juta tumbuh $10,07\%$.
- e. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar Rp. 63.164.302,43 per tahun.
- f. PDRB perkapita atas dasar harga konstan diperkirakan sebesar Rp. 46.557.773,90 per tahun.

Adapun gambaran umum ekonomi Kota Magelang Tahun 2017 berdasarkan prospek dan prediksi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2016 perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang sebesar Rp. 7,015 triliun. Nilai ini berkembang hampir 175% dari tahun dasar 2010. Transformasi struktur perekonomian Kota Magelang di tahun 2016 terjadi setelah sektor Jasa Lainnya mampu menggeser posisi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari peringkat kontribusi ke 12 ke posisi 13. Sektor dominan dalam pencapaian nilai tambah bruto adalah Konstruksi, sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Beberapa sektor pembentuk PDRB memiliki potensi dikembangkan untuk mendongkrak perekonomian makro secara berkelanjutan mengingat daya saingnya yang cukup tinggi di tingkat lokal maupun regional.

Pertumbuhan ekonomi riil Kota Magelang kembali menguat di tahun 2016. Secara riil pertumbuhan ekonomi makro Kota Magelang mencapai $5,17\%$ mengalami ekspansi dari tahun sebelumnya yang hanya berada pada angka $5,11\%$. Seluruh sektor unggulan memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Magelang secara umum. Sementara itu sektor



Industri Pengolahan, sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang merupakan tiga sektor utama pembentuk PDRB, masih melaju lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kota Magelang. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat kami gambarkan dalam table berikut:

Tabel 2.1. Realisasi dan Prediksi PDRB Lapangan Usaha di Kota Magelang (adhb), 2016-2017

LAPANGAN USAHA	NTB 2016* (Juta Rupiah)	NTB 2017** (Juta Rupiah)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135.991,13	142.454,49
Industri Pengolahan	1.128.331,29	1.239.730,46
Pengadaan Listrik dan Gas	20.361,13	21.160,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.979,24	9.601,96
Konstruksi	1.163.178,22	1.262.362,53
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.006.288,45	1.060.825,03
Transportasi dan Pergudangan	471.954,33	504.756,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	422.789,76	442.114,98
Informasi dan Komunikasi	334.082,07	367.432,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	366.184,95	380.534,04
Real Estate	224.952,98	236.820,26
Jasa Perusahaan	24.810,72	27.892,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	842.640,29	873.126,67
Jasa Pendidikan	529.008,56	604.377,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.466,24	215.370,07
Jasa lainnya	140.360,73	156.238,91
PDRB	7.015.380,09	7.544.799,70

Sumber: BPS Kota Magelang (2018)

* Angka Sangat Sementara

Dinamika perekonomian yang terkendali mendukung kinerja pembangunan yang semakin baik dan di tahun 2017. Hal tersebut menghasilkan prediksi yang optimis terhadap perekonomian makro Kota Magelang di akhir tahun 2017. Diprediksi



sampai dengan akhir tahun 2017 PDRB Kota Magelang mampu tumbuh mencapai nilai Rp. 7,545 triliun (deviasi 0,69%) tumbuh 5,19% dengan tren mendekati pertumbuhan riil potensialnya. Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tengah tahun 2017 yang dipublikasikan oleh BPS Kota Magelang sebesar 0,31% dan prediksi pertumbuhan PDRB adhb 7,55% (deviasi $\pm 0,69\%$), maka diprediksi PDRB per kapita tahun 2017 (adhb) mampu mencapai Rp. 58,92 juta per tahun. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat kami gambarkan dalam table berikut:

Tabel 2.2. Realisasi, Target dan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi
 Kota Magelang, 2016-2017

Indikator	Realisasi 2016*	Target 2017	Prediksi 2017**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	4,79-5,29	5,19

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; BPS Kota Magelang (2018);

* Angka Sangat Sementara

2) Inflasi

Di sepanjang tahun 2017 gejolak harga komoditas pengeluaran di Kota Magelang mampu terkendali dengan inflasi year on year sebesar 3,9%. Laju inflasi yang terjadi pada posisi lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (3,71%) dan Nasional (3,61%). Hal tersebut merupakan rentetan dampak dari kenaikan harga beras di akhir tahun yang mengakibatkan kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 3,96%. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi yaitu beras, telur ayam ras, cabe merah, daging yam ras, papaya, cabe hijau, wortel, tomat sayur, kacang panjang, gula pasir. Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah bawang merah, bayam, anggur, salak, pir, minyak goreng, nangka muda, tauge/kecambah, jeruk, alpukat (BRS BPS, 2018). Meski demikian inflasi di akhir tahun 2017 masih masuk dalam range target yang ditetapkan. Dari turaian diatas dapat kami gambarkan dalam table berikut:

Tabel 2.3. Target dan Realisasi Inflasi Kota Magelang, 2016-2017

Indikator	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017
Inflasi (%)	2,25	3,36 - 4,94	3,90

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; BPS Kota Magelang (2018)



2. Kinerja APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2017

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memephrhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud, dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD ini berpedoman pada kebijakan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam hal ini adalah RKPD Kota Magelang Tahun 2017. Sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2017, kebijakan anggaran Kota Magelang tahun 2017 diarahkan untuk:

- a. Melakukan sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Kota Magelang dengan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Provinsi Jawa Tengah,
- b. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan dan kewenangannya (diutamakan urusan wajib dan urusan pilihan),
- c. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
- d. Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah.



- e. Menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan.
- f. Berupaya untuk terus meningkatkan jumlah besaran belanja modal dalam rangka meningkatkan produktifitas perekonomian, dimana diharapkan dengan besarnya belanja modal maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta peningkatan kesempatan kerja.
- g. Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar (terutama untuk kelompok rentan termajinalkan) yang bersumber dari APBD maupun kemitraan. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan Pendapatan per Kapita. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas ini antara lain:
 - 1) Meningkatkan SDM Kota Magelang dengan pendidikan yang terjangkau oleh semua penduduk.
 - 2) Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - 3) Meningkatkan keamanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk.
- h. Tetap melaksanakan dan melanjutkan prioritas kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal guna mendukung program Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, Pengembangan E-Government secara Komprehensif dan Integral: Menuju Smart City, dan Sustainable Development Goals.

1) Pendapatan Daerah

a) Kebijakan Pengelolaan Pendapatan

Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut:



b) Intensifikasi PAD melalui:

- Optimalisasi system pajak on line dengan menambahkan peralatan berupa tapping box (alat perekam transaksi) untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
- Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan SKPD kurang bayar kepada wajib pajak.
- Penegakkan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
- Optimalisasai SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
- Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
- Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
- Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
- Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
- Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.

c) Ekstensifikasi melalui:

- 1) Perubahan tarif pajak daerah dan tariff retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.
- 2) Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan tax based) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
- 3) Penyesuaian NJOP PBB di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap.
- 4) Penggunaan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli.



- d) Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kota Magelang, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.
- e) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah.

Adapun perbandingan anggaran pendapatan tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Perbandingan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan 2017

(dalam ribuan rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN 2016	ANGGARAN 2017
1	Pendapatan Asli Daerah	197.465.478,00	218.085.185,00
	a. Pajak Daerah	24.748.872,00	29.821.800,00
	b. Retribusi Daerah	6.001.756,00	5.422.657,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.181.760,00	7.710.904,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160.533.090,0	175.129.824,00
2	Dana Perimbangan	556.101.119,00	576.667.228,00
	a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	29.017.550,00	33.063.552,00
	b. Dana Alokasi Umum	415.469.412,00	440.041.244,00
	c. Dana Alokasi Khusus	111.614.157,00	103.562.432,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	69.610.678,00	132.893.466,00
	a. Pendapatan Hibah	0,00	23.985.271,00
	b. Dana Darurat	0,00	0,00
	c. Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.424.183,00	51.494.329,00
	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	47.039.466,00
	e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	14.186.495,00	10.374.400,00
	PENDAPATAN DAERAH	823.177.275,00	927.645.879,00



2) Belanja Daerah

a) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah Kota Magelang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Memprioritaskan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.
- Memenuhi pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah sesuai amanat PP 48 tahun 2008 dan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10%.
- Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perhitungan gaji untuk tiap tahunnya ditambah akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai.
- Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib dan urusan pilihan terlebih dahulu.
- Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diutamakan untuk memenuhi/mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan fasilitas umum pemukiman.
- Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun.
- Melaksanakan kegiatan yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Magelang dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat, yaitu program kegiatan yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga,



Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, Pengembangan E-Government secara Komprehensif dan Integral: Menuju Smart City, dan Sustainable Development Goals.

Perbandingan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dapat dilihat berikut ini:

Perbandingan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2016	Anggaran 2017
5	BELANJA	1.016.825.539,00	1.075.062.418,00
5.1	Belanja Operasi	722.822.494,00	780.341.519,00
5.1.1	Belanja Pegawai	379.829.166,00	398.105.223,00
5.1.2	Belanja Barang	335.582.618,00	366.357.847,00
5.1.3	Belanja Hibah	3.598.396,00	9.997.833,00
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.812.314,00	5.880.616,00
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
5.2	Belanja Modal	246.508.674,00	271.948.238,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	56.500,00	20.596.805,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.465.576,00	87.871.572,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	66.426.162,00	97.900.065,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	60.869.380,00	58.735.567,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.151.834,00	1.532.714,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	539.222,00	942.241,00
5.2.7	Belanja Modal BOS	0,00	4.369.274,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	47.494.371,00	22.772.661,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	47.494.371,00	22.772.661,00
6.2	Transfer	641.830,00	560.703,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan	641.830,00	560.703,00

3) Pengelolaan Pembiayaan Daerah

a) Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah



Arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang untuk tahun 2017 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
 - b. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
- Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2017 diarahkan untuk Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Untuk perbandingan anggaran pembiayaan TA 2016 dan 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Perbandingan Anggaran Pembiayaan Tahun 2016 dan 2017

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	ANGGARAN 2017 (Rp)
7	PEMBIAYAAN		
7.1	PENERIMAAN		
7.1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	201.377.094,00	165.144.899,00
7.1.2	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	201.227.094,00	162.344.899,00
7.1.3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	150.000,00	2.800.000,00
	Jumlah	201.377.094,00	165.144.899,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.087.000,00	17.167.657,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	3.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	7.087.000,00	14.167.657,00



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	ANGGARAN 2017 (Rp)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.087.000,00	14.167.657,00
	Pembiayaan Netto	194.290.094,00	147.977.242,00
3.3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	0,00	0,00



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 tercapai sebesar Rp904.497.115.208,00 (97,50%) atau berkurang sebesar Rp23.148.763.792,00 (2,50%) dari anggaran sebesar Rp 927.645.879.000,00. Sedangkan untuk realisasi belanja sebesar Rp878.847.479.147,00 (81,75%) atau berkurang sebesar Rp196.214.938.853,00 (18,25%) dari anggaran yakni Rp1.075.062.418.000,00. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp560.702.300,00 atau terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp560.703.000,00.

Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2017
APBD KOTA MAGELANG

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/ (KURANG)	
		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(Rp)	%
1	PENDAPATAN LRA	927.645.879.000,00	904.497.115.208,00	(23.148.763.792,00)	(2,50)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH –LRA	218.085.185.000,00	233.552.828.966,00	15.467.643.966,00	7,09
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	29.821.800.000,00	31.206.960.485,00	1.385.160.485,00	4,64
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	5.422.657.000,00	6.243.021.736,00	820.364.736,00	15,13
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LRA	7.710.904.000,00	7.711.404.121,00	500.121,00	0,01
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah –LRA	175.129.824.000,00	188.391.442.624,00	13.261.618.624,00	7,57
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	685.575.423.000,00	651.711.303.112,00	(33.864.119.888,00)	(4,94)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pem Pusat-LRA	576.667.228.000,00	553.115.007.612,00	(23.552.220.388,00)	(4,08)
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak-LRA	30.920.025.000,00	25.341.079.039,00	(5.578.945.961,00)	(18,04)
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA	2.143.527.000,00	1.344.690.250,00	(798.836.750,00)	(37,27)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum-LRA	440.041.244.000,00	440.041.244.000,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus-LRA	103.562.432.000,00	86.387.994.323,00	(17.174.437.677)	(16,58)
1.2.2	Pendapatan Transfer Pem Pusat Lainnya-LRA	47.039.466.000,00	47.039.466.000,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	47.039.466.000,00	47.039.466.000,00	0,00	0,00



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/ (KURANG)	
		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(Rp)	%
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	51.494.329.000,00	41.855.667.000,00	(9.638.662.000,00)	(18,72)
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA	51.494.329.000,00	41.855.667.000,00	(9.638.662.000,00)	(18,72)
1.2.4.	Bantuan Keuangan-LRA	10.374.400.000,00	9.701.162.500,00	(673.237.500,00)	(6,49)
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah propinsi Lainnya-LRA	10.374.400.000,00	9.701.162.500,00	(673.237.500,00)	(6,49)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA	23.985.271.000,00	19.232.983.130,00	(4.752.287.870,00)	(19,81)
1.3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LRA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Hibah Dana BOS-LRA	21.985.271.000,00	17.026.981.737,00	(4.958.289.263,00)	(22,55)
1.3.3	Pendapatan Lainnya-LRA	0,00	206.001.393,00	206.001.393,00	0,00
	Jumlah	927.645.879.000,00	904.497.115.208,00	(23.148.763.792,00)	(2,50)

**REALISASI BELANJA DAN TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2017
APBD KOTA MAGELANG**

	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	% LEBIH/ (KURANG)
2	BELANJA	1.075.062.418.000,00	878.847.479.147,00	(196.214.938.853,00)	(18,25)
2.1	BELANJA OPERASI	780.341.519.000,00	645.645.777.975,00	(134.695.741.025,00)	(17,26)
2.1.1	Belanja Pegawai	398.105.223.000,00	321.762.777.524,00	(76.342.445.476,00)	(19,18)
2.1.2	Belanja Barang	366.357.847.000,00	310.534.234.831,00	(55.823.612.169,00)	(15,24)
2.1.3	Belanja Hibah	9.997.833.000,00	8.385.895.620,00	(1.611.937.380,00)	(16,12)
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.880.616.000,00	4.962.870.000,00	(917.746.000,00)	(15,61)
2.2	BELANJA MODAL	271.948.238.000,00	233.070.356.632,00	(38.877.881.368,00)	(14,30)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	20.596.805.000,00	1.476.985.650,00	(19.119.819.350,00)	(92,83)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.871.572.000,00	82.151.639.808,00	(5.719.932.192,00)	(6,51)
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.900.065.000,00	91.263.642.710,00	(6.636.422.290,00)	(6,78)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	58.735.567.000,00	53.058.480.055,00	(5.677.086.945,00)	(9,67)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.532.714.000,00	1.392.612.400,00	(140.101.600,00)	(9,14)
2.2.6	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	942.241.000,00	916.725.623,00	(25.515.377,00)	(2,71)
2.2.7	Belanja Modal BOS	4.369.274.000,00	2.810.270.386,00	(1.559.003.614,00)	(35,68)
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.772.661.000,00	130.744.540,00	(22.641.916.460,00)	(99,43)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	22.772.661.000,00	130.744.540,00	(22.641.916.460,00)	(99,43)
2.4	TRANSFER	560.703.000,00	560.702.300,00	(700,00)	(0,00)
2.4.1	Transfer Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	560.703.000,00	560.702.300,00	(700,00)	(0,00)



REALISASI PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017
KOTA MAGELANG

	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	LEBIH/ KURANG) (Rp)	% LEBIH/ (KURANG)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	162.344.899.000,00	167.368.535.725,00	5.023.636.725,00	3,09
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	2.800.000.000,00	2.697.840.451,00	(102.159.549,00)	(3,65)
	Jumlah Penerimaan Daerah	165.144.899.000,00	170.066.376.176,00	4.921.477.176,00	2,98
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000)	(100)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.167.657.000,00	14.167.657.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Daerah	17.167.657.000,00	14.167.657.000,00	(3.000.000.000,00)	(17,47)
	Pembiayaan Netto	147.977.242.000,00	155.898.719.176,00	7.921.477.176,00	5,35

2. Perkembangan Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 tercapai sebesar Rp904.374.196.160,00 atau meningkat sebesar Rp64.331.569.635,00 atau 7,66% dari realisasi Tahun 2016 sebesar Rp840.042.626.525,00. Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi pendapatan dapat dilihat berikut ini:

Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017
APBD Pemerintah Kota Magelang

NO.	URAIAN	REALISASI 2016 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	% LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN -LRA	840.042.626.525,00	904.497.115.208,00	47.427.506.946,00	5,65
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA	220.315.848.702,00	233.552.828.966,00	13.236.980.264,00	6,01
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah- LRA	25.974.837.133,00	31.206.960.485,00	5.232.123.352,00	20,14
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	6.663.308.913,00	6.243.021.736,00	(420.287.177,00)	(6,31)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA	6.182.279.953,00	7.711.404.121,00	1.529.124.168,00	24,73
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	181.495.422.703,00	188.391.442.624,00	6.896.019.921,00	3,80
1.2	PENDAPATAN	618.962.380.124,00	651.711.303.112,00	32.748.922.988,00	5,29



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

NO.	URAIAN	REALISASI 2016 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	% LEBIH/ (KURANG)
	TRANSFER-LRA				
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LRA	567.636.707.545,00	553.115.007.612,00	(14..521.699.933,00)	(2,56)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak-LRA	29.047.508.551,00	25.341.079.039,00	(3.706.429.512,00)	(12,76)
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA	1.285.550.531,00	1.344.690.250,00	59.139.719,00	4,60
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum-LRA	447.909.575.000,00	440.041.244.000,00	(7.868.331.000,00)	(1,76)
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus-LRA	89.394.073.463,00	86.387.994.323,00	(3.006.079.140,00)	(3,36)
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	0,00	47.039.466.000,00	47.039.466.000,00	0,00
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	0,00	47.039.466.000,00	47.039.466.000,00	0,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	37.179.177.579,00	41.855.667.000,00	4.676.489.421,00	12,58
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.179.177.579,00	41.855.667.000,00	4.676.489.421,00	12,58
1.2.4	Bantuan Keuangan-LRA	14.146.495.000,00	9.701.162.500,00	(4.445.332.500,00)	(31,42)
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	14.146.495.000,00	9.701.162.500,00	(4.445.332.500,00)	(31,42)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	764.397.699,00	19.232.983.130,00	1.441.603.694,00	188,59
1.3.1	Pendapatan Hibah-LRA	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1.3.2	Hibah Dana BOS-LRA	0,00	17.026.981.737,00	17.026.981.737,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya-LRA	764.397.699,00	206.001.393,00	(558.396.306,00)	(73,05)
	Jumlah	840.042.626.525,00	904.497.115.208,00	47.427.506.946,00	5,65

3. Perkembangan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 tercapai sebesar Rp878.846.879.147,00 atau menurun sebesar Rp8.629.577.044,00 (0,88%) dari realisasi Tahun 2016 sebesar Rp871.217.302.103,00. Secara rinci penjelasan perkembangan realisasi belanja dan transfer Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2016 dan 2017

APBD Pemerintah Kota Magelang

NO	URAIAN	REALISASI 2016 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	% LEBIH/ (KURANG)
2	BELANJA	871.217.302.103,00	878.847.479.147,00	7.630.177.044,00	(0,88)
2.1	BELANJA OPERASI	648.585.872.187,00	645.645.777.975,00	(2.940.094.212,00)	(0,45)
2.1.1	Belanja Pegawai	346.458.910.068,00	321.762.777.524,00	(24.696.132.544,00)	(7,13)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	297.447.892.119,00	310.534.234.831,00	13.086.342.712,00	4,40
2.1.3	Belanja Hibah	1.486.806.000,00	8.385.895.620,00	6.899.089.620,00	464,02



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

NO	URAIAN	REALISASI 2016 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	% LEBIH/ (KURANG)
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.192.264.000,00	4.962.870.000,00	1.770.606.000,00	55,47
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	221.924.457.916,00	230.260.086.246,00	8.335.628.330,00	57,05
2.2.1	Belanja Tanah	52.100.000,00	1.476.985.650,00	1.424.885.650,00	2.734,91
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	105.565.517.576,00	82.151.639.808,00	(23.413.877.768,00)	(22,18)
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	56.533.614.650,00	91.263.642.710,00	34.730.028.060,00	61,43
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.482.755.890,00	53.058.480.055,00	(4.424.275.835,00)	(7,70)
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.756.599.100,00	1.392.612.400,00	(363.986.700,00)	(20,72)
2.2.6	Belanja Aset Tak Berwujud	533.870.700,00	916.725.623,00	382.854.923,00	71,71
2.2.7	Belanja Modal BOS	0,00	2.810.870.386,00	2.810.870.386,00	0,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	706.972.000,00	130.744.540,00	(576.227.460,00)	(81,51)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	706.972.000,00	130.744.540,00	(576.227.460,00)	(81,51)
3	TRANSFER	641.828.500,00	560.702.300,00	(81.126.200,00)	(12,64)
3.1	Transfer Bantuan Keuangan	641.828.500,00	560.702.300,00	(81.126.200,00)	(12,64)
3.1.1	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	641.828.500,00	560.702.300,00	(81.126.200,00)	(12,64)

4. Perkembangan Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016, yakni realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2017 sebesar Rp170.066.376.176,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp31.182.027.854,00 dibandingkan dengan tahun 2016 Rp201.248.404.030,00. Untuk realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2017 Rp14.167.957.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.080.657.000,00 dibandingkan dengan tahun 2016 Rp7.087.000.000,00. Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 dan 2017

APBD Pemerintah Kota Magelang

NO	URAIAN	REALISASI 2016 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	% LEBIH/ KURANG)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	201.248.404.030,00	170.066.376.176,00	(31.182.027.854,00)	(15,49)
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	201.227.094.865,00	167.368.535.725,00	(33.858.559.140,00)	(16,83)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.73	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	21.309.165,00	2.697.840.451,00	2.676.531.286,00	12560,47
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	201.248.404.030,00	170.066.376.176,00	(31.182.027.854,00)	(15,49)



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

NO	URAIAN	REALISASI 2016 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	% LEBIH/ KURANG)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.087.000.000,00	14.167.657.000,00	7.080.657.000,00	99,91
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.087.000.000,00	14.167.657.000,00	7.080.657.000,00	99,91
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.087.000.000,00	14.167.657.000,00	7.080.657.000,00	99,91
	Pembiayaan Netto	194.161.404.030,00	155.898.719.176,00	(38.262.684.854,00)	(19,71)



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Magelang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan disusunnya kebijakan akuntansi adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Secara sistematis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Magelang terdiri dari:

Lampiran I

1. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
2. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Penyajian Laporan Keuangan
3. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Laporan Realisasi Anggaran
4. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Neraca
5. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Laporan Operasional (LO)
6. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Laporan Arus Kas
7. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
8. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Lampiran II

1. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Akuntansi Aset Lancar
2. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Kas Setara Kas
3. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Investasi Jangka Pendek
4. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Piutang
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 04.1 Piutang Pungutan Pendapatan Daerah
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 04.2 Piutang Perikatan
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 04.3 Piutang Transfer
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 04.4 Piutang Lainnya
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 04.5 Penghapusan Tagihan Piutang
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 04.5 Penghapusan Tagihan Piutang
5. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Persediaan
6. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Dana Bergulir
7. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Investasi Jangka Panjang



8. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Aset Tetap
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 08.1 Tanah
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 08.2 Peralatan dan Mesin
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 08.3 Gedung dan Bangunan
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 08.4 Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 08.5 Aset Tetap Lainnya
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 08.6 Konstruksi dalam Pengerjaan
 - Kebijakan Akuntansi Nomor 08.7 Penyusutan
9. Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Dana Cadangan
10. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Aset Lainnya
11. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Kewajiban
12. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Pendapatan
13. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Beban dan Belanja
14. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Transfer
15. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 Pembiayaan
16. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
17. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 Penyajian Kembali (*restatement*).

A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda. Sedangkan entitas akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 38 SKPD selaku entitas akuntansi yaitu:

No	Kode Rekening	Nama SKPD (Entitas Akuntansi)
1	2	3
1.	1.01.01	Dinas Pendidikan
2.	1.02.01	Dinas Kesehatan Kota
3.	1.02.02	RSUD Tidar Kota Magelang
4.	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.	1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No	Kode Rekening	Nama SKPD (Entitas Akuntansi)
1	2	3
7.	1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
8.	1.06.01	Dinas Sosial
9.	2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
10.	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup
11.	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana
13.	2.09.01	Dinas Perhubungan
14.	2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
15.	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap
16.	2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
17.	2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan
19.	3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20.	4.01.03	Sekretariat Daerah
21.	4.01.03.01	Bagian Tata Pemerintahan
22.	4.01.03.02	Bagian Organisasi
23.	4.01.03.03	Bagian Hukum
24.	4.01.03.04	Bagian Perekonomian
25.	4.01.03.05	Bagian Pembangunan
26.	4.01.03.06	Bagian Kesejahteraan Rakyat
27.	4.01.03.07	Bagian Hubungan Masyarakat
28.	4.01.03.08	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
29.	4.01.03.09	Bagian Umum
30.	4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
31.	4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan
32.	4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah
33.	4.01.07	Kecamatan Magelang Utara
34.	4.02.01	Inspektorat
35.	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
36.	4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
37.	4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
38.	4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan

B. Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Umum Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening umum kas daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pada LO



Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening umum kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dasar Pengukuran yang mendasari penyusunan Neraca adalah sebagai berikut :

1. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Konversi valuta asing ke dalam rupiah bermakna menukar suatu mata uang dengan mata uang yang lainnya. Translasi atau penjabaran artinya mengubah ekspresi pelaporan yang semula menggunakan nilai dalam valuta asing menjadi nilai rupiah.
2. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pengukuran investasi jangka pendek dilakukan dengan metode biaya. Kecuali dalam hal surat berharga (saham, obligasi, deposito) diperoleh tanpa biaya perolehan, misalnya dari donasi, maka investasi jangka pendek ini dinilai berdasarkan nilai wajar (*fair value* menggunakan harga pasar atau nilai appraisal) investasi jangka pendek pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Jadi harga pasar ini selanjutnya diperlakukan sebagai harga perolehan investasi



jangka pendek tersebut. Investasi dalam bentuk non saham misalnya deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Atau sebesar kewajiban bayar pihak yang berhutang (nilai nominal dari SKP yang belum dilunasi)

Pengukuran piutang atas :

- a. Piutang pajak dan Piutang retribusi

Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang tertunggak.

- b. Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang dana bagi hasil (DBH) dan Sumber Daya Alam disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

- c. Piutang Dana Alokasi Umum

Dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

- d. Piutang Dana Alokasi Khusus

Dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

- e. Piutang Transfer Lainnya

Dicatat sebesar sisa yang belum ditransfer dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.

- f. Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi dicatat sebesar jumlah alokasi definitive sesuai surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang belum dibayar sampai akhir tahun

- g. Piutang Transfer Antar Daerah

Dicatat sebesar hasil realisasi pendapatan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

- h. Piutang Kelebihan Transfer

Dicatat sebesar kelebihan transfer dari yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah berdasarkan sebab terjadinya kesalahan transfer (kesalahan administrative atau ketentuan/peraturan yang ada) dan berdasarkan arah transfer.

4. Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.



Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusutan

Penerapan Kebijakan Akuntansi untuk pos-pos laporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi Aset tetap mulai dilakukan perhitungan penyusutan untuk Laporan Keuangan Tahun 2016.

Untuk mengetahui pengukuran penyusutan nilai aset tetap harus diketahui terlebih dahulu nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap maka penyusutan aset tetap tidak dapat dilakukan dan besarnya nilai buku juga tidak dapat dihitung. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan. Nilai sisa/residu aset tetap yang disusutkan diabaikan dalam menghitung penyusutan karena :

1. aset tetap pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan;
2. tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya;
3. penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan.

Untuk aset tetap yang tidak diketahui tahun perolehannya sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 030/260/112 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 tentang Penetapan Tahun Perolehan Aset Tetap yang Tidak diketahui Tahun Perolehannya. Penetapannya menggunakan tahun perolehan 2001.

Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah metode garis lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Secara ringkas penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut:



AKUNTANSI PENDAPATAN

Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah.

Pengakuan Pendapatan -LO

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/ imbalan;
 - b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah pada kas umum daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pengukuran Pendapatan - LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO (termasuk Hibah) dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima



oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan Pemerintah Daerah adalah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan – LRA diakui pada saat :

1. Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
2. Kas diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
4. Untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD

Pengukuran Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA dilakukan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan LRA (termasuk Hibah) dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :

- urusan pemerintahan daerah;
- organisasi; dan
- kelompok.

Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :

- jenis;
- obyek; dan
- rincian obyek pendapatan.

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pendapatan Transfer.
3. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pengungkapan

Hal hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang berkaitan dengan pendapatan – LRA antara lain :

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan tahun bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset;
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran Beban

Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga perolehan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Beban hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

Penyajian Beban

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Realisasi beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Pada penerapan akuntansi berbasis akrual, beban hibah disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Belanja Hibah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran tersebut disahkan oleh SKPKD. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur tentang BLUD.

Pengukuran Belanja

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran atau sesuai



dengan dokumen pengeluaran yang sah berdasarkan asas bruto. Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

Penyajian Belanja

Realisasi belanja hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi, dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Koreksi atas Belanja

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LRA. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang ekuitas SAL pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas SAL yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Pengungkapan Belanja

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

1. Rincian belanja per SKPD;
2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.



Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;
2. Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;
3. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap (*Subsequent Expenditures*)

Definisi : Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Kapitalisasi merupakan penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Belanja modal adalah seluruh pengeluaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pengadaan aset tetap.

Pengeluaran dalam rangka perolehan awal aset tetap merupakan pengeluaran modal/belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian/pengadaan aset tetap yang manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan;
2. Perolehan aset tetap tersebut untuk operasional dan pelayanan;
3. Aset tetap tersebut tidak untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain;
4. Aset tetap tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran setelah perolehan awal yang merupakan belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat ekonomis;
2. Pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
3. Pengeluaran yang memperpanjang umur aset/masa manfaat;
4. Pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
5. Pengeluaran yang akan meningkatkan standar kinerja;
6. Jumlah pengeluaran melebihi batas minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Magelang.



Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - b) Bertambah manfaat/umur ekonomis; dan/atau
 - c) Bertambah volume; dan/atau
 - d) Bertambah Kapasitas atau mutu produksi.
2. Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang.

Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengukuran pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka:

1. Memperpanjang masa manfaat; atau
2. Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.

Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama, maksudnya:

1. Pengembangan adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut dan biaya pengembangan tersebut akan menambah harga perolehan aset tetap bersangkutan;
2. Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap dan biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambah biaya penggantian.

Aset Tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :

1. Tidak disajikan dalam Neraca (*on face*);
2. Diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan, seperti tanggul lumpur lapindo, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar di lereng gunung Merapi tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).

Batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dalam hal pengeluaran setelah perolehan untuk hasil pengembangan, renovasi dan restorasi, memenuhi kriteria kapitalisasi yang sama dengan atau lebih sebagai berikut:



No.	Uraian	Jumlah Harga Per Unit (Rp)
1.	Tanah	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	100.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7.	Aset Lainnya	0,00

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran

Pembiayaan diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian yaitu:

- Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.



Penyajian Pembiayaan

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

Pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan dan jasa konsultasi.

Pengungkapan Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan adalah:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;

Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

Penyajian dan Pengungkapan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.

Pengeluaran Pembiayaan untuk dana bergulir dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir yang secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) diperoleh dengan melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dengan mengurangi penyisihan pada perkiraan Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.



Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dana Bergulir perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain berisi informasi:

1. dasar penilaian dana bergulir;
2. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
3. besarnya suku bunga yang dikenakan;
4. saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
5. jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.

AKUNTANSI ASET

Definisi Aset

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar

Adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar terdiri dari Kas dan setara kas; Investasi Jangka Pendek; Piutang; Piutang Lain-lain; dan Persediaan.

1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, meliputi:

- a. Uang tunai yang terdiri atas uang kertas dan logam atau simpanan di Bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
- b. Uang tunai atau simpanan di Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat;
- c. Seluruh Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)/Langsung (LS) yang belum dipertanggungjawabkan, termasuk bukti pembelian barang (kwitansi, nota, faktur dan bukti lainnya) serta penyerahan uang muka atau panjar yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja secara sah;
- d. Saldo simpanan atau Rekening di Bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;



Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara Kas terdiri dari:

- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito berjangka dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;
- b. Investasi Jangka Pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab *selain* Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

- a. Saldo rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada Bank yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/Obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah;
- c. Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.

Kas yang sudah diterima oleh Bank Operasional, yaitu Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai bank penerimaan atau pengeluaran, merupakan bagian dari Kas Daerah.

Setiap entitas pemerintah wajib menyajikan saldo kasnya pada saat diminta menyusun neraca awal.

Untuk menentukan nilai Saldo Awal kas di rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah dapat menggunakan Saldo Rekening Koran Pemerintah Daerah per tanggal Neraca.

Penyusunan neraca awal biasa adalah sumber data kas yang tersebar dan masing-masing berada di bawah tanggung jawab yang berbeda.

Kas Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Kas di Kas Daerah;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d. Kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan Pemerintahan;
- e. Kas di Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



- Konversi valuta asing ke dalam rupiah bermakna menukar suatu mata uang dengan mata uang yang lainnya.
- Translasi atau penjabaran artinya mengubah ekspresi pelaporan yang semula menggunakan nilai dalam valuta asing menjadi nilai rupiah.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- c. Berisiko rendah.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari:

- a. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b. Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek;
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
- e. Investasi salam Saham;
- f. Investasi Jangka Pendek BLUD;
- g. Investasi Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.



Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang terbagi menjadi:

a. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang terjadi, terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

- 1) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ Pungutan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah maupun peraturan daerah yang berlaku di Pemerintah Daerah antara lain meliputi:
 - a) Piutang pajak;
 - b) Piutang pendapatan daerah selain pajak antara lain piutang retribusi; utang atas bagian laba BUMD; piutang retribusi; piutang lain-lain PAD yang Sah.
 - c) Piutang dalam valuta asing
- 2) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul karena terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman; transaksi jual beli; kemitraan dengan pihak lain; pemberian fasilitas/jasa; transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi:

- a) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- b) Piutang Bantuan Keuangan;
- c) Piutang Hibah; dan
- d) Piutang Pendapatan Lainnya.



3) Piutang BLUD

Merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLUD.

4) Piutang berdasarkan Transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Perimbangan keuangan vertikal dan horizontal mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan, berupa :

- a) Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- b) Transfer dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota,
- c) Transfer antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintah terdiri dari:

- a) Piutang Transfer Pemerintah Pusat antara lain:
 - Piutang Bagi Hasil Pajak;
 - Piutang Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b) Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya antara lain:
 - Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
 - Piutang Dana Penyesuaian;
 - Piutang Dana Insentif Daerah (DID).
- c) Piutang Transfer Pemerintah Daerah antara lain:
 - Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak Provinsi;
 - Piutang Pendapatan Dana Hibah; dan
 - Piutang Pendapatan Dana Darurat.
- d) Piutang Kelebihan Transfer.

b. Piutang Lainnya

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi:



- a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas.

Piutang lain-lain terdiri dari:

- a) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
- b) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang kepada entitas lainnya;
- c) Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- d) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- e) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- f) Piutang Dividen;
- g) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;
- h) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
- i) Uang Muka Belanja;
- j) Beban Dibayar Dimuka;
- k) Uang Muka Yang Harus Dipertanggungjawabkan.

Pengakuan Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang BLUD diakui dengan kriteria:

- a) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggungjawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh



kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; atau

- b) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- c) Telah diterbitkan surat penagihan

Pengukuran Piutang

- a) Piutang dinilai sebesar kewajiban bayar pihak yang berutang (nilai nominal dari SKP yang belum dilunasi).
- b) Piutang BLUD dicatat sebesar nilai nominal dari Surat Kesepakatan/Surat Ketetapan/Surat Tagihan yang belum dilunasi.

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- a) Barang konsumsi;
- b) Bahan untuk pemeliharaan;
- c) Suku cadang;
- d) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- e) Benda pos, pita cukai, leges, karcis;
- f) Bahan Baku;
- g) Barang dalam proses/setengah jadi;
- h) Tanah/Bangunan/barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- i) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu



pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Persediaan yang termasuk dalam pendekatan aset antara lain persediaan obat di Rumah Sakit/Poliklinik/Puskesmas, persediaan yang direncanakan untuk diserahkan kepada masyarakat. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Termasuk dalam beban persediaan adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Beban Persediaan

Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Aset Non Lancar

1. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen.

Investasi Permanen adalah:

- a. investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
- b. investasi untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen adalah:

- a. investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;



- b. kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Aset Tetap terdiri dari Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Instalasi; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Masa manfaat lebih dari 12 bulan berarti bahwa aset tersebut masa manfaatnya jangka panjang, pengertian digunakan adalah bahwa aset tersebut digunakan dalam operasional pemda. Terdapat penambahan kriteria yaitu : memenuhi batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.



Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Klasifikasi kewajiban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*).
- Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
- Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****A. PENJELASAN POS-POS AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Penjelasan untuk masing-masing pos akun LRA sebagai berikut:

1. PENDAPATAN - LRA

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp927.645.879.000,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2017. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp904.497.115.208,00 atau 97,50% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Pendapatan Daerah Kota Magelang sesuai SAP meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dalam TA 2017 serta realisasi TA 2016, sebagai berikut:

**Realisasi Pendapatan Per Kelompok Pendapatan Kota Magelang
Tahun Anggaran 2017**

Pendapatan Daerah –LRA :	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LRA	218.085.185.000,00	233.552.828.966,00	107,09	220.315.848.702,00
Pendapatan Transfer-LRA	685.575.423.000,00	651.711.303.112,00	95,06	618.962.380.124,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA	23.985.271.000,00	19.232.983.130,00	80,19	764.397.699,00
Jumlah Pendapatan Daerah-LRA	927.645.879.000,00	904.497.115.208,00	97,50	840.042.626.525,00

Realisasi Pendapatan Kota Magelang TA 2017 sebesar Rp904.497.115.208,00 mengalami penurunan dari target sebesar Rp23.148.763.792,00 atau turun sebesar 2,50% dari anggarannya. Hal ini dikarenakan terdapat dana perimbangan dari Pemerintah Pusat yang bersifat “*given*” khususnya dari Dana Alokasi Khusus yang tidak turun sampai dengan 100%. Kemudian apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 meningkat sebesar Rp47.427.506.946,00 atau mengalami peningkatan sebesar 5,65%. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2017 dan 2016, dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah-LRA	29.821.800.000,00	31.206.960.485,00	104,64	25.974.837.133,00
Retribusi Daerah-LRA	5.422.657.000,00	6.243.021.736,00	115,12	6.663.308.913,00
Hasil Pengelolaan	7.710.904.000,00	7.711.404.121,00	100,01	6.182.279.953,00



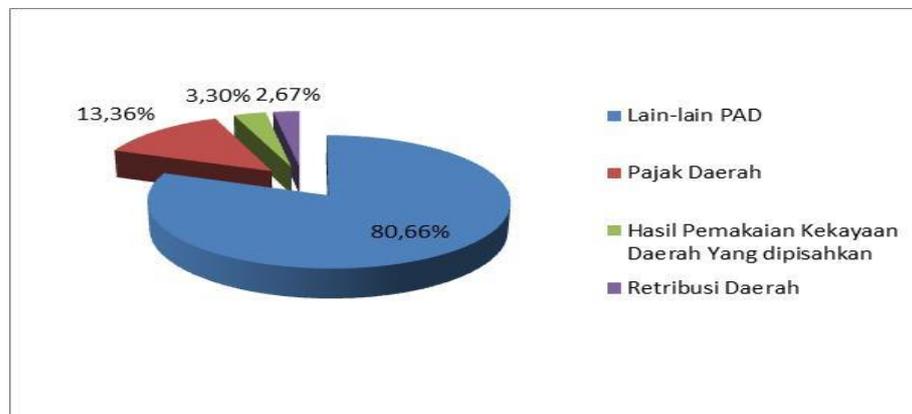
Pendapatan Asli Daerah (PAD) :	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Kekayaan Daerah yang Sah-LRA				
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	175.129.824.000,00	188.391.442.624,00	107,57	181.495.422.703,00
Jumlah	218.085.185.000,00	233.552.828.966,00	107,09	220.315.848.702,00

Realisasi PAD TA 2017 sebesar Rp223.552.828.966,00, melebihi anggaran sebesar Rp15.467.643.966,00 atau 7,09% dari anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2017 yaitu Rp218.085.185.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp13.236.980.264,00 atau naik sebesar 6,01%. Kontribusi kenaikan pendapatan asli daerah ini terbesar terdapat di Lain-lain PAD yang sah yang berasal dari penerimaan BLUD RSU Tidar sebesar Rp.175.474.291.221,00. Kemudian disusul Pajak Daerah dari target Rp.29.821.800.000,00 capaian penerimaannya adalah sebesar Rp.31.207.000.485,00 atau 104,64%. Kontribusi selanjutnya adalah berasal dari Hasil pengeloan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.7.711.404.121,00 dan terakhir dari Retribusi Daerah sebesar Rp.6.243.021,00

Grafik 5.1

Proporsi Jenis Penerimaan Terhadap Kontribusi PAD Tahun 2017

(%)



Sumber: BPKAD Kota Magelang (LRA simda)

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2017 dan 2016, tersaji sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Adapun Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut, adalah Perda nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Daerah Kota



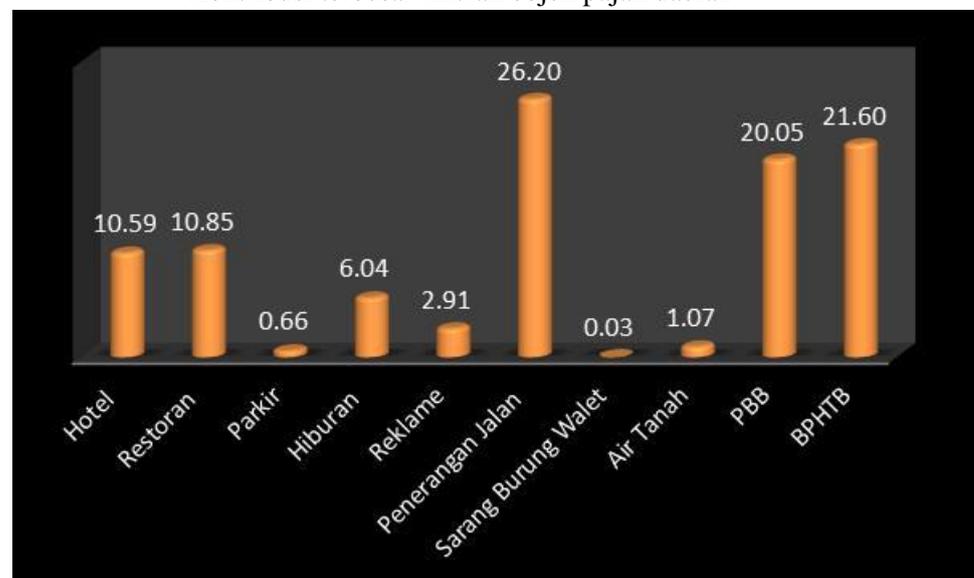
Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak daerah. Pendapatan Pajak Daerah Kota Magelang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang, dengan realisasi selama TA 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah-LRA :	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hotel	3.159.000.000,00	3.304.979.480,00	104,62	2.910.250.748,00
Restoran	2.969.000.000,00	3.388.469.448,00	114,13	2.418.552.101,00
Hiburan	2.120.000.000,00	1.886.016.938,00	88,96	1.617.776.946,00
Reklame	813.000.000,00	885.662.074,00	108,94	827.036.607,00
Penerangan Jalan	8.005.000.000,00	8.189.824.792,00	102,31	7.460.354.497,00
Parkir	195.000.000,00	207.502.220,00	106,41	208.635.075,00
Sarang Burung Walet	10.800.000,00	10.925.000,00	101,16	10.925.000,00
Air Tanah	250.000.000,00	334.209.700,00	133,68	297.816.581,00
Bumi dan Bangunan	5.600.000.000,00	6.257.673.488,00	111,74	5.553.879.993,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.700.000.000,00	6.741.697.345,00	100,62	4.669.609.585,00
Jumlah	29.821.800.000,00	31.206.960.485,00	104,64	25.974.837.133,00

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2017 sebesar Rp31.206.960.485,00, lebih sebesar Rp1.385.160.485,00 atau naik 4,64% dari anggarannya. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp5.232.123.352,00 atau naik sebesar 20,14%.

Grafik 5.2

Kontribusi terbesar rincian objek pajak daerah



Sumber: BPKAD Kota Magelang (LRA simda)

Dari 10 rincian objek pajak daerah, yang tidak tercapai yaitu pajak hiburan sebesar 88,96% hal ini dikarenakan terdapat wajib pajak hiburan yang menutup usahanya.



2) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil, dengan realisasi selama TA 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi-LRA :	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
RETRIBUSI JASA UMUM				
Pelayanan Kesehatan DKK	0,00	0,00	0,00	0,00
Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda – LRA	291.371.000,00	486.829.000,00	167,08	0,00
Persampahan/Kebersihan	320.034.000,00	326.865.600,00	102,13	326.808.600,00
Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Capil	0,00	0,00	0	0,00
Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	300.000.000,00	597.003.750,00	199,00	124.380.000,00
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	605.900.000,00	654.850.000,00	108,08	590.544.000,00
Pelayanan Pasar	1.371.048.000,00	1.576.138.050,00	114,96	1.485.793.575,00
Pelayanan Pengujian Kend.Bermotor	380.701.000,00	388.045.500,00	101,93	511.755.500,00
Pemeriksaan alat pemadam kebakaran	7.000.000,00	7.520.000,00	107,43	10.755.000,00
Pemanfaatan ruang utk menara telekomunikasi	0,00	0,00	0	0,00
Penyediaan/Penyedotan Kakus	12.000.000,00	24.890.000,00	207,42	18.110.000,00
JUMLAH RETRIBUSI JASA UMUM	3.288.054.000,00	4.062.141.900,00	123,54	3.068.146.675,00
RETRIBUSI JASA USAHA				
Pemakaian Kekayaan Daerah-Tanah dan bangunan	525.918.000,00	570.028.336,00	108,39	890.331.238,00
Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemda	0,00	0,00	0,00	223.107.500,00
Pemakaian Kekayaan Daerah-Peralatan dan Mesin	28.500.000,00	27.400.000,00	96,14	51.300.000,00
Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium dan Klinik	10.000.000,00	22.349.000,00	223,49	10.438.000,00
Jasa Usaha Terminal	0,00	0,00	0,00	575.465.000,00
Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	229.560.000,00	229.560.000,00	100,00	231.960.000,00
Jasa Usaha Rumah Pemotongan Hewan	87.000.000,00	96.345.000,00	110,74	89.160.000,00
Tempat Rekreasi dan Olahraga	91.000.000,00	241.598.000,00	265,49	59.800.000,00
JUMLAH RETRIBUSI JASA USAHA	971.978.000,00	1.187.280.336,00	122,15	2.131.561.738,00
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU				
Ijin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	916.262.000,00	87,26	1.305.048.000,00



Pendapatan Retribusi-LRA :	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
Ijin Gangguan/Keramaian	105.000.000,00	69.142.500,00	65,85	150.562.500,00
Ijin Trayek	7.625.000,00	8.195.000,00	107,48	7.990.000,00
JUMLAH RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	1.162.625.000,00	993.599.500,00	85,46	1.463.600.500,00
Jumlah	5.422.657.000,00	6.243.021.736,00	115,13	6.663.308.913,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2017 sebesar Rp6.243.021.736,00 melampaui anggarannya sebesar Rp820.364.736,00 atau 15,13% dari anggarannya. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp420.287.177,00 atau 6,31%. Penurunan ini dikarenakan untuk obyek retribusi perizinan tertentu seperti retribusi ijin gangguan sudah tidak diperbolehkan untuk di pungut. Kemudian untuk retribusi IMB tidak mencapai target dikarenakan kesadaran masyarakat untuk melaporkan pendirian bangunan masih rendah.

Berikut ini rincian Pendapatan Retribusi tahun 2017 per SKPD :

No	SKPD	JENIS RETRIBUSI	REALISASI (Rp)
1.	DINAS KESEHATAN	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKELOLA OLEH PEMDA	486.829.000,00
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - PERALATAN DAN MESIN	16.700.000,00
		RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA	158.975.000,00
		RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	916.262.000,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	102.925.000,00
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	7.520.000,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	RETRIBUSI SEWA TEMPAT PEMAKAMAN ATAU PEMBAKARAN/PENGABUAN MAYAT	597.003.750,00
		RETRIBUSI PENYEDIAAN/ PENYEDOTAN KAKUS	24.890.000,00
		RETRIBUSI IJIN GANGGUAN/ HO	69.142.500,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	14.100.000,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM	654.850.000,00
		RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	388.045.500,00
		RETRIBUSI IJIN TRAYEK	8.195.000,00
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	65.250.000,00



No	SKPD	JENIS RETRIBUSI	REALISASI (Rp)
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	22.349.000,00
		RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	96.345.000,00
		RETRIBUSI TEMPAT REKREASI	82.623.000,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	1.576.138.050,00
		RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	115.713.836,00
		RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	229.560.000,00
11	KECAMATAN MAGELANG SELATAN		
	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	13.400.000,00
	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	9.000.000,00
	KELURAHAN MAGERSARI	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	30.000.000,00
	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	24.500.000,00
	KELURAHAN TIDAR UTARA	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	11.400.000,00
	KELURAHAN TIDAR UTARA	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	400.000,00
	KELURAHAN TIDAR SELATAN	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	10.560.000,00
	12	KECAMATAN MAGELANG TENGAH	
KELURAHAN CACABAN		RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	23.184.000,00
KELURAHAN GELANGAN		RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	24.000.000,00
KELURAHAN KEMIRIREJO		RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	38.400.000,00
KELURAHAN MAGELANG		RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	24.681.600,00
KELURAHAN PANJANG		RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	27.960.000,00
KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA		RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	11.000.000,00
13		KECAMATAN MAGELANG UTARA	
	KELURAHAN KEDUNGSARI	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	10.200.000,00
	KELURAHAN KRAMAT SELATAN	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	14.500.000,00
		RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	450.000,00
	KELURAHAN KRAMAT UTARA	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	18.480.000,00
	KELURAHAN POTROBANGSAN	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	17.600.000,00
	KELURAHAN WATES	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	18.000.000,00



No	SKPD	JENIS RETRIBUSI	REALISASI (Rp)
14	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	281.889.500,00
	Jumlah		6.243.021.736,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan-LRA :	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Perusahaan Milik Daerah	7.710.904.000,00	7.710.904.121,00	100,00	2.029.185.650,00
Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	4.152.577.636,00
Penyertaan Modal / Investasi Kepada Pihak Ketiga/Pengusaha Kecil Menengah	0,00	500.000,00	0,00	516.667,00
Jumlah	7.710.904.000,00	7.711.404.121,00	100,00	6.182.279.953,00

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2017 mencapai hasil sebesar Rp7.711.904.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp500.121,00 dari anggaran tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp1.529.124.168,00 atau 24,73%.

Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

- a) Bagian Laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah atau BUMD sebesar Rp7.710.904.121,00 terdiri dari :
 - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp1.172.684.300,00;
 - Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kiai Langgeng sebesar Rp1.408.272.250,00;
 - Perusahaan Daerah Perbengkelan sebesar Rp43.662.300,00.
 - Bagian laba dari Bank Jateng sebesar Rp3.176.661.229,00;
 - Bagian laba Bank Magelang sebesar Rp1.774.402.300,00; dan
 - Laba BKK Magelang Utara sebesar Rp135.221.742,00.
- b) Bagian Laba atas Penyertaan Modal/ Investasi pada Pengusaha Kecil Menengah sebesar Rp500.000,00 terdiri dari :
 - Koperasi dan UKM sebesar Rp0,00 dan
 - Dana Bergulir/LPT sebesar Rp500.000,00 yang berasal dari setoran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

**4) Lain-lain PAD Yang Sah-LRA**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Lain-lain PAD yang Sah-LRA :	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	30.000.000,00	120.335.000,00	401,12	40.600.000,00
Penerimaan Jasa Giro	4.458.000.000,00	8.605.560.627,00	193,04	7.565.252.536,00
Penerimaan Bunga Deposito	3.250.000.000,00	1.760.068.693,00	54,16	2.535.445.219,00
Pendapatan Denda Pajak	0,00	225.991.584,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi	4.007.000,00	10.339.600,00	258,04	10.153.874,00
Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	0,00	0,00	98.085.049,00
Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah	0,00	479.235,00	0,00	0,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	356.681.000,00	421.509.035,00	118,18	0,00
Pendapatan BLUD	166.757.161.000,00	175.474.291.221,00	105,23	168.426.760.612,00
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	273.975.000,00	1.769.867.629,00	645,98	279.524.742,00
TGR	0,00	3.000.000,00	0,00	22.429.716,00
Penerimaan Lain – Lain	0,00	0,00	0,00	2.439.782.368,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	77.388.587,00
Jumlah	175.129.824.000,00	188.391.442.624,00	107,57	181.495.422.703,00

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2017 tercapai sebesar Rp188.391.442.624,00 lebih sebesar Rp13.261.618.624,00 atau 107,57% dari anggaran tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp6.896.019.921,00 atau sebesar 3,80% dari realisasi tahun 2016.

b. Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi dengan realisasi dalam TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Pendapatan Transfer-LRA :	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-LRA	576.667.228.000,00	553.115.007.612,00	95,92	567.636.707.545,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	47.039.466.000,00	47.039.466.000,00	100,00	0,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Bagi Hasil Pajak lainnya)-LRA	51.494.329.000,00	41.855.667.000,00	81,28	37.179.177.579,00
Bantuan Keuangan-LRA	10.374.400.000,00	9.701.162.500,00	93,51	14.146.495.000,00
Jumlah	685.575.423.000,00	651.711.303.112,00	95,06	618.962.380.124,00

**1) Transfer Pemerintah Pusat- LRA**

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi dalam TA 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LRA	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak-LRA	30.920.025.000,00	25.341.079.039,00	81,96	29.047.508.551,00
Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA	2.143.527.000,00	1.344.690.250,00	62,73	1.285.550.531,00
Dana Alokasi Umum-LRA	440.041.244.000,00	440.041.244.000,00	100,00	447.909.575.000,00
Dana Alokasi Khusus-LRA	103.562.432.000,00	86.387.994.323,00	83,42	89.394.073.463,00
Jumlah Dana Perimbangan	576.667.228.000,00	553.115.007.612,00	95,92	567.636.707.545,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pusat-LRA TA 2017 turun sebesar Rp23.552.220.388,00 atau 4,08% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp576.667.228.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016 mengalami penurunan sebesar Rp14.521.699.933,00 atau turun sebesar 2,56%.

Berikut penjelasan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2017:

- a) Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp25.341.079.039,00 terdiri dari:
- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan sebesar Rp687.399.294,00
 - Bagi Hasil dari PPh Orang Pribadi Dalam Negeri sebesar Rp15.701.997.881,00
 - Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp6.097.809.985,00
 - Bagi Hasil dari PBB Bagian Pemerintah Pusat bagi Rata sebesar Rp2.853.871.879,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 serta Tata Cara Penyelesaiannya, Penjelasan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut :

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017

Uraian	PBB Migas	BP PBB Migas	Jumlah
Tahun 2017	Rp 777,353,476.00	Rp 18,763,500.00	Rp 796,116,976.00
Kurang Salur	Rp 405,082,389.00	Rp 20,650,952.00	Rp 425,733,341.00
	Rp 1,182,435,865.00	Rp 39,414,452.00	Rp 1,221,850,317.00
Lebih Salur	Rp 524,500,006.00	Rp 9,951,017.00	Rp 534,451,023.00
	Rp 657,935,859.00	Rp 29,463,435.00	Rp 687,399,294.00



Penerimaan Dana Bagi PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Tahun 2017

Uraian	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	Jumlah
Tahun 2017	Rp 10.163.823.600,00	Rp 2.740.712.100,00	Rp 12.904.535.700,00
Kurang Salur	Rp 4.709.735.855,00	Rp 624.643.802,00	Rp 5.334.379.657,00
	Rp 14.873.559.455,00	Rp 3.365.355.902,00	Rp 18.238.915.357,00
Lebih Salur	Rp 2.209.879.955,00	Rp 327.037.521,00	Rp 2.536.917.476,00
	Rp 12.663.679.500,00	Rp 3.038.318.381,00	Rp 15.701.997.881,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2017

Uraian	DBHCHT	Jumlah
Tahun 2017	Rp 6.089.703.000,00	Rp 6.089.703.000,00
Kurang Salur 2016	Rp 8.106.985,00	Rp 8.106.985,00
	Rp 6.097.809.985,00	Rp 6.097.809.985,00

Berdasarkan PMK 192/PMK.07/2017 tanggal 8 Desember 2017 Kota Magelang mendapatkan Alokasi sebesar Rp. 6.089.703.000,00 dan Alokasi Kurang Bayar tahun 2016 Berdasarkan PMK 187/PMK.07/2017 tanggal 8 Desember sebesar Rp.8.106.985,00 sehingga Total Alokasi untuk Kota Magelang sebesar Rp.6.097.809.985,00 jumlah tersebut telah masuk ke RKUD Pemerintah Kota Magelang.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Pusat Bagi Rata Tahun 2017

Uraian	PBB Pusat Bagi Rata	Jumlah
Tahun 2017	Rp 2,718,364,000.00	Rp 2,718,364,000.00
Kurang Salur 2016	Rp 905,501,135.00	Rp 905,501,135.00
	Rp 3,623,865,135.00	Rp 3,623,865,135.00
Lebih Salur	Rp 769,993,256.00	Rp 769,993,256.00
Jumlah	Rp 2,853,871,879.00	Rp 2,853,871,879.00

- b) Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA sebesar Rp1.344.690.250,00 terdiri dari:
- Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp232.689.447,00
 - Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp525.572.127,00
 - Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp30.278.848,00
 - Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp480.660.548,00
 - Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi (Iuran Tetap) sebesar Rp71.137.168,00
 - Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum Mineral dan Batu Bara (Royalty) sebesar Rp4.352.112,00



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 serta Tata Cara Penyelesaiannya, Penjelasan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut :

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2017

Jenis Transfer	Tahun 2017	Kurang Salur	Lebih Salur/Potongan	Realisasi
1	2	3	4	5 (2+3-4)
Kehutanan (PSDH)	92,596,500.00	140,092,947.00	-	232,689,447.00
Perikanan	671,905,800.00	77,634,927.00	223,968,600.00	525,572,127.00
SDA Minyak Bumi	43,935,500.00	33,848.00	13,690,500.00	30,278,848.00
SDA Gas Bumi	333,236,179.00	173,534,071.00	26,109,702.00	480,660,548.00
Panas Bumi	20,232,800.00	50,904,368.00	-	71,137,168.00
Mineral & Batu Bara	1,547,500.00	2,804,612.00	-	4,352,112.00
	1,163,454,279.00	445,004,773.00	263,768,802.00	1,344,690,250.00

c) Dana Alokasi Umum sebesar Rp440.041.244.000,00

Berdasarkan Lampiran XIV Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2017, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Alokasi sebesar Rp. 440.041.244.000,00 dan Realisasi Penerimaan DAU diterima 100% sebesar Rp. 440.041.244.000,00.

d) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp86.387.994.323,00

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.86.387.994.323,00 terdiri dari atas DAK Fisik sebesar Rp.50.074.963.597,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp.36.313.030.726,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. DAK Fisik Reguler Tahun 2017 sebesar Rp.18.723.588.234,00
2. DAK Fisik Penugasan 2017 sebesar Rp.30.907.545.363,00
3. DAK Fisik Reguler Penyelesaian 2016 sebesar Rp. 443.830.000,00
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp.36.313.030.726,00

Penjelasan atas Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Berdasarkan Lampiran XV Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2017 Pemerintah Kota Magelang Mendapatkan Alokasi DAK Fisik tahun 2017 sebesar Rp55.955.020.000,00 dan Tambahan DAK Fisik untuk Penyelesaian DAK Fisik Tahun 2016 sebesar Rp.443.830.000,00 Total Alokasi sebesar Rp.56.398.850.000,00. Adapun



Realisasi Penerimaan DAK Fisik sebesar Rp.49.631.133.597,00 untuk Tahun 2017 dan Penerimaan DAK untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun 2016 sebesar Rp.443.830.000,00, total penerimaan sebesar Rp.50.074.963.597,00 atau sebesar 88,31%.

Adapun Penjelasan atas Realisasi Penerimaan DAK Fisik Tahun 2017 sebagai berikut :

Jenis DAK	Alokasi 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (%)
DAK FISIK	56.398.850.000,00	50.074.963.597,00	88,79
DAK REGULER	24.140.468.000,00	19.167.418.234,00	79,40
-Pendidikan			
Pendidikan SD Tahun 2017	920.842.000,00	920.842.000,00	100,00
Penyelesaian Tahun 2016	253.868.000,00	253.868.000,00	100,00
Pendidikan SMP	623.334.000,00	314.498.000,00	50,45
-Kesehatan			
Pelayanan Dasar	6.000.000.000,00	5.743.028.914,00	95,72
Pelayanan Rujukan	10.000.000.000,00	9.500.730.774,00	95,01
Pelayanan Farmasi	1.600.000.000,00	878.750.546,00	54,92
-Perumahan dan Permukiman			
Perumahan & Permukiman	4.552.462.000,00	1.365.738.000,00	30,00
Penyelesaian Tahun 2016	41.332.000,00	41.332.000,00	100,00
-Kedaulatan Pangan			
Penyelesaian Tahun 2016	112.882.000,00	112.882.000,00	100,00
-Transportasi			
Penyelesaian Tahun 2016	35.748.000,00	35.748.000,00	100,00
DAK PENUGASAN	32.258.382.000,00	30.907.545.363,00	95,81
Rumah Sakit Rujukan	15.400.498.000,00	15.119.287.363,00	98,17
Jalan	16.857.884.000,00	15.788.258.000,00	93,65
Jumlah	56.398.850.000,00	50.074.963.597,00	88,79

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mempersyaratkan bahwa penyaluran DAK Triwulan II Tahun 2017 baru dapat disalurkan apabila Data Kontrak telah diinput melalui Aplikasi OMSPAN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2017 sehingga untuk DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman karena Kendala Juknis baru bisa dilaksanakan pada APBD Perubahan Kota Magelang sehingga input Data Kontrak tidak dapat dilakukan dan Penyaluran DAK Bidang Perumahan dan Permukiman hanya sampai dengan Triwulan I sebesar Rp.1.365.738.000,00, DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan karena sampai dengan Penyaluran Triwulan III Realisasi Penyerapan tidak dapat mencapai 90% dari penyaluran sampai dengan Triwulan III sampai batas waktu penyampaian laporan tanggal 15 Desember 2017, sehingga DAK



Fisik Reguler Bidang Pendidikan untuk Triwulan IV tidak bisa tersalurkan sedangkan untuk Bidang Kesehatan Farmasi karena sampai batas waktu input data kontrak tanggal 31 Agustus 2017 proses pengadaan belum bisa dilaksanakan sehingga dari anggaran Rp. 1.600.000.000,00 hanya bisa input data kontrak senilai Rp. 878.750.546,00 sehingga pada Tahun 2017 penerimaan/penyaluran DAK Fisik hanya sebesar nilai kontrak/realisasi penyerapannya.

Penjelasan atas Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

Berdasarkan Lampiran XVI Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi, Kabupaten /Kota Tahun 2017 Pemerintah Kota Magelang Mendapatkan Alokasi DAK Non Fisik Tahun 2017 sebesar Rp47.164.602.000,00 dan Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp36.313.030.726,00 atau sebesar 76,99%. Adapun perincian penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah sebagai berikut :

Jenis DAK	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp.)	Realisasi 2017 (%)
DAK NON FISIK			
BOP PAUD			
BOP PAUD	3.767.400.000,00	1.487.400.000,00	39,48
Tunjangan Profesi Guru			
Tunjangan Profesi Guru	38.734.543.000,00	32.129.887.705,00	82,95
Tambahan Penghasilan Guru			
Tambahan Penghasilan Guru	837.000.000,00	460.350.000,00	55,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB			
BO Kesehatan da KB	3.002.277.000,00	1.448.547.021,00	48,24
Bantuan Operasional KB	213.450.000,00	176.914.000,00	82,88
Dana Admuduk	609.932.000,00	609.932.000,00	100,00
JUMLAH	47.164.602.000,00	36.313.030.726,00	76,99

Beberapa hal yang menyebabkan transfer Dana Alokasi Khusus tidak dapat mencapai 100% adalah :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 pada pasal 91 ayat (12) disebutkan bahwa apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Rekening Kas umum Daerah, maka diperhitungkan dalam penyaluran



Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Tahun Anggaran berikutnya sehingga Penyaluran Tahun 2017 dikurangi dengan Silpa Tahun 2016.

2. Surat Direktur Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-137/PK.2/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG), Dana tambahan Penghasilan (Tamsil) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) Tahun Anggaran 2017 untuk Daerah Tertentu dan Penyaluran Dana Cadangan (Buffer). Pemerintah Kota Magelang mendapat Rekomendasi Penghentian Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD TA. 2017 karena masih terdapat sisa di RKUD Tahun 2016 sebesar Rp. 6.557.284.285,00 dan Rekomendasi Penghentian Penyaluran Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA. 2017 (Stop Penyaluran Triwulan III) karena masih terdapat sisa di RKUD Tahun 2016 sebesar Rp. 2.891.000.000,00 sehingga Penyaluran Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2017 dikurangi dengan Sisa Tahun 2016.

Perincian Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Jenis DAK	Alokasi APBNP 2017 (Rp)	Sisa di RKUD Tahun 2016	Realisasi 2017	%
DAK NON FISIK				
BOP PAUD				
BOP PAUD	3.767.400.000,00	2.280.000.000,00	1.487.400.000,00	39,48
Tunjangan Profesi Guru				
Tunjangan Profesi Guru	37.290.283.000,00	6.557.284.285,00	32.129.887.705,00	86,16
Tambahan Penghasilan Guru				
Tambahan Penghasilan Guru	837.000.000,00	2.891.000.000,00	460.350.000	55,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB				
BO Kesehatan	3.002.277.000,00	803.160.729,00	1.448.547.021,00	48,24
BO Keluarga Berencana	213.450.000,00	36.536.000,00	176.914.000,00	82,88
Dana Admuduk	609.932.000,00	0,00	609.932.000,00	100,00
JUMLAH	45.720.342.000,00	36.313.030.726,00	42.336.535.320	80,08

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Dana Penyesuaian, Dana Otonomi Khusus dan Dana Insentif Daerah, dengan realisasi dalam TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :



Pendapatan Transfer PP- Lainnya-LRA :	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Penyesuaian-LRA	0,00	0,00	0	0,00
Dana Otonomi Khusus-LRA	0,00	0,00	0	0,00
Dana Insentif Daerah-LRA	47.039.466.000,00	47.039.466.000,00	100,00	0,00
Jumlah Lainnya	47.039.466.000,00	47.039.466.000,00	100,00	0,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2017 sebesar Rp47.039.466.000,00 atau 100% berdasarkan Lampiran XVII Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2017, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 47.039.466.000,00 berdasarkan Kriteria Kinerja.

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi berasal dari Pemerintah Propinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, dengan realisasi dalam TA 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Penda Lainnya-LRA :	2017		%	2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak-LRA	51.494.329.000,00	41.855.667.000,00	81,28	37.179.177.579,00
Bagi Hasil Lainnya-LRA	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah	51.494.329.000,00	41.855.667.000,00	81,28	37.179.177.579,00

Realisasi penerimaan bagi hasil pajak provinsi yang telah diterima Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017 sebesar Rp41.855.667.000,00 dari anggaran sebesar Rp51.494.329.000,00 dengan rincian:

No	Uraian	2017		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	PKB	13.304.701.000,00	14.917.672.572,00	112,12
2.	BBNKB	6.442.117.000,00	5.740.135.116,00	89,10
3.	PBBKB	12.909.950.000,00	5.441.745.544,00	42,15
4.	PAP	4.522.000,00	15.516.613,00	345,35
5.	Pajak Rokok	18.833.039.000,00	15.740.497.155,00	83,58
	Jumlah	51.494.329.000,00	41.855.667.000,00	81,28

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/247/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan Alokasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Kota Magelang Mendapatkan Alokasi sebesar Rp. 38.946.528.403,00 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971/0010398/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Alokasi Kurang Salur Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun 2016 untuk Kota Magelang sebesar Rp.4.645.156.745,00 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/214/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Alokasi Kurang Salur



Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 untuk Kota Magelang sebesar Rp.2.909.138.597,00 sehingga Total Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2017 sebesar Rp. 46.500.823.745,00 sedangkan realisasi penerimaan 2017 dan kurang bayar sebesar Rp. 41.855.667.000,00 atau sebesar 90,01%.

Perincian Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017, jumlah yang dibagi hasilkan berdasarkan prosentase penerimaan riil pajak provinsi sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 dan selisih dana bagi hasil pajak yang belum ditransfer belum dapat dipergunakan sebagai dasar pencatatan piutang pajak sebelum ada ketetapan kurang salur, adapun perincian sebagai berikut :

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Kota Magelang
Tahun Anggaran 2017

Jenis Pajak	Alokasi/Transfer	Tahun 2017	Kurang Salur 2016	Jumlah
1		2	3	4
PKB	Alokasi	14,689,547,811.00	1,391,476,895.00	16,081,024,706.00
	Transfer	13,526,195,677.00	1,391,476,895.00	14,917,672,572.00
	Belum Transfer	1,163,352,134.00	-	1,163,352,134.00
PBBKB	Alokasi	6,378,567,083.00	738,692,603.00	7,117,259,686.00
	Transfer	5,001,442,513.00	738,692,603.00	5,740,135,116.00
	Belum Transfer	1,377,124,570.00	-	1,377,124,570.00
BBNKB	Alokasi	12,784,211,054.00	776,777,603.00	13,560,988,657.00
	Transfer	4,664,967,941.00	776,777,603.00	5,441,745,544.00
	Belum Transfer	8,119,243,113.00	-	8,119,243,113.00
PAP	Alokasi	12,416,985.00	2,191,496.00	14,608,481.00
	Transfer	13,425,117.00	2,191,496.00	15,616,613.00
	Belum Transfer	-1,008,132.00	-	1,008,132.00
PAJAK ROKOK	Alokasi	4,881,785,470.00	4,645,156,745.00	9,526,942,215.00
	Transfer	11,095,340,410.00	4,645,156,745.00	15,740,497,155.00
	Belum Transfer	-6,213,554,940.00	-	6,213,554,940.00
JUMLAH	Alokasi	38,746,528,403.00	7,554,295,342.00	46,300,823,745.00
	Transfer	34,301,371,658.00	7,554,295,342.00	41,855,667,000.00
	Belum Transfer	4,445,156,745.00	-	4,445,156,745.00

4) Bantuan Keuangan-LRA

Bantuan Keuangan berasal dari Pemerintah Provinsi, meliputi Bantuan Khusus dan Bantuan Umum dari Provinsi, dengan realisasi dalam TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :



Bantuan Keuangan-LRA :	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bantuan Keuangan dari Provinsi-LRA	10.374.400.000,00	9.701.162.500,00	93,51	14.146.495.000,00
Jumlah	10.374.400.000,00	9.701.162.500,00	93,51	14.146.495.000,00

Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan TA 2017 tidak tercapai sebesar Rp673.237.500,00 atau 6,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.374.400.000,00. Alokasi dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi pada Tahun 2017 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya pelimpahan pendanaan bagi satuan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sehingga alokasi Bantuan Keuangan mengalami penurunan. Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi tidak dapat mencapai 100% dikarenakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah pada pasal 12 disebutkan bahwa besaran anggaran yang dicairkan berdasarkan nilai kontrak.

Berdasarkan DPPA PPKD Provinsi Jawa Tengah TA 2017 Nomor 02332/DPPA/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa TA 2017, Pemerintah Kota Magelang mendapat tambahan Alokasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa berupa Bantuan Khusus untuk TMMD III sebesar Rp 167.200.000,00 sehingga dari alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp 10.541.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.701.162.500,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	2017		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
A	BANTUAN	791.600.000,00	779.923.000,00	98,52
1.	FEDEP	100.000.000,00	100.000.000,00	88,90
2.	TMMD	501.600.000,00	489.923.000,00	97,61
3.	SIPPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
4.	Pendidikan Untuk Semua	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.	NANGKIS	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
6.	GAKY	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
B	SARANA DAN PRASARANA	9.750.000.000,00	8.921.239.500,00	91,50
1.	Pengadaan dan Pemasangan lampu penerangan Stadion Moch. Soebroto Kota Magelang	3.000.000.000,00	2.935.000.000,00	97,83
2.	Pengadaan dan Pemasangan APILL dan ATCS	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
3.	Penataan Kawasan Budaya Mantyasih (Lanjutan)	750.000.000,00	620.555.500,00	82,74
4.	Pembangunan TPST di Kecamatan Magelang Utara	500.000.000,00	424.895.000,00	84,86
5.	Pembangunan Terminal Type C Magersari	2.500.000.000,00	2.243.093.000,00	89,72



No	Uraian	2017		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
6	Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl Beringin IV	1.500.000.000,00	1.196.296.000,00	79,89
	Jumlah	10.541.600.000,00	9.701.162.500,00	92,02

Jika realisasi sebesar Rp 9.701.162,600,00 dibandingkan dengan anggaran alokasi Bantuan Keuangan Kota Magelang yaitu sebesar Rp 10.541.600.000,00 terdapat Rp 673.237.500,00 yang tidak terealisasi yaitu TMMD karena Pencairan Dana sesuai RAB yang direncanakan oleh OPD Pengampu hanya sebesar Rp. 489.829.000,00, Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana untuk pencairan berdasarkan nilai kontrak dengan ketentuan apabila nilai kontrak dibawah pagu alokasi maka pencairan sesuai nilai kontraknya sedangkan apabila Nilai Kontrak diatas Pagu Alokasi maka Pencairan sesuai Pagu Alokasi.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi dalam TA 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah-LRA:	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah-LRA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat-LRA	0,00	0,00	0,00
Hibah Dana BOS	21.985.271.000,00	17.026.981.737,00	0,00
Pendapatan Lainnya-LRA	0,00	206.001.393,00	764.397.699,00
Jumlah	23.985.271.000,00	19.232.983.130,00	764.397.699,00

Pendapatan Hibah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 merupakan Hibah Air Minum yang dialokasikan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-13/MK.7/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Penetapan Pemberian Hibah daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap II dan Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri TA. 2017 untuk Pemerintah Daerah telah diterima Pemerintah Kota Magelang sesuai alokasi sebesar Rp. 2.000.000.000,00

Pendapatan Lainnya-LRA tahun 2017 sebesar Rp206.001.393,00 merupakan pendapatan dari kompensasi pajak PPh 21 gaji yang disebabkan karena adanya peraturan baru pada tahun 2015 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, pada Tahun 2016 terdapat kelebihan pajak yang sudah terlanjur disetor ke Kas Negara, sesuai saran dari BPK bahwa kelebihan setor tersebut harus dikompensasikan ke dalam PPh 21 mulai Tahun 2017 .



2. BELANJA

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa.

Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2017 serta realisasi Tahun Anggaran 2016, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Belanja Daerah :	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	780.341.519.000,00	645.645.777.975,00	648.585.872.187,00
Belanja Modal	271.948.238.000,00	233.070.956.632,00	221.924.457.916,00
Belanja Tidak Terduga (BTT)	22.772.861.000,00	130.744.540,00	706.972.000,00
Jumlah Belanja	1.075.062.418.000,00	878.847.479.147,00	871.217.302.103,00
Transfer Bantuan Keuangan	560.703.000,00	560.702.300,00	641.828.500,00
Jumlah Belanja +Transfer	1.075.623.121.000,00	879.408.181.447,00	871.859.130.603,00

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2017 adalah sebesar Rp878.847.479.147,00 sebesar 81,75% dari anggaran yang ditetapkan. Hal tersebut tercapai karena adanya pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya peningkatan pengendalian dilakukan dengan penghematan biaya (efisiensi anggaran) dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip disiplin anggaran. Sebagai akibat dari kebijaksanaan pengendalian anggaran tersebut terdapat penghematan dan/atau sisa belanja yang disetor ke kas daerah. Pada dasarnya dalam APBD Penetapan ataupun Perubahan telah mengakomodir kebijakan dan regulasi strategis dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta penyesuaian terhadap target kinerja SKPD.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Kota Magelang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2017 sebagai berikut :

Belanja Operasi :	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	398.105.223.000,00	321.762.777.524,00	80,82	346.458.910.068,00
Belanja Barang & Jasa	366.357.847.000,00	310.534.234.831,00	84,76	297.447.892.119,00
Belanja Hibah	9.997.833.000,00	8.385.895.620,00	83,88	1.486.806.000,00
Belanja Bantuan Sosial	5.880.616.000,00	4.962.870.000,00	84,39	3.192.264.000,00
Jumlah	780.341.519.000,00	645.645.777.975,00	82,74	648.585.872.187,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2017 sebesar Rp645.645.777.975,00 atau 82,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp780.341.519.000,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016 mengalami penurunan sebesar Rp2.940.094.212,00 atau 0,45%.

**1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai TA 2017 terealisasi sebesar Rp321.762.777.524,00 atau 80,82% dari anggarannya sebesar Rp398.105.223.000,00, dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp346.458.910.068,00 mengalami penurunan sebesar 7,13%. Berikut ini perinciannya :

URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	187.227.291.893,00	152.356.466.877,00	81,38	194.690.016.502,00
Belanja Tunjangan Keluarga	17.069.744.546,00	12.466.957.997,00	73,04	16.196.826.508,00
Belanja Tunjangan Jabatan	7.321.500.672,00	5.715.716.967,00	78,07	5.856.228.500,00
Belanja Tunjangan Fungsional	10.643.314.845,00	8.109.190.000,00	76,19	10.914.954.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	3.556.678.245,00	2.577.522.134,00	72,47	3.046.150.000,00
Belanja Tunjangan Beras	10.776.870.764,00	7.366.249.940,00	68,35	9.503.035.820,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	473.472.070,00	257.353.851,00	54,35	3.089.909.756,00
Belanja Pembulatan Gaji	2.805.949,00	1.992.770,00	71,02	2.486.254,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	6.135.227.411,00	4.260.780.469,00	69,45	5.449.983.222,00
Belanja Uang Paket	57.358.000,00	47.344.500,00	82,84	48.132.000,00
Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	21.119.000,00	17.036.775,00	80,67	17.721.900,00
Belanja Tunjangan Komisi	38.536.000,00	32.155.200,00	83,44	32.337.900,00
Belanja Tunjangan Badan Anggaran	21.119.000,00	17.036.775,00	80,67	17.721.900,00
Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	6.750.000,00	5.663.700,00	83,91	5.663.700,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	106.247.000,00	68.740.875,00	64,70	76.155.450,00
Belanja Tunjangan Perumahan	3.024.450.000,00	2.493.300.000,00	82,44	2.538.000.000,00
Belanja Uang Duka Wafat/Tewas	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian	12.600.000,00	11.025.000,00	87,50	0,00
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	284.760.000,00	221.760.000,00	77,88	312.480.000,00
Belanja Tunjangan Kesehatan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Ketenagakerjaan	1.012.124.605,00	703.929.914,00	69,55	900.390.354,00
Belanja Tunjangan Badan Legislasi	16.329.000,00	13.519.800,00	82,80	13.702.500,00
Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	45.291.828.000,00	36.617.891.665,00	80,85	0,00
Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	3.728.000.000,00	365.750.000,00	9,81	0,00
Tunjangan Transportasi	750.000.000,00	667.500.000,00	89,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	204.000.000,00	149.800.000,00	73,43	130.125.000,00



URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	38.828.400.000,00	31.159.220.000,00	80,25	24.348.535.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	48.400.000,00	45.000.000,00	92,98	34.400.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Non Sertifikasi Pendidik	0,00	0,00	0,00	626.667.500,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Sertifikasi Pendidik	0,00	0,00	0,00	62.501.142.650,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.310.000.000,00	2.175.600.000,00	94,18	1.890.000.000,00
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	599.975.000,00
Tunjangan Reses	262.500.000,00	151.200.000,00	57,60	0,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.800.450.000,00	1.394.699.275,00	77,46	1.094.175.703,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	290.510.000,00	191.540.347,00	65,93	236.479.039,00
Belanja Uang Lembur PNS	2.847.174.000,00	2.335.300.900,00	82,02	2.108.371.910,00
Belanja Uang Lembur Non PNS	544.841.000,00	371.090.750,00	68,11	177.142.000,00
Belanja Pegawai BOS – LRA	2.030.092.000,00	0,00	0,00	0,00
Honorarium PNS	36.336.402.000,00	33.446.635.843,00	92,05	0,00
Honorarium Non PNS	3.067.308.000,00	2.978.977.000,00	97,12	0,00
Honorarium Pengelola Dana BOS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	11.351.019.000	10.820.734.500,00	95,33	0,00
Jumlah	398.105.223.000,00	320.214.683.824,00	80,43	346.458.910.068,00

Pada komponen Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan, telah mengakomodir penyesuaian terhadap terdapat PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku mulai bulan Januari 2016. Untuk penyesuaian tersebut Pemerintah Kota Magelang baru dapat merealisasikan dan mulai dapat diterapkan pada pembuatan daftar gaji Bulan Oktober 2016, sehingga terhadap perhitungan setor Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut akan dikompensasikan dengan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 berikutnya.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2017 terealisasi sebesar Rp310.534.234.831,00 atau 84,76% dari anggaran sebesar Rp366.357.847,000,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016 naik sebesar 4,40%.



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis	10.273.819.000,00	8.920.277.052,00	86,83	7.824.677.686,00
Belanja Bahan/Material	15.539.761.000,00	10.963.337.913,00	68,81	10.963.086.004,00
Belanja Jasa Kantor	53.592.649.000,00	46.635.711.555,00	87,02	40.741.564.086,00
Belanja Premi Asuransi	10.107.135.000,00	7.687.460.216,00	76,06	8.037.226.241,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.050.585.000,00	6.490.676.685,00	64,58	6.185.501.229,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	8.071.054.000,00	6.941.569.455,00	86,01	6.221.765.612,00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	1.149.207.000,00	997.058.000,00	86,76	743.448.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.017.353.000,00	704.745.000,00	69,27	416.450.000,00
Belanja Sewa dan Perlengkapan Peralatan Kantor	2.636.694.000,00	2.140.010.720,00	81,16	1.510.305.770,00
Belanja Makanan dan Minuman	19.361.107.000,00	15.809.874.499,00	81,66	12.111.869.060,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	688.298.000,00	656.503.050,00	95,38	555.025.000,00
Belanja Pakaian Kerja	520.321.000,00	501.530.550,00	96,39	451.094.800,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.171.431.000,00	1.109.188.500,00	94,69	1.166.654.300,00
Belanja Perjalanan Dinas	35.347.586.000,00	28.022.811.460,00	79,28	25.021.340.630,00
Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	18.733.757.000,00	16.529.109.689,00	88,23	13.578.975.195,00
Belanja Jasa Konsultansi	7.981.619.000,00	6.143.251.205,00	76,97	2.429.867.250,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	20.800.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	87.200.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.568.920.000,00	2.372.522.339,00	92,35	3.049.927.018,00
Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	27.191.505.000,00
Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	2.860.507.000,00
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.794.353.000,00	1.668.245.000,00	92,97	1.808.850.000,00
Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	8.447.660.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	140.143.655.000,00	125.579.304.211,00	89,61	111.730.620.891,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	6.404.012.000,00	4.714.859.076,00	73,62	4.283.261.350,00
Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	6.209.997,00	62,10	8.709.997,00
Belanja Pengembangan Sekolah	2.496.728.000,00	2.010.974.400,00	80,54	0,00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.057.898.000,00	800.431.600,00	75,66	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	15.579.905.000,00	13.338.572.659,00	0,21	0,00
JUMLAH	366.357.847.000,00	310.534.234.831,00	84,76	297.447.892.119,00



Berikut ini adalah rincian Belanja Barang dan Jasa per rincian obyek TA 2017:

a) Belanja Bahan Pakai Habis

No	Belanja Bahan Pakai Habis	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja alat tulis kantor	6.546.807.000,00	5.959.527.745,00	91,03	5.246.027.897,00
2	Belanja dokumen/ administrasi tender	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja alat listrik dan elektronik	840.917.000,00	786.446.850,00	93,52	733.236.320,00
4	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	202.263.000,00	169.234.810,00	83,67	183.291.265,00
5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	843.637.000,00	799.684.624,00	94,79	821.558.494,00
6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.607.160.000,00	1.010.049.348,00	62,85	715.352.340,00
7	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	65.934.000,00	64.245.000,00	97,44	3.910.000,00
8	Belanja pengisian tabung gas	106.680.000,00	82.446.000,00	77,28	74.440.750,00
9	Belanja Bahan untuk UGD	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Bahan untuk Sanitasi	3.828.000,00	3.828.000,00	100,00	0,00
11	Belanja peralatan rumah tangga	56.593.000,00	44.814.675,00	79,19	46.860.620,00
12	Biaya vandel/piala/ trophy dll	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	10.273.819.000,00	8.920.277.052,00	86,83	7.824.677.686,00

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2017 sebesar Rp8.920.277.052,00 atau 86,83% dari anggarannya sebesar Rp10.273.819.000,00

b) Belanja Bahan/ Material

No	Belanja Bahan/ Material	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja bahan baku bangunan	8.442.193.000,00	4.913.151.786,00	58,20	4.287.212.408,00
2	Belanja bahan/bibit tanaman	928.408.000,00	871.999.850,00	93,92	1.526.934.476,00
3	Belanja bibit temak	4.400.000,00	4.340.000,00	98,64	13.010.000,00
4	Belanja bahan obat-obatan	2.454.661.000,00	1.506.052.766,00	61,35	2.016.608.886,00
5	Belanja bahan kimia	1.078.804.000,00	1.019.870.450,00	94,54	726.752.920,00
6	Belanja persediaan makanan pokok	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.977.784.000,00	1.763.672.100,00	89,17	1.673.339.214,00



No	Belanja Bahan/ Material	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8	Bahan Percontohan	598.551.000,00	566.563.961,00	94,66	680.264.100,00
9	Belanja bahan pakan ternak	54.960.000,00	47.687.000,00	86,77	38.964.000,00
	Jumlah	15.539.761.000,00	10.693.337.913,00	68,81	10.963.086.004,00

Realisasi Belanja Bahan/Material TA 2017 sebesar Rp10.963.337.913,00 atau 68,81% dari anggarannya sebesar Rp15.539.761.000,00

c) Belanja Jasa Kantor

No	Belanja Jasa Kantor	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja telepon	552.874.000,00	309.867.752,00	56,05	323.777.754,00
2	Belanja air	1.225.390.000,00	944.647.335,00	77,09	836.912.730,00
3	Belanja listrik	9.591.646.000,00	8.734.571.016,00	91,06	7.871.299.149,00
4	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja surat kabar/ majalah	339.837.000,00	274.218.910,00	80,69	239.518.470,00
6	Belanja kawat/ faksimili/ internet	1.651.616.000,00	1.460.306.280,00	88,42	1.231.991.262,00
7	Belanja paket/ pengiriman	32.049.000,00	21.075.750,00	65,76	101.388.270,00
8	Belanja Sertifikasi	466.277.000,00	381.700.850,00	81,86	189.899.900,00
9	Belanja Jasa Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.925.320.551,00
10	Belanja Jasa Pengemudi	0,00	0,00	0,00	21.456.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.848.566.000,00	10.101.031.315,00	93,11	0,00
12	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	6.813.987.000,00	6.480.703.424,00	95,11	0,00
13	Belanja Jasa Pembuat Minum	90.000.000,00	83.900.000,00	92,60	0,00
14	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.046.808.000,00	1.416.826.200,00	69,22	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.862.944.000,00	7.438.228.200,00	94,60	0,00
16	Belanja jasa Kotak Pos	540.000,00	480.000,00	88,89	0,00
17	Belanja Papan nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	234.070.000,00	219.027.700,00	93,57	0,00
18	Belanja vandal/Plakat/Pigura/T rophy/Bendera/Cinderamata	822.597.000,00	692.072.350,00	84,13	0,00



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No	Belanja Jasa Kantor	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
19	Belanja Pensertifikatan Tanah	118.310.000,00	14.141.840,00	11,95	0,00
20	Belanja Jasa Layanan Internet	383.006.000,00	324.318.733,00	84,68	0,00
21	Belanja Jasa Layanan TV Kabel	4.500.000,00	4.385.100,00	97,45	0,00
22	Belanja Transportasi dan Akomodasi	869.560.000,00	484.709.141,00	55,74	0,00
23	Belanja Dokumentasi	755.770.000,00	656.579.340,00	86,88	0,00
24	Belanja Dekorasi	1.647.940.000,00	1.442.585.226,00	87,54	0,00
25	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	1.013.700.000,00	937.413.330,00	92,47	0,00
26	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	295.918.000,00	268.307.645,00	90,67	0,00
27	Belanja Jasa Pembayaran Pajak / Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Rujukan Pelayanan Kesehatan	12.400.000,00	3.351.500,00	27,03	0,00
29	Belanja pengganti Uang Transport / uang saku	4.150.737.000,00	3.329.754.000,00	80,22	0,00
30	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	111.779.000,00	32.842.500,00	29,38	0,00
31	Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDAS I	74.000.000,00	50.000.000,00	67,57	0,00
32	Belanja Pendaftaran Perkara	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah	621.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Penyediaan Beasiswa	234.550.000,00	47.600.000,00	20,29	0,00
36	Belanja Jasa Pengemudi	572.778.000,00	481.066.118,00	83,99	0,00
37	Belanja Jasa Kebersihan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	53.592.649.000,00	46.635.711.555,00	87,02	40.741.564.086,00

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2017 sebesar Rp46.635.711.555,00 atau 87,02 % dari anggarannya sebesar Rp53.592.649.000,00.

d) Belanja Premi Asuransi

No	Belanja Premi Asuransi	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.132.079.000,00	799.603.130,00	70,63	122.422.730,00



No	Belanja Premi Asuransi	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin	82.000.000,00	1.800.000,00	2,20	0,00
3	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	8.888.356.000,00	6.881.367.186,00	77,42	7.914.803.511,00
4	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	4.700.000,00	4.689.900,00	99,79	0,00
	Jumlah	10.107.135.000,00	7.687.460.216,00	76,06	8.037.226.241,00

Realisasi Belanja Premi Asuransi TA 2017 sebesar Rp7.687.460.216,00 atau 76,06% dari anggarannya sebesar Rp10.107.135.000,00.

e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

No.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Service	1.333.653.000,00	895.766.362,00	67,17	787.691.553,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.702.000,00	1.433.542.591,00	57,33	1.456.874.417,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.613.492.000,00	3.757.601.287,00	66,94	3.600.729.524,00
4	Belanja Jasa KIR	20.070.000,00	5.941.670,00	29,60	4.964.830,00
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	520.343.000,00	377.940.225,00	72,63	315.796.130,00
6	Belanja Jasa Bea Balik Nama kendaraan bermotor	10.950.000,00	600.000,00	5,48	2.050.000,00
7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	51.375.000,00	19.284.550,00	37,54	17.394.775,00
8	Belanja jasa perbaikan ringan dan berat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	10.050.585.000,00	6.490.676.685,00	64,58	6.185.501.229,00

Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2017 sebesar Rp6.490.676.685,00 atau 64,58% dari anggarannya sebesar Rp10.050.585.000,00.

f) Belanja Cetak dan Penggandaan

No	Belanja Cetak dan Penggandaan	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Cetak	4.068.038.000,00	3.657.683.770,00	89,91	3.001.775.209,00
2	Belanja Penggandaan	3.439.246.000,00	2.872.101.035,00	83,51	2.855.094.703,00
3	Belanja Penjilidan	560.195.000,00	409.109.650,00	73,03	364.675.700,00
4	Belanja Laminating	3.575.000,00	2.675.000,00	74,83	220.000,00
	Jumlah	8.071.054.000,00	6.941.569.455,00	86,01	6.221.765.612,00

Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan TA 2017 sebesar Rp6.941.569.455,00 atau 86,01% dari anggarannya sebesar Rp8.071.054.000,00.

**g) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**

No	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.060.407.000,00	948.208.000,00	89,42	728.898.000,00
2	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	88.800.000,00	48.850.000,00	55,01	14.550.000,00
	Jumlah	1.149.207.000,00	997.058.000,00	86,76	743.448.000,00

Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir TA 2017 sebesar Rp997.058.000,00 atau 86,76% dari anggarannya sebesar Rp1.149.207.000,00.

h) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

No	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.017.353.000,00	704.745.000,00	69,27	416.450.000,00
2	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.017.353.000,00	704.745.000,00	69,27	411.248.000,00

Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas TA 2017 sebesar Rp704.745.000,00 atau 69,27% dari anggarannya sebesar Rp1.017.353.000,00.

i) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

No.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja sewa meja kursi	347.361.000,00	277.342.270,00	79,84	276.233.470,00
2	Belanja sewa komputer dan printer	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja sewa proyektor	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja sewa generator	123.150.000,00	110.351.600,00	89,61	70.250.000,00
5	Belanja sewa tenda	212.583.000,00	171.744.200,00	80,79	0,00
6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	581.788.000,00	436.102.250,00	74,96	214.496.000,00
	Belanja sewa tenda/karpet/tikar	608.580.000,00	480.649.600,00	78,98	485.904.300,00
7	Belanja sewa <i>sound system</i>	542.800.000,00	451.934.800,00	83,26	326.090.000,00
8	Belanja sewa alat praktek	40.030.000,00	37.330.000,00	93,26	56.255.000,00
9	Belanja sewa peralatan makan dan minum	38.637.000,00	35.282.000,00	91,32	34.827.000,00
10	Belanja sewa alat alat kesenian	141.765.000,00	139.274.000,00	98,24	46.250.000,00
	Jumlah	2.636.694.000,00	2.140.010.720,00	81,16	1.510.305.770,00



Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor TA 2017 sebesar Rp2.140.010.720,00 atau 81,16 % dari anggarannya sebesar Rp2.140.010.720,00.

j) Belanja Makanan dan Minuman

No	Belanja Makanan dan Minuman	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.125.753.000,00	1.009.501.071,00	89,67	832.385.443,00
2	Belanja makanan dan minuman rapat	13.823.624.000,00	10.896.181.530,00	78,82	7.908.704.550,00
3	Belanja makanan dan minuman tamu	3.577.006.000,00	3.188.458.648,00	89,14	2.602.407.211,00
4	Belanja makanan dan minuman pelatihan	419.075.000,00	328.559.000,00	78,40	465.709.000,00
5	Belanja makanan dan minuman pasien	269.551.000,00	245.201.250,00	90,97	221.016.856,00
6	Belanja Makanan dan minuman petugas piket	146.098.000,00	141.973.000,00	97,18	81.646.000,00
	JUMLAH	19.361.107.000,00	15.809.874.499,00	81,66	12.111.869.060,00

Realisasi Belanja Makanan dan Minuman TA 2017 sebesar Rp15.809.874.499,00 atau 81,66% dari anggarannya sebesar Rp19.361.107.000,00.

k) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

No	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	100.000.000,00	92.230.000,00	93,23	129.373.800,00
2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	105.965.000,00	103.982.600,00	98,13	50.903.200,00
3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.375.000,00	12.375.000,00	100,00	119.348.000,00
4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.000.000,00	44.575.000,00	92,86	78.962.500,00
5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	29.040.000,00	29.040.000,00	100,00	31.000.000,00
6	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	162.262.000,00	147.828.050,00	91,10	0,00
7	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	143.156.000,00	139.722.400,00	97,60	0,00
8	Belanja Pakaian Sipil Resmi	87.500.000,00	85.750.000,00	98,00	0,00
9	Belanja Pakaian Dinas Lainnya	0,00	0,00	0,00	145.437.500,00
	Jumlah	688.298.000,00	656.503.050,00	95,38	498.320.450,00



Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya TA 2017 sebesar Rp656.503.050,00 atau 95,38% dari anggarannya sebesar Rp688.298.000,00.

l) Belanja Pakaian Kerja

No	Belanja Pakaian Kerja	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja pakaian kerja lapangan	493.866.000,00	475.694.300,00	96,32	425.744.800,00
2	Belanja pakaian kerja PMK	26.455.000,00	25.836.250,00	97,66	25.350.000,00
	Jumlah	520.321.000,00	501.530.550,00	96,39	451.094.800,00

Realisasi Belanja Pakaian Kerja TA 2017 sebesar Rp501.530.550,00 atau 96,39% dari anggarannya sebesar Rp520.321.000,00.

m) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

No	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja pakaian KORPRI	3.300.000,00	2.300.000,00	69,70	3.750.000,00
2	Belanja pakaian adat daerah	36.250.000,00	35.000.000,00	96,55	33.484.000,00
3	Belanja pakaian batik tradisional	174.625.000,00	168.725.000,00	96,62	91.350.000,00
4	Belanja pakaian olahraga	957.256.000,00	903.163.500,00	94,35	1.038.070.300,00
	Jumlah	1.171.431.000,00	1.109.188.500,00	94,69	1.166.654.300,00

Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu TA 2017 sebesar Rp1.109.188.500,00 atau 94,69% dari anggarannya sebesar Rp1.171.431.000,00.

n) Belanja Perjalanan Dinas

No	Belanja perjalanan dinas	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.096.336.000,00	27.794.549.631,00	79,20	25.021.340.630,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	251.250.000,00	228.261.829,00	90,85	0,00
	Jumlah	35.347.586.000,00	28.022.811.460,00	79,28	25.021.340.630,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2017 sebesar Rp28.022.811.460,00 atau 79,28% dari anggarannya sebesar Rp35.347.586.000,00.

**o) Belanja Pemeliharaan**

No	Belanja Pemeliharaan	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.337.165.000,00	2.182.012.600,00	93,36	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Jembatan	156.080.000,00	155.525.000,00	99,64	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Tanah	274.775.000,00	270.656.000,00	98,50	77.443.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	2.407.443.000,00	1.616.140.705,00	67,13	1.277.638.782,00
5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.762.124.000,00	6.066.379.447,00	89,71	3.682.611.300,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	200.735.000,00	182.275.000,00	90,80	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	6.463.664.113,00
8	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.548.829.000,00	2.253.465.400,00	88,41	2.077.618.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	3.138.529.000,00	3.068.588.287,00	97,77	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu	117.250.000,00	116.919.000,00	78,04	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Jaringan	790.827.000,00	617.148.250,00	78,04	0,00
	Jumlah	18.733.757.000,00	16.529.109.689,00	88,23	13.578.975.195,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2017 sebesar Rp16.529.109.689,00 atau 88,23% dari anggarannya sebesar Rp18.733.757.000,00.

p) Belanja Jasa Konsultasi

No	Belanja Jasa Konsultasi	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	2.040.028.000,00	1.423.449.600,00	69,78	455.565.000,00
2	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	5.181.870.000,00	4.214.907.605,00	81,34	1.904.141.250,00
3	Belanja jasa Konsultasi Pengawasan	339.021.000,00	167.116.000,00	49,29	70.161.000,00
4	Belanja jasa Konsultasi Penilai	420.700.000,00	337.778.000,00	80,29	0,00
	Jumlah	7.981.619.000,00	6.143.251.205,00	76,97	2.429.867.250,00

Realisasi Belanja Jasa Konsultasi TA 2017 sebesar Rp6.143.251.205,00 atau 76,97% dari anggarannya sebesar Rp7.981.619.000,00.

**q) Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat**

No	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	20.800.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	100,00	20.800.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat TA 2017 sebesar 0,00 dan tidak ada anggarannya.

r) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

No	Belanja beasiswa Pendidikan PNS	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja beasiswa tugas belajar S1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja beasiswa tugas belajar S2	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
3	Belanja beasiswa tugas belajar, belanja bantuan ijin belajar, bantuan penelitian dan studi	0,00	0,00	0,00	27.200.000,00
	Jumlah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	153.100.000,00

Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2017 sebesar Rp60.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp60.000.000,00.

s) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

No	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	2.323.920.000,00	2.174.044.389,00	93,19	2.959.749.700,00
2	Belanja sosialisasi	50.000.000,00	43.318.291,00	86,64	52.818.668,00
3	Belanja bimbingan teknis	186.000.000,00	155.159.659,00	83,42	37.358.650,00
	Jumlah	2.568.920.000,00	2.372.522.339,00	92,35	3.049.927.018,00

Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2017 sebesar Rp2.372.522.339,00 atau 92,35% dari anggarannya sebesar Rp2.568.920.000,00.

**t) Belanja Honorarium PNS**

No	Honorarium PNS	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	21.379.326.000,00
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	356.655.000,00
3	Honorarium PNS Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.455.524.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	27.191.505.000,00

Belanja Honorarium PNS TA 2017 dicatat di Belanja Pegawai.

u) Belanja Honorarium Non PNS

No	Honorarium Non PNS	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	865.062.000,00
2	Honorarium Non PNS Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.995.445.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.860.507.000,00

Belanja Honorarium Non PNS TA 2017 dicatat di Belanja Pegawai.

v) Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat

No	Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Uang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.794.353.000,00	1.668.245.000,00	92,97	1.808.850.000,00
	Jumlah	1.794.353.000,00	1.668.245.000,00	92,97	1.808.850.000,00

Realisasi Belanja Uang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2017 sebesar Rp1.668.245.000,00 atau 92,97% dari anggarannya sebesar Rp1.794.353.000,00.

w) Belanja Pegawai BLUD

No	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00	8.404.294.000,00
2	Belanja Pegawai BLUD PUSKESMAS	0,00	0,00	0,00	43.366.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	8.447.660.000,00

Belanja Pegawai BLUD TA 2017 dicatat di Belanja Pegawai.

**x) Belanja Barang dan Jasa BLUD**

No	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	132.751.151.000,00	120.503.029.047,00	90,77	106.545.590.731,00
2	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	7.392.504.000,00	5.076.275.164,00	68,67	5.185.030.160,00
	Jumlah	140.143.655.000,00	125.579.304.211,00	89,61	111.730.620.891,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2017 sebesar Rp125.579.304.211,00 atau 89,61% dari anggarannya sebesar Rp140.143.655.000,00.

y) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

No	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.404.012.000,00	4.714.859.076,00	73,62	4.283.261.350,00
	Jumlah	6.404.012.000,00	4.714.859.076,00	73,62	4.283.261.350,00

Realisasi Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber TA 2017 sebesar Rp4.715.859.076,00 atau 73,62% dari anggarannya sebesar Rp6.404.012.000,00.

z) Belanja Ijin Operasional Radio

No	Belanja Ijin Operasional	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	6.209.997,00	62,10	8.709.997,00
	Jumlah	10.000.000,00	6.209.997,00	62,10	8.709.997,00

Realisasi Belanja Ijin Operasional TA 2017 sebesar Rp6.209.997,00 atau 62,10% dari anggarannya sebesar Rp10.000.000,00

aa) Belanja Pengembangan Sekolah

No	Belanja Pengembangan Sekolah	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Seragam Sekolah	1.794.013.000,00	1.700.572.000,00	94,79	0,00
2	Belanja Peralatan Sekolah	34.749.000,00	11.604.000,00	33,39	0,00
3	Belanja Pendaftaran/luran	667.966.000,00	298.798.400,00	44,73	0,00
	Jumlah	2.496.728.000,00	2.010.974.400,00	80,54	0,00



Realisasi Belanja Pengembangan Sekolah TA 2017 sebesar Rp2.010.974.400,00 atau 80,54% dari anggarannya sebesar Rp2.496.728.000,00

bb) Belanja Peralatan dan Perlengkapan

No	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Perlengkapan Kantor	180.191.000,00	148.794.000,00	82,58	0,00
3	Belanja Buku Bacaan	865.707.000,00	639.637.600,00	73,89	0,00
	Jumlah	1.057.898.000,00	800.431.600,00	75,66	0,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Perlengkapan TA 2017 sebesar Rp800.431.600,00 atau 75,66% dari anggarannya sebesar Rp1.057.898.000,00

cc) Belanja Barang dan Jasa BOS

No	Belanja Barang dan Jasa BOS	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.579.905.000,00	13.338.572.659,00	85,61	0,00
	Jumlah	15.579.905.000,00	13.338.572.659,00	85,61	0,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2017 sebesar Rp13.338.572.659,00 atau 85,61% dari anggarannya sebesar Rp15.579.905.000,00

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2017 terealisasi sebesar Rp8.385.895.620,00 atau 83,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.997.833.000,00. Belanja Hibah TA 2017 diberikan kepada Badan/Lembaga/Orang Swasta, Hibah kepada Kelompok Masyarakat dan Hibah kepada Sekolah. Besaran Realisasi Belanja Hibah TA 2017 masing-masing sebagai berikut :

No.	Uraian Belanja	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Orang Swasta	1.528.100.000,00	1.413.259.010,00	92,48	1.476.806.000,00
3	Belanja Hibah Kepada Sekolah	8.469.733.000,00	6.972.636.610,00	82,32	0,00
4	Hibah kepada kelompok masyarakat	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5	Hibah Pemilu KDH dan Wakil KDH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA HIBAH	9.997.833.000,00	8.385.895.620,00	83,88	1.486.806.000,00

**4) Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 direalisasikan sebesar Rp4.962.870.000,00 atau sebesar 84,39% dari anggaran sebesar Rp5.880.616.000,00. Belanja bantuan sosial tersebut diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Anggota Masyarakat dan Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan. Besaran Belanja Bantuan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Belanja		Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat					
-	Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat	0,00	0,00	0,00	163.960.000,00
	Jumlah (A)	0,00	0,00	0,00	163.960.000,00
Belanja Sosial kepada Anggota Masyarakat					
-	Bantuan Sosial kepada masyarakat	4.880.616.000,00	4.492.870.000,00	92,06	2.468.304.000,00
	Jumlah (B)	4.880.616.000,00	4.492.870.000,00	92,06	2.468.304.000,00
Belanja Sosial yang Tidak Direncanakan					
-	Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	1.000.000.000,00	470.000.000,00	47,00	560.000.000,00
	Jumlah (C)	1.000.000.000,00	470.000.000,00	47,00	560.000.000,00
Belanja Sosial Barang Yang Diserahkan Ke Masy (Mapping Rekening Akrual)					
-	Bantuan Sosial Berupa Barang diserahkan ke masyarakat	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah (D)		0,00		0,00
	JUMLAH A+B+C+D	5.880.000.000,00	4.962.870.000,00	84,39	3.192.264.000,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal Kota Magelang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya dan Belanja Aset Tak Berwujud dengan realisasi TA 2017 dan 2016, sebagai berikut:

Belanja Modal:	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Tanah	20.596.805.000,00	1.476.985.650,00	7,17	52.100.000,00
Peralatan & Mesin	87.871.572.000,00	82.151.639.808,00	93,49	105.565.517.576,00
Bangunan dan Gedung	97.900.065.000,00	91.263.642.710,00	93,22	56.533.614.650,00
Jalan, Irigasi, Jaringan	58.735.567.000,00	53.058.480.055,00	90,33	57.482.755.890,00
Aset Tetap Lainnya	1.532.714.000,00	1.392.612.400,00	90,86	1.756.599.100,00
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	942.241.000,00	916.725.623,00	97,29	533.870.700,00
Belanja Modal BOS	4.369.274.000,00	2.810.870.386,00	64,33	0,00
Jumlah Belanja Modal	271.948.238.000,00	233.070.956.632,00	85,70	221.924.457.916,00



Belanja Modal TA 2017 terealisasi sebesar Rp233.070.956.632,00 atau 85,70% dari anggaran sebesar Rp271.948.238.000,00. Dan jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2016 sebesar Rp221.924.457.916,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.146.498.716,00 atau realisasi mengalami kenaikan sebesar 5,02% jika dibandingkan dengan Tahun 2016. Uraian selanjutnya untuk Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Untuk Tahun 2017 Pemerintah Kota Magelang menganggarkan Belanja Modal Tanah sebesar Rp20.596.805.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.476.985.650,00 atau sebesar 7,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp.52.100.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.424.885.650,00.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 direalisasikan sebesar Rp82.151.639.808,00 atau 93,49% dari anggarannya sebesar Rp87.871.572.000,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp105.565.517.576,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.413.877.768,00 atau mengalami penurunan sebesar 22,18%.

Uraian	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
BM PERALATAN DAN MESIN		
- Alat Besar Darat	2.413.046.850,00	0,00
- Alat-Alat Besar/ Alat Bantu	2.551.137.000,00	2.365.959.850,00
- Alat-Alat Angkutan	4.938.620.918,00	12.227.587.511,00
- Alat Bengkel	66.609.380,00	247.931.400,00
- Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	76.481.204,00	442.742.000,00
- Alat-Alat Kantor	3.356.825.524,00	3.029.560.601,00
- Alat Rumah Tangga	8.310.564.899,00	7.607.891.653,00
- Komputer	10.963.056.608,00	8.450.430.791,00
- Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	541.390.590,00	348.453.315,00
- Alat Ukur	567.565.800,00	594.341.300,00
- Alat Studio	687.852.209,00	15.099.438,00
- Alat Komunikasi	731.425.769,00	463.486.605,00
- Peralatan Pemancar	0,00	40.779.750,00
- Alat Kedokteran	37.071.961.487,00	45.466.652.168,00
- Alat Kesehatan	6.161.370.646,00	386.161.625,00
- Alat Laboratorium	2.511.833.700,00	3.460.514.010,00
- Alat Peraga/ Praktek Sekolah	197.997.000,00	368.286.100,00
- Alat Radiasi	57.169.600,00	13.135.299,00
- Alat laboratorium Lingkn Hidup	0,00	133.095.000,00
- Alat Keamanan	687.751.780,00	362.120.400,00
- Peralatan dan Mesin BLUD	980.862.089,00	19.541.288.760,00
JUMLAH BM PERALATAN DAN MESIN	82.151.639.808,00	105.565.517.576,00



3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 direalisasikan sebesar Rp91.263.642.710,00 atau 93,22% dari anggarannya sebesar Rp97.900.065.000,00, dan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp56.533.614.650,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.730.028.060,00 atau naik sebesar 61,43%.

No	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	17.256.900.000,00	16.516.647.280,00	95,71	5.382.943.675,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	259.736.000,00	258.317.250,00	99,45	250.648.500,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	1.292.213.000,00	1.167.183.300,00	90,32	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	225.000.000,00	224.128.000,00	99,61	174.420.000,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	5.804.830.000,00	5.605.811.150,00	96,57	10.804.699.200,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	434.341.450,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	92.557.000,00
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.890.000.000,00	1.516.385.000,00	80,23	5.546.568.000,00
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	18.080.064.000,00	16.573.395.500,00	91,67	15.331.885.000,00



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	3.084.875.000,00	2.712.676.950,00	87,93	9.844.236.125,00
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50.750.000,00	49.680.000,00	97,89	228.846.230,00
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	549.211.000,00	542.067.400,00	98,70	744.384.650,00
13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	281.214.000,00	281.006.173,00	99,93	0,00
14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	198.000.000,00	195.888.000,00	98,93	338.223.500,00
15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Museum	195.607.000,00	190.597.000,00	97,44	0,00
13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandar	2.749.400.000,00	2.483.481.950,00	90,33	78.933.150,00
14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.626.527.000,00	2.523.031.262,00	96,06	2.206.836.500,00
15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	7.477.200.000,00	7.120.937.250,00	95,24	0,00
16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	94.038.000,00



No	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	399.390.000,00	392.378.600,00	98,24	0,00
18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	40.500.000,00	39.699.000,00	98,02	136.154.150,00
19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	1.090.035.000,00	736.120.250,00	67,53	1.141.331.000,00
20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	3.457.586.000,00	3.330.460.700,00	96,32	386.845.000,00
21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	1.668.255.000,00	1.438.656.305,00	86,24	1.302.117.450,00
22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	22.494.655.000,00	20.972.3869.100,00	93,23	1.007.777.520,00
23	Konstruksi Taman	6.728.117.000,00	6.392.225.290,00	95,01	1.005.828.550,00
	JUMLAH TOTAL	97.900.065.000,00	91.263.642.710,00	93,22	56.533.614.650,00

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 sebesar Rp53.058.480.055,00 atau 90,33% dari anggaran sebesar Rp58.735.567.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp57.482.755.890,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.424.275.835,00 atau turun sebesar 7,70%.

No	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	28.245.835.000,00	25.974.074.779,00	91,96	34.554.085.612,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	6.333.104.000,00	5.551.744.360,00	87,66	8.064.140.500,00



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	646.046.000,00	626.840.300,00	97,03	847.483.900,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	573.435.000,00	530.442.750,00	92,50	1.650.374.150,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	570.570.000,00	420.447.350,00	73,69	434.997.000,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	217.207.700,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	16.770.000,00	16.047.900,00	95,69	219.918.000,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	26.331.000,00	24.190.650,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2.248.900.000,00	1.831.928.020,00	81,46	358.302.800,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	18.136.017.000,00	16.247.077.796,00	89,58	7.003.027.950,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	136.248.000,00	135.536.000,00	99,48	109.986.000,00
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	198.000.000,00	196.966.000,00	99,48	22.277.450,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	690.255.600,00
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	1.167.679.940,00
15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	163.200.000,00	158.341.750,00	97,02	0,00
16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	191.572.000,00



No	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
	Tenaga Tenaga Surya (PLTS)				
17	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	240.850.000,00	236.531.250,00	98,21	772.402.060,00
18	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.500.000,00
19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	62.550.000,00	62.423.350,00	99,80	0,00
20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	1.001.446.000,00	965.834.800,00	96,44	1.176.220.228,00
21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	55.515.000,00	37.403.000,00	67,37	325.000,00
22	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di Bawah Tanah	5.000.000,00	3.386.000,00	67,72	0,00
	JUMLAH TOTAL	58.735.567.000,00	53.058.480.055,00	90,33	57.482.755.890,00

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2017 sebesar Rp1.392.612.400,00 atau 90,86% dari anggarannya sebesar Rp1.532.714.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp1.756.599.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp363.986.700,00 atau turun 20,72%.

No.	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	757.730.000,00	674.555.500,00	89,54	1.106.676.850,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	4.636.000,00	4.635.000,00	99,98	4.939.350,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	14.156.000,00	14.085.500,00	99,50	3.026.250,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	28.513.000,00	25.517.900,00	89,50	30.320.750,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	25.206.000,00	21.809.500,00	86,53	30.149.850,00



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No.	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	33.360.000,00	33.660.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	11.316.000,00	10.550.300,00	93,23	17.591.550,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	4636.000,00	4636.000,00	100,00	4.949.650,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	14.636.000,00	14.597.500,00	99,74	4.330.150,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artefacts and Realita	0,00	0,00	0,00	51.597.750,00
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00
12	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	22.250.000,00	20.548.000,00	92,03	19.658.600,00
13	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	0,00	0,00	0,00	18.432.200
14	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	0,00	0,00	0,00	14.850.000
15	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	31.487.500
16	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura	0,00	0,00	0,00	50.764.800
17	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	75.050.000,00	74.950.000,00	99,87	0,00
18	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olahraga Senam	24.491.000,00	24.196.000,00	98,80	0,00



No.	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
19	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olahraga Lainnya	3.344.000,00	3.300.000,00	98,68	0,00
20	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	483.090.000,00	465.571.200,00	96,37	365.348.850,00
	JUMLAH TOTAL	1.532.714.000,00	1.392.612.400,00	90,86	1.756.599.100,00

6) Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud TA 2017 sebesar Rp916.725.623,00 atau 97,29% dari anggarannya sebesar Rp942.241.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp533.870.700,00 mengalami kenaikan belanja sebesar Rp382.854.923,00 atau 71,71%.

No.	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	942.241.000,00	916.725.623,00	97,29	482.343.200,00
2	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/ Penelitian	0,00	0,00	0,00	51.527.500,00
	JUMLAH TOTAL	942.241.000,00	916.725.623,00	97,29	533.870.700,00

7) Belanja Modal BOS

Realisasi Belanja Modal BOS TA 2017 sebesar Rp2.810.270.386,00 atau 64,32% dari anggarannya sebesar Rp4.369.274.000,00.

No.	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	2.251.329.000,00	1.512.479.519,00	67,18	0,00
2	Belanja Modal BOS – Gedung dan Bangunan	99.835.000,00	7.200.000,00	7,21	0,00
3	Belanja Modal BOS – Aset Tetap Lainnya	2.018.110.000,00	1.291.190.867,00	63,98	0,00
	JUMLAH TOTAL	4.369.274.000,00	2.810.870.386,00	64,33	0,00

c. Belanja Tak Terduga

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	22.772.661.000,00	130.744.540,00	0,57	706.972.000,00

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana



alam, bencana sosial dan penanggulangan tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Belanja Tak Terduga TA 2017 direalisasikan sebesar Rp130.744.540,00 atau 0,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.722.661.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2016 sebesar Rp706.972.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp576.227.460,00 atau turun sebesar 81,51%. Dana Tak Terduga TA 2017 untuk mengembalikan Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 ke Rekening Kas Umum Negara berdasarkan PMK 187/PMK 07/2016.

3. TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain. termasuk dana perimbangan dan bagi hasil. Transfer terbagi dalam dua jenis yaitu transfer masuk dan transfer keluar. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. missal penerimaan perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil. Sedangkan transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

Sesuai dengan Mapping Kode Rekening Akrual Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 untuk rekening Belanja Bantuan Keuangan berganti menjadi akun Tranfer, sub akun Transfer Bantuan Keuangan. Untuk realisasi transfer Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

TRANSFER :	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Tranfer Bantuan Keuangan	560.703.000,00	560.702.300,00	100,00	641.828.500,00
Tranfer Bantuan Keuangan Lainnya	560.703.000,00	560.702.300,00	100,00	641.828.500,00

Realiasi transfer bantuan keuangan lainnya untuk tahun 2017 terealisasi sebesar Rp560.702.300,00 atau sebesar 100,00% dari anggarannya. Adapun pengeluaran transfer tersebut adalah merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada 8 (delapan partai politik) dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai Politik	Nilai (Rp)
1.	Partai Golongan Karya	81.126.200,00
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	56.021.000,00
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	156.130.000,00
4.	Partai Amanat Nasional	43.595.600,00
5.	Partai Hati Nurani Rakyat	52.861.300,00
6.	Partai Keadilan Sejahtera	50.079.100,00
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	34.149.300,00
8.	Partai Demokrat	60.108.100,00
9.	Partai Nasional Demokrat	26.631.700,00
	Jumlah	560.702.300,00



4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran, dengan anggaran dan realisasi TA 2017 dan 2016, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan, adalah sebagai berikut:

Pembiayaan:	2017		%	2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	165.144.899.000,00	170.066.376.176,00	102,98	201.248.404.030,00
Pengeluaran Pembiayaan	17.167.657.000,00	14.167.657.000,00	82,52	7.087.000.000,00
Pembiayaan Netto	147.977.242.000,00	155.898.719.176,00	105,35	194.161.404.030,00

Penerimaan Pembiayaan TA 2017 terealisasi sebesar Rp170.066.376.176,00 atau 2,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp165.144.899.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp31.182.027.854,00 atau 15,94%.

Pengeluaran pembiayaan TA 2017 direalisasikan sebesar Rp14.167.657.000,00 atau 82,52% dari anggaran sebesar Rp17.167.657.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016 naik sebesar Rp7.080.657.000,00 atau 99,91%.

a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penggunaan SiLPA	162.344.899.000,00	167.368.535.725,00	102,98	201.227.094.865,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya	2.800.000.000,00	2.697.840.451,00	96,35	21.309.165,00
Penerimaan Hasil Penarikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	165.144.899.000,00	170.066.376.176,00	102,98	201.248.404.030,00



Penggunaan SILPA sebesar Rp.167.368.535.725,00 terdiri dari

-Anggaran Penggunaan SILPA Tahun 2016	Rp. 162.344.899.000,00
-Saldo awal Dana BOS	Rp. 5.023.862.322,00
-Biaya Administrasi di rekening Bendahara Pengeluaran DKK	Rp. 90.000,00
-Saldo Kas RSUD Tidar di Bank Mandiri	Rp. 136.549,00
Penggunaan SILPA 2017	Rp. 167.368.535.725,00

Penerimaan kembali investasi non permanen merupakan

-Penerimaan dari AMU Bank Jateng	Rp. 2.650.000.000,00
-Penerimaan dana bergulir IKM dan UKM Koperasi	Rp. 33.665.451,00
-Penerimaan dana bergulir IKM dan UKM LPT	Rp. 14.175.000,00
	Rp. 2.697.840.451,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran Pembiayaan TA 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Pengeluaran Pembiayaan	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi)	14.167.657.000,00	14.167.657.000,00	100,00	7.087.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	17.167.657.000,00	14.167.657.000,00	82,52	7.087.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 tidak direalisasikan karena tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 303 ayat (1) disebutkan bahwa daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp14.167.657.000,00 terdiri dari:

- Bank Jateng sebesar Rp3.975.000.000,00
- Bank Magelang sebesar Rp3.000.000.000,00
- PD Percetakan sebesar Rp665.000.000,00
- PDOW Taman Kyai Langgeng sebesar Rp1.000.000.000,00
- BKK Kota Magelang sebesar Rp.500.000.000,00
- PD Perbengkelan sebesar Rp.500.000.000,00
- Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp.4.527.657.000,00.

**5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)**

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam TA 2017 sebesar Rp180.987.652.937,00 merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto. SiLPA ini terdiri dari:

Total Pendapatan	Rp	904.497.115.208,00
Total Belanja	Rp	878.847.479.147,00
Total Transfer	Rp	<u>560.702.300,00 (-)</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>25.088.933.761,00</u>
Penerimaan Pembiayaan	Rp	170.066.376.176,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>14.167.657.000,00 (-)</u>
Pembiayaan Neto	Rp	<u>155.898.719.176,00</u>
SiLPA (Surplus/Defisit+Pembiayaan Netto)	Rp	<u>180.987.652.937,00</u>

SiLPA sebesar Rp180.987.652.937,00 tersebut terdiri dari SiLPA terikat sebesar Rp57.206.462.779,00 dan SiLPA tidak terikat sebesar Rp123.781.190.158,00. SiLPA terikat terdiri dari:

a. Sisa Dana Alokasi Khusus sebesar Rp18.093.222.466,00

Sisa Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 18.093.222.466,00 terdiri dari :

1. Sisa DAK s/d Tahun 2016 Rp. 15.893.051.247,00
2. Sisa DAK Reguler dan Penugasan Rp. 710.325.124,00
3. Sisa DAK Non Fisik (BOP PAUD, BOK, BOKB dan Adminduk Rp. 1.489.846.095,00

Sisa DAK Reguler Tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut :

Jenis DAK	Alokasi 2017 (Rp)	Penyaluran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Silpa (Rp)
DAK FISIK	55.955.020.000,00	49.631.133.597,00	48.920.808.473,00	710.325.124,00
DAK REGULER	1.544.176.000,00	1.235.340.000,00	816.050.000,00	504.712.124,00
-Pendidikan				
Pendidikan SD Tahun 2017	920.842.000,00	920.842.000,00	816.050.000,00	104.792.000,00
Pendidikan SMP	623.334.000,00	314.498.000,00	0,00	314.498.000,00
-Kesehatan				
Pelayanan Dasar	6.000.000.000,00	5.743.028.914,00	5.724.998.914,00	18.030.000,00
Pelayanan Rujukan	10.000.000.000,00	9.500.730.774,00	9.500.730.774,00	0,00
Pelayanan Farmasi	1.600.000.000,00	878.750.546,00	811.358.422,00	67.392.124,00
-Perumahan dan Permukiman				
Perumahan & Permukiman	4.552.462.000,00	1.365.738.000,00	1.365.738.000,00	0,00



Jenis DAK	Alokasi 2017 (Rp)	Penyaluran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Silpa (Rp)
DAK PENUGASAN	32.258.382.000,00	30.907.545.363,00	30.701.932.363,00	205.613.000,00
Rumah Sakit Rujukan	15.400.498.000,00	15.119.287.363,00	15.119.287.363,00	0,00
Jalan	16.857.884.000,00	15.788.258.000,00	15.582.645.000,00	205.613.000,00
Jumlah	55.955.020.000,00	49.631.133.597,00	48.920.808.473,00	710.325.124,00

Sisa DAK Non Fisik Tahun 2017

Jenis DAK	Anggaran 2017 (Rp)	Penyaluran 2017/Sisa 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Silpa (Rp)
DAK NON FISIK				
BOP PAUD				
BOP PAUD	3.767.400.000,00	1.487.400.000,00	3.127.800.000,00	639.600.000,00
Sisa 2016		2.280.000.000,00		
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB				
BO Kesehatan da KB	3.002.277.000,00	1.448.547.021,00	1.736.909.201,00	514.798.549,00
Sisa s/d 2016		803.160.729,00		
Bantuan Operasional KB	213.450.000,00	176.914.000,00	213.445.054,00	4.946,00
Sisa s/d 2016		36.536.000,00		
Dana Adminduk	609.932.000,00	609.932.000,00	274.489.400,00	335.442.600,00
		0		
JUMLAH	7.593.059.000,00	6.842.489.750,00	5.352.643.655,00	1.489.846.095,00

b. Sisa Tambahan Profesi Guru sebesar Rp2.069.280.325,00

Jenis DAK	Anggaran 2017 (Rp)	Penyaluran 2017/Sisa 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Silpa (Rp)
DAK NON FISIK				
Tunjangan Profesi Guru				
Tunjangan Profesi Guru	38.734.543.000,00	32.129.887.705,00	36.617.891.665,00	2.069.280.325,00
Sisa s/d 2016		6.557.284.285,00		
JUMLAH	38.734.543.000,00	38.687.171.990,00	36.617.891.665,00	2.069.280.325,00

c. Sisa Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp2.985.350.000,00

Jenis DAK	Anggaran 2017 (Rp)	Penyaluran 2017/Sisa 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Silpa (Rp)
DAK NON FISIK				
Tambahan Penghasilan Guru				
Tambahan Penghasilan Guru	837.000.000,00	460.350.000,00	366.000.000,00	2.985.350.000,00
Sisa s/d 2016		2.891.000.000,00		
JUMLAH	837.000.000,00	3.351.350.000,00	366.000.000,00	2.985.350.000,00



- d. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp3.054.203.096,00

Jenis	Penyaluran 2017/Sisa 2016 (Rp)	REALISASI 2017		Silpa (Rp)
		Keterangan	Rp	
DBH CHT				
Reguler TA 2017	6.089.703.000,00	Spesific Grant	7.299.562.613,00	3.054.203.096,00
Kurang bayar di TA 2017	8.106.985,00	Block Grant	666.328.550,00	
Sisa DBH CHT 2016	4.922.284.274,00			
JUMLAH	11.020.094.259,00		7.965.891.163,00	3.054.203.096,00,00

- e. Sisa Kas BLUD RSUD sebesar Rp22.630.044.021,00
- f. Sisa Kas BLUD Puskesmas sebesar Rp.3.988.766.557,00
- g. Sisa Kas di Bendahara BOS sebesar Rp4.385.596.314,00.



B. PENJELASAN POS-POS AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2017 merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp201.227.094.865,00 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2016.

2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2016 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017 sebesar Rp167.368.535.725,00.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp180.988.252.937,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran	Rp 25.088.933.761,00
- Pembiayaan Netto	Rp155.898.719.176,00
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp180.987.652.937,00

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00

5. Lain-lain

Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL sebesar Rp0,00

6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar **Rp180.987.652.937,00** sesuai dengan SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017.



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



C. PENJELASAN POS-POS AKUN NERACA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempengaruhi nilai saldo awal per SKPD akan tetapi jumlah asset Kota Magelang tetap sesuai dengan neraca audited tahun 2016. Dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah tersebut didukung dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Saldo Awal Perangkat Daerah Pemerintah Kota Magelang dan Keputusan Walikota Magelang Nomor 920/105/112/Tahun 2017 tentang Penetapan Saldo Awal Laporan Keuangan Satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017. Pos akun neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos akun-pos akun neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

1. ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2017 sebesar **Rp3.582.703.616.656,51** disajikan dengan rincian sebagai berikut:

**Rincian Aset Pemerintah
Kota Magelang per 31 Desember 2017**

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Aset Lancar	214.062.722.187,94	211.503.342.479,99	2.559.379.707,95
Investasi Jangka Panjang	109.334.517.241,24	89.338.735.769,75	19.995.781.471,49
Aset Tetap	3.207.158.465.378,68	2.500.007.190.531,80	707.151.274.846,88
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	52.147.911.848,65	120.044.315.825,90	(67.896.403.977,25)
Jumlah	3.582.703.616.656,51	2.920.893.584.607,44	661.810.032.049,07

Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp661.810.032.049,07 atau 22,66%.

a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2017 sebesar **Rp214.062.722.187,94** disajikan sebagai berikut:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Kas di Kas Daerah	149.893.319.461,00	131.826.189.289,00	18.067.130.172,00
Kas di Bendahara Penerimaan	89.926.584,00	59.378.635,00	(30.547.949,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	107.649.002,00	87.214.538,00	20.434.464,00

Formatted: English (U.S.)

Formatted Table

Formatted Table



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Kas di BLUD	26.618.810.578,00	30.441.940.189,00	(3.823.129.611,00)
Kas di Bendahara BOS	4.385.596.314,00	4.979.812.566,00	(594.216.252,00)
Kas Lainnya	10.072.500,00	9.468.620,00	603.880,00
Piutang Pendapatan	31.821.675.648,46	40.302.063.737,57	(8.480.388.089,11)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(13.106.452.909,66)	(12.841.217.274,26)	(1.235.341.890,65)
Piutang Lainnya	3.873.905.408,00	3.924.745.859,00	(50.840.451,00)
Penyisihan Piutang Lainnya	(3.234.651.241,25)	(3.278.991.692,25)	(1.014.446.706,25)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
Persediaan	13.602.870.843,39	15.992.738.012,93	(2.390.084.419,54)
Jumlah	214.062.722.187,94	211.503.342.479,99	(2.559.379.707,95)

1) **Kas dan Setara Kas**

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2017 sebesar **Rp181.105.374.439,00**. Rincian kas dan setara kas berikut ini :

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	149.893.319.461,00	131.826.189.289,00	18.067.130.172,00
Kas di Bendahara Penerimaan	89.926.584,00	59.378.635,00	30.547.949,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	107.649.002,00	87.214.538,00	20.434.464,00
Kas di BLUD	26.618.810.578,00	30.441.940.189,00	(3.823.129.611,00)
Kas di Bendahara BOS	4.385.596.314,00	4.979.812.566,00	(594.216.252,00)
Kas Lainnya	10.072.500,00	9.468.620,00	603.880,00
Jumlah	181.105.374.439,00	167.404.003.837,00	13.701.370.602,00

a) **Kas di Kas Daerah**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 sebesar **Rp149.893.319.461,00** dengan rincian sebagai berikut:

Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2016

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo RKUD Bank Jateng	129.893.959.461,00
2	Penerimaan sisa Dana BOS Propinsi yang salah masuk ke RKUD oleh SMP Muhammadiyah dan sudah dipindahbukukan tanggal 17 Januari 2018	(640.000,00)
3	Deposito Bank BTN	20.000.000.000,00
	Jumlah	149.893.319.461,00

b) **Kas di Bendahara Penerimaan**

Per tanggal 31 Desember 2016 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp89.926.584,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rekening Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017

No	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke rekening BLUD
1	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	77.019.273,00	2 Januari 2018
2	Dinas Kesehatan	12.907.311,00	19 Januari 2018
	Jumlah	89.926.584,00	



Sisa kas di bendahara penerimaan RSUD Tidar sebesar Rp77.019.273,00 merupakan penerimaan kas pada bendahara penerimaan sebesar Rp73.657.560,00 yang belum disetorkan ke Rekening BLUD sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan saldo kas sebesar Rp3.361.713,00 yang ada di rekening Bank Mandiri yang merupakan rekening apabila terdapat transaksi melalui EDC yang per tanggal 31 Desember 2017 belum disetorkan ke rekening BLUD di Bank Jateng.

Sisa kas di bendahara penerimaan Dinas Kesehatan sebesar Rp12.907.311,00 merupakan penerimaan atas pelayanan kesehatan pada Rumah Bersalin Paten dan Lab Kes yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

c) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp107.649.002,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017

No	SKPD	Nilai (Rp)
1.	DPUPR	10.534.064,00
2	Dinas Perumahan dan Pemukiman	62.378.750,00
3	Kelurahan Rejo Utara	8.015.000,00
4	Disporapar	26.721.188,00
	Jumlah (A+B)	107.649.002,00

Penjelasan atas kas di bendahara pengeluaran berikut ini :

1. DPUPR sebesar Rp10.534.064,00 merupakan utang pajak yang masih belum dibayarkan oleh pihak ketiga atas kegiatan pada tahun 2007 dan 2009.
2. Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp62.378.750,00 merupakan SP2D atas kegiatan tahun 2017 yang merupakan belanja honorarium pihak ketiga dimana sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 masih di rekening bendahara pengeluaran tetapi sudah menjadi realisasi APBD Tahun Anggaran 2017.
3. Kelurahan Rejo Utara sebesar Rp8.015.000,00 merupakan SP2D atas kegiatan tahun 2017 yang merupakan belanja tenaga kerja non pegawai dimana sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 masih di rekening bendahara pengeluaran tetapi sudah menjadi realisasi APBD Tahun Anggaran 2017.
4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp26.721.188,00 merupakan utang pajak atas kegiatan yang belum disetorkan per tanggal 31 Desember 2017.



d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2017 sebesar **Rp26.618.810.578,00** dengan rincian sebagai berikut:

Rekening Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2017

No	BLUD	Nilai (Rp)
1	RSUD Tidar	22.630.044.021,00
2	Puskesmas Magelang Selatan	658.550.434,00
3	Puskesmas Jurangombo	418.1250.098,00
4	Puskesmas Magelang Tengah	1.308.510.035,00
5	Puskesmas Kerkopan	386.017.402,00
6	Puskesmas Magelang Utara	1.217.568.588,00
	Jumlah	26.618.810.578,00

e) Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di bendahara BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.385.596.314,00. Pada tahun 2016 terdapat sisa kas di bendahara BOS sebesar Rp4.979.812.566,00 kemudian selama tahun 2017 terdapat koreksi saldo awal menjadi Rp5.023.862.322,00, selama tahun 2017 terdapat realisasi pendapatan sebesar Rp17.026.981.737,00 dan belanja sebesar Rp17.665.247,745,00 sehingga saldo akhir tahun 2017 sebesar Rp4.385.596.314,00.

f) Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp10.072.500,00 terdiri dari saldo kas pada Puskesmas Magelang Utara sebesar Rp7.108.000,00 dan kas pada Puskesmas Jurangombo sebesar Rp2.964.500,00.

2) Piutang Pendapatan

Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp31.821.675.648,46 dan Rp40.302.063.737,57. Nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp18.715.222.738,88 berasal dari nilai bruto sebesar Rp31.821.675.648,46 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp13.106.452.909,66 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017 dan 2016

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) 2017 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan) 2017 (Rp)	Saldo per 31 Des 2016 (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)	6
1	Piutang Pajak Daerah	13.345.117.940,00	(11.413.248.514,90)	1.931.869.425,10	13.003.098.737,00
	Pajak Penerangan Jalan	724.346.023,00	0,00	724.346.023,00	637.559.426,00
	Pajak Reklame	16.373.000,00	0,00	16.372.000,00	20.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) 2017 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan) 2017 (Rp)	Saldo per 31 Des 2016 (Rp)
	Pajak Air Tanah	6.027.600,00	0,00	6.027.600,00	1.846.000,00
	Pajak Bumi dan Bangunan	12.598.371.317,00	(11.413.248.514,90)	1.185.122.802,10	12.363.673.311,00
2	Piutang Retribusi Daerah	264.988.630,00	(264.988.630,00)	0,00	894.116.296,00
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	0,00	0,00	0,00	9.277.450,00
	Retribusi pasar Rejowinangun dan PJKA	264.988.630,00	(264.988.630,00)	0,00	264.988.630,00
	Retribusi Pasar Cacaban (Ret Pemakaian Kekayaan Daerah)	0,00	0,00	0,00	10.737.216,00
	Retribusi IMB	0,00	0,00	0,00	609.113.000,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang sah	18.211.569.078,46	(1.428.215.764,76)	16.783.353.313,11	22.920.455.232,57
	Piutang BLUD RSUD	16.762.770.484,00	(75.192.850,00)	16.687.577.634,00	21.942.436.391,00
	Piutang BLUD Puskesmas Magelang Selatan	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	2.575.000,00
	Piutang BLUD Puskesmas Jurangombo	175.000,00	0,00	175.000,00	1.925.000,00
	Piutang BLUD Puskesmas Magelang Tengah	0,00	0,00	0,00	3.505.000,00
	Piutang BLUD Puskesmas Kerkopan	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	2.585.000,00
	Piutang BLUD Puskesmas Magelang Utara	19.650.000,00	0,00	19.650.000,00	3.420.000,00
	Piutang BPJS UPT Farmasi DKK	0,00	0,00	0,00	98.608.613,00
	Piutang RB Paten	65.800.000,00	0,00	65.800.000,00	0,00
	Piutang Dishub	130.127.025,00	(130.127.025,00)	0,00	130.127.025,00
	Piutang DPUPR	1.220.320.419,46	(1.220.320.419,46)	0,00	611.207.419,46
	Piutang Pasar Cacaban	0,00	0,00	0,00	606.880,00
	Piutang Bunga Deposito (DPPKD)	0,00	0,00	0,00	123.458.904,11
	Piutang Sewa Tanah, gedung dan bangunan -PPKD	9.141.150,00	(2.575.470,30)	6.565.679,70	0,00
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	3.484.393.472,00	3.484.393.472,00
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DPPKD)	0,00	0,00	3.484.393.472,00	3.484.393.472,00
	Jumlah Piutang Pendapatan	31.821.675.648,46	(13.106.452.909,66)	18.715.222.738,80	40.302.063.737,57



Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp31.821.675.648,46** dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Piutang Pajak sebesar **Rp13.345.117.940,00** terdiri dari :

- (1) Piutang pajak penerangan jalan umum yang merupakan hak Pemerintah Kota Magelang terhadap Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) bulan Desember 2017 sebesar Rp724.346.023,00.
- (2) Piutang Pajak Reklame Rp16.373.000,00.
- (3) Piutang Pajak Air Tanah Rp6.027.600,00
- (4) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar **Rp12.598.371.317,00** dengan rincian berikut ini :

a.	Piutang s/d tahun 2012	Rp	9.373.206.328,00
b.	Piutang tahun 2013	Rp	690.022.645,00
c.	Piutang tahun 2014	Rp	673.437.315,00
d.	Piutang tahun 2015	Rp	630.994.673,00
e.	Piutang tahun 2016	Rp	595.034.637,00
f.	Piutang tahun 2017	Rp	635.675.719,00
JUMLAH PIUTANG PBB P2		Rp	12.598.371.317,00

b) Piutang Retribusi sebesar **Rp264.988.630,00** terdiri dari:

- (1) Piutang retribusi pasar Rejowinangun yang terdapat pada Dinas Pengelolaan Pasar sebesar Rp264.988.630,00 merupakan akumulasi saldo tagihan retribusi pasar sampai dengan 31 Desember 2017. Terdiri dari:

(a) piutang pedagang pasar Rejowinangun sebesar Rp255.985.230,00 dengan rincian tagihan sebagai berikut :

Piutang s.d tahun 2003	Rp	112.995.580,00
Piutang tahun 2004	Rp	15.012.675,00
Piutang tahun 2005	Rp	20.139.525,00
Piutang tahun 2006	Rp	28.712.150,00
Piutang tahun 2007	Rp	41.782.650,00
Piutang tahun 2008	Rp	37.342.650,00
Jumlah	Rp	255.985.230,00

Piutang sebesar Rp255.985.230,00 merupakan piutang yang timbul karena terjadi peristiwa kebakaran Pasar Rejowinangun pada Bulan Juli 2008 yang menghancurkan kios/los Pasar Rejowinangun. Sebagian besar pedagang dipindahkan ke lokasi Pasar Penampungan. Peristiwa tersebut berpengaruh terhadap kelancaran penagihan piutang retribusi pelayanan pasar pada periode yang akan datang. Terhadap kondisi tersebut Pemerintah Kota Magelang belum menetapkan kebijakan tentang perlakuan piutang retribusi pasar Rejowinangun.



- (b) pedagang yang menempati los pada lahan PT KAI sebesar Rp9.003.400,00 dengan rincian tagihan sebagai berikut :

Piutang s.d tahun 2003	Rp	8.789.000,00
Piutang tahun 2004	Rp	34.000,00
Piutang tahun 2005	Rp	123.000,00
Piutang tahun 2006	Rp	10.000,00
Piutang tahun 2007	Rp	32.400,00
Piutang Tahun 2008	Rp	15.000,00
Jumlah	Rp	9.003.400,00

- c) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2013 sebesar **Rp18.211.569.078,46** terdiri dari :

- (1) Piutang RSUD Tidar senilai **Rp16.762.770.484,00**. Rincian piutang tersebut adalah :

No	Uraian	Tahun	Nilai (Rp)
1.	Pasien Umum	s.d.2005	45.660.000,00
2.	Pasien BPJS Kesehatan	2017	16.280.308.444,00
3.	Pasien In Health	s/d 2016	4.184.600,00
4.	Pasien Jasa Raharja	s/d 2017	338.784.790,00
5.	Sewa ruang koperasi Mulya Husada	2017	100.000,00
6.	RST dr. Soedjono	s/d 2017	39.455.000,00
7.	RS. Harapan	s/d 2017	34.447.000,00
8.	Pasien jamkesda Kab Purworejo	s/d 2017	10.000.000,00
9.	RS Lestari Raharja	s/d 2017	255.000,00
10.	Yakes Telkom	s/d 2017	8.075.650,00
11.	RSUD Temanggung	s/d 2017	1.500.000,00
	Jumlah		16.762.770.484,00

- (2) Piutang Puskesmas Magelang Selatan senilai Rp2.375.000,00 yang merupakan piutang BPJS Kesehatan.
- (3) Piutang Puskesmas Jurangombo senilai Rp175.000,00 yang merupakan piutang BPJS Kesehatan.
- (4) Piutang Puskesmas Kerkopan senilai Rp1.210.000,00 yang merupakan piutang BPJS Kesehatan.
- (5) Piutang Puskesmas Magelang Utara berdasarkan koreksi audit BPK senilai Rp19.650.000,00.
- (6) Piutang BPJS pada Labkes Dinas Kesehatan senilai Rp65.800.000,00



- (7) Piutang Dinas Perhubungan senilai Rp130.127.025,00 merupakan piutang retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga yaitu:
- Lokasi parkir Jl. Mataram (Sdr. BS) Tahun 2001 sebesar Rp30.850.000,00;
 - Lokasi parkir Jl. Mataram (Sdr. BW) Tahun 2002 sebesar Rp7.350.000,00;
 - Parkir tepi jalan umum (Sdr. H) Tahun 2002 sebesar Rp15.000.000,00;
 - Parkir tepi jalan umum (Sdr. DP) Tahun 2003 sebesar Rp76.927.025,00.
- (8) Piutang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar **Rp 1.220.320.419,46** terdiri dari **Rp611.207.419,46** dan **Rp609.113.000,00** yang merupakan limpahan dari DKPTK karena perubahan SOTK baru berdasarkan Perda Nomo3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari :
- Tuntutan Ganti Rugi kepada pihak ketiga pada tahun 2016 sebesar **Rp565.708.000,00** merupakan piutang kepada pihak ketiga hasil pemeriksaan BPK tahun 2008 pada DPU.
 - Piutang kepada pihak ketiga sebesar **Rp45.499.419,46** merupakan piutang DPU kepada CV Toya Gesang atas belanja tahun 2003-2004 yang merupakan hasil pemeriksaan BPK tahun 2011. Selama tahun 2014 tidak ada pembayaran atas piutang tersebut.
 - Piutang IMB merupakan piutang IMB pasar Gotong Royong sebesar Rp609.113.000,00 (SKRD IMB + Denda Administrasi).
- (9) Piutang Retribusi Pemakaian Tanah yang dikelola oleh Bagian Perlengkapan (BPKAD-Pengelola) sebesar Rp9.141.150,00

3) Penyisihan Piutang Pendapatan Tak Tertagih

Dengan adanya kebijakan akuntansi yang mengatur tentang penyisihan piutang pada tahun 2016 dan 2017 telah dilaksanakan penyisihan piutang atas piutang yang termasuk kategori piutang tidak tertagih atau macet. Perhitungan Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang		2017 (Rp)	2016 (Rp)
A	Piutang Pajak		
	DPPKD (PBB P2)	11.413.248.514,90	11.128.845.999,80
B.	Piutang Retribusi		
	Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	264.988.630,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	264.988.630,00	



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

C.	Piutang Lain-lain PAD yang sah		
	Dinas Perhubungan. Kominfo	130.127.025,00	130.127.025,00
	PPKD	2.575.470,30	
	DPU	0,00	611.207.419,46
	DPUPR	1.220.320.419,46	
	Piutang RSU	75.192.850,00	96.935.200,00
	Jumlah	13.106.452.909,66	12.841.217.274,26

Berikut ini penjelasan atas Penyisihan Piutang Pendapatan Tidak Tertagih di Pemerintah Kota Magelang adalah:

- a) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan **Rp12.596.371.317,00**, dengan nilai piutang tersebut terdapat penyisihan piutang sebesar **Rp11.413.248.514,90**. Perhitungannya dengan tabel berikut ini :

Tahun	Pokok Piutang	Denda	Jumlah Piutang	Umur	%	Penyisihan Piutang
s/d 2012	6.333.247.710,00	3.039.958.618,00	9.373.206.328,00	> 36 bln	100%	9.373.206.328,00
2013	466.231.503,00	223.791.142,00	690.022.645,00	> 36 bln	100%	690.022.645,00
2014	455.025.193,00	218.412.122,00	673.437.315,00	36 bln	100%	673.437.315,00
2015	426.347.739,00	204.646.934,00	630.994.673,00	24 bln	50%	315.497.336,50
2016	457.718.713,00	137.315.924,00	595.034.637,00	24 bln	50%	297.517.318,50
2017	599.693.960,00	35.981.759,00	635.675.719,00	12 bln	10%	63.567.571,90
JMLH	8.738.264.818,00	3.860.106.499,00	12.598.371.317,00			11.413.248.514,90

- b) Piutang Retribusi Pasar terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sebesar Rp264.988.630,00. Piutang ini merupakan piutang retribusi pasar Rejowinangun sebelum terjadi musibah kebakaran. Piutang tersebut dikategorikan tidak tertagih atau macet karena bertahun-tahun tidak ada pembayaran atau pengurangan atas piutang tersebut sehingga dilakukan penyisihan piutang 100% sebesar Rp264.988.630,00. Berikut ini masing-masing perhitungannya :

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Nilai Piutang > 36 Bulan	Penyisihan	Jumlah (Rp)
1	Pasar Rejowinangun	s/d 2003	112.995.580,00	100%	112.995.580,00
2	Pasar Rejowinangun	2004	15.012.675,00	100%	15.012.675,00
3	Pasar Rejowinangun	2005	20.139.525,00	100%	20.139.525,00
4	Pasar Rejowinangun	2006	28.712.150,00	100%	28.712.150,00
5	Pasar Rejowinangun	2007	41.782.650,00	100%	41.782.650,00
6	Pasar Rejowinangun	2003 s/d 26 Juli 2008	37.342.650,00	100%	37.342.650,00
7	PJKA	2004	8.789.000,00	100%	8.789.000,00
8	PJKA	2005	34.000,00	100%	34.000,00
9	PJKA	2006	123.000,00	100%	123.000,00
10	PJKA	2007	10.000,00	100%	10.000,00
11	PJKA	s/d 26 Juli 2008	32.400,00	100%	32.400,00
12	PJKA		15.000,00	100%	15.000,00
	JUMLAH		264.988.630,00		264.988.630,00



- c) Piutang Retribusi IMB yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sebesar **Rp609.113.000,00**. Piutang ini dikategorikan tidak tertagih atau macet sehingga dilakukan penyisihan piutang 100% sehingga penyisihan piutang juga sebesar **Rp609.113.000,00**. Berikut ini perhitungannya :

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Umur Piutang > 36 Bulan	Penyisihan	Jumlah
1	Piutang retribusi IMB (SKRD IMB + denda administrasi)	2009	609.113.000,00	100%	609.113.000,00
	JUMLAH		609.113.000,00		609.113.000,00

- d) Piutang Retribusi parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar **Rp130.127.025,00**. Piutang tersebut merupakan retribusi piutang yang dikelola oleh pihak ketiga. Atas piutang tersebut bertahun-tahun tidak ada itikad baik dari pihak yang mempunyai piutang sehingga dilakukan penyisihan piutang 100% sebesar **Rp130.127.025,00**.

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Umur Piutang > 36 bulan	Penyisihan	Jumlah (Rp)
1	Parkir Jl. Mataram	2001	30.850.000,00	100%	30.850.000,00
2	Parkir Jl. Mataram	2002	7.350.000,00	100%	7.350.000,00
3	Parkir Tepi Jl. Umum	2002	15.000.000,00	100%	15.000.000,00
4	Parkir Tepi Jl. Umum	2003	76.927.025,00	100%	76.927.025,00
	JUMLAH		130.127.025,00		130.127.025,00

- e) Piutang Lain-Lain yang terdapat di DPU sebesar **Rp611.207.419,46** terdiri dari Tuntutan Ganti Rugi kepada pihak ketiga pada sebesar Rp565.708.000,00 merupakan piutang kepada pihak ketiga hasil pemeriksaan BPK tahun 2008 dan piutang kepada pihak ketiga sebesar Rp45.499.419,46 merupakan piutang DPU kepada CV Toya Gesang atas belanja tahun 2003-2004 yang merupakan hasil pemeriksaan BPK tahun 2011. Karena piutang sebesar Rp611.207.419,46 dikategorikan tidak tertagih atau macet maka disisihkan 100% sebesar Rp611.207.419,46. Berikut ini perhitungan penyisihan piutang lain-lain di Dinas Pekerjaan Umum :

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Nilai Piutang > 60 bulan	Penyisihan	Jumlah
1	Kekurangan volume pekerjaan keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Jaya Manunggal	2008	39.860.000,00	100%	39.860.000,00
2	Kekurangan volume pekerjaan keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Sumber Agung	2008	37.764.000,00	100%	37.764.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Nilai Piutang > 60 bulan	Penyisihan	Jumlah
3	Kekurangan volume pekerjaan keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Cahaya Mega Sejati	2008	110.612.000,00	100%	110.612.000,00
4	Kekurangan volume pekerjaan keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Baja Persada	2008	49.441.000,00	100%	49.441.000,00
5	Kekurangan volume pekerjaan keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Muhandas Struktur	2008	109.231.000,00	100%	109.231.000,00
6	Kekurangan volume pekerjaan keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Dot Com	2008	138.661.000,00	100%	138.661.000,00
7	Kekurangan volume pekerjaan keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Prima Kurnia Sejahtera	2008	80.139.000,00	100%	80.139.000,00
8	Kekurangan volume pekerjaan keg peningkatan jalan Kalimas a.n CV. Toya Gesang	2003	45.499.419,46	100%	45.499.419,46
	JUMLAH		611.207.419,46		611.207.419,46

- f) RSUD Tidar melakukan penyisihan piutang atas piutang yang dikategorikan tidak tertagih atau macet sebesar **Rp75.192.850,00**. Piutang tersebut terdiri dari piutang dari pasien umum, pasien klaim dan pasien in health.

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Jumlah (Rp)
1	Pasien Umum	2005	6.620.600,00	100%	6.620.600,00
2	Pasien Umum	2006	10.690.800,00	100%	10.690.800,00
3	Pasien Umum	2007	28.348.600,00	100%	28.348.600,00
4	Pasien Klaim tidak layak bayar BPJS	2017	286.959.300,00	10%	28.695.930,00
5	Pasien In Health	2017	2.659.550,00	20%	531.910,00
6	Pasien In Health	2017	1.525.050	20%	305.010,00
	JUMLAH		336.903.900,00		75.192.850,00

4) Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar **Rp2.264.544.986,00** dapat dijelaskan sebagai berikut:

Piutang Lainnya per 31 Desember 2017

No	Jenis Piutang Lainnya	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) 2017	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan) 2017	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) 2015
1	2	3	4	5 (3-4)	6
a.	Piutang Diskoperindag	1.609.360.422,00	(970.106.255,25)	639.254.166,75	1.657.200.873,00
b.	Piutang TPTGR	2.264.544.986,00	(2.264.544.986,00)	0,00	2.267.544.986,00
	Jumlah	3.873.905.408,00	(3.234.651.241,25)	639.254.166,75	3.924.745.859,00



Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Magelang sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar **Rp3.873.905.408,00** dengan rincian sebagai berikut:

- a) Piutang tuntutan ganti rugi kepada pegawai, pimpinan dan anggota DPRD yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 02/TP-TGR/123 Tahun 2008 tanggal 6 Februari 2008. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 besarnya piutang tuntutan ganti rugi kepada pegawai, pimpinan dan anggota DPRD tersebut menjadi:
 - 1) Tuntutan ganti rugi **Rp19.175.386,00** merupakan piutang pada pegawai atas penghapusan kendaraan dinas. Sampai dengan 31 Desember 2016 tidak ada pembayaran.
 - 2) Tuntutan ganti rugi tahun 2017 sebesar **Rp2.245.369.600,00** adalah piutang TGR kepada pimpinan dan anggota DPRD sesuai hasil pemeriksaan BPK Tahun 2004, 2005, dan 2006. Selama tahun 2017 terdapat pembayaran Rp3.000.000,00.
- b) Piutang dana bergulir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp1.609.360.422,00** merupakan investasi non permanen dana bergulir yang sudah jatuh tempo dan tidak digulirkan lagi dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Piutang Lain – Lain	Tahun Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang
1	Koperasi					
	Dana Bergulir PK/Koperasi	2003 s/d 2011	100.791.500,00	-	10.175.000,00	90.616.500,00
	Modal penyertaan Koperasi	2007 s/d 2013	158.000.000,00	-	28.000.000,00	130.000.000,00
2	Dana Bergulir Kelompok	2012 s/d 2015	1.274.000.000,00	-	0,00	1.274.000.000,00
	LPT					
	LPT – Indag	2005 s/d 2012	124.409.373,00	-	9.665.451,00	114.743.922,00
			1.657.200.873,00	-	47.840.154,00	1.609.360.422,00

5) Penyisihan Piutang Lainnya Tak Tertagih

Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Diskoperindag	970.106.255,25	1.011.446.706,25
2	DPPKD	2.264.544.986,00	2.267.544.986,00
	Jumlah	3.234.651.241,25	3.278.991.692,25

Berikut ini penjelasan atas Penyisihan Piutang Lainnya di Pemerintah Kota Magelang adalah:

- a) Piutang dana bergulir pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sebesar **Rp1.609.360.422,00** dilakukan penyisihan atas piutang yang tidak tertagih sebesar **Rp970.106.255,25**. Berikut ini perhitungannya :



Pemerintah Kota Magelang
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Umur Piutang					Jumlah		
			≤ 1 Tahun	>1 s/d 2 Thn	>2 s/d 3 Thn	>3 s/d 4 Thn	>4 s/d 5 Thn		>5 Thn	
1	UMKM Perorangan	2003	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
		2004	-	-	-	-	-	7.849.000,00	7.849.000,00	
		2006	-	-	-	-	-	1.437.500,00	1.437.500,00	
		2007	-	-	-	-	-	435.000,00	435.000,00	
		2008	-	-	-	-	-	4.710.000,00	4.710.000,00	
		2009	-	-	-	-	-	9.940.000,00	9.940.000,00	
		2010	-	-	-	-	-	32.300.000,00	32.300.000,00	
		2011	-	-	-	-	-	31.945.000,00	31.945.000,00	
	% Penyisihan		10%	25%	35%	50%	75%	100%		
	Jml Penyisihan Tidak Tertagih		-	-	-	-	-	90.616.500,00	90.616.500,00	
2	Koperasi	2007	-	-	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	
		2008	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2010	-	-	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	
		2011	-	-	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	
		2012	-	-	-	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	
		2013	-	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	
			% Penyisihan		10%	25%	35%	50%	75%	100%
	Jml Penyisihan Tidak Tertagih		-	-	-	7.500.000,00	22.500.000,00	85.000.000,00	115.000.000,00	
3	Pra Koperasi/ Kelompok	2012	-	-	-	-	247.000.000,00	-	247.000.000,00	
		2013	-	-	-	713.500.000,00	-	-	713.500.000,00	
		2014	-	-	313.500.000,00	-	-	-	313.500.000,00	
			% Penyisihan		10%	25%	35%	50%	75%	100%
	Jml Penyisihan Tidak Tertagih		-	-	109.725.000,00	356.750.000,00	185.250.000,00	-	651.725.000,00	
4	LPT- Indag	2005	-	-	-	-	-	3.083.001,00	3.083.001,00	
		2006	-	-	-	-	-	10.826.665,00	10.826.665,00	
		2007	-	-	-	-	-	17.834.167,00	17.834.167,00	
		2008	-	-	-	-	-	15.717.597,00	15.717.597,00	
		2009	-	-	-	-	-	17.238.332,00	17.238.332,00	
		2010	-	-	-	-	-	17.514.999,00	17.514.999,00	
		2011	-	-	-	-	-	24.612.494,00	24.612.494,00	
		2012	-	-	-	-	-	7.916.667,00	-	7.916.667,00
			% Penyisihan		10%	25%	35%	50%	75%	100%
	Jml Penyisihan Tidak Tertagih		-	-	-	-	5.937.500,25	106.827.255,00	112.764.755,25	
Total Penyisihan Piutang					109.725.000,00	364.250.000,00	213.687.500,25	282.443.755,00	970.106.255,25	



- b) Piutang Tuntutan Ganti Rugi pada BPKAD senilai **Rp2.264.554.986,00** dilakukan penyisihan piutang 100% sebesar **Rp2.264.554.986,00**. Berikut ini perhitungannya :

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Nilai Piutang yang umurnya > 3 s/d 4 Tahun	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang Tdk Tertagih
1	Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	2010	19.175.386,00	100%	19.175.386,00
2	Pengembalian Kesejahteraan	2010	2.245.379.600,00	100%	2.245.379.600,00
	JUMLAH		2.264.544.986,00		2.264.544.986,00

6) Beban di Bayar Dimuka

Saldo Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun bersangkutan atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2017 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Magelang.

7) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Penilaian persediaan pada Pemerintah Kota Magelang dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) dan pencatatannya dengan metode periodik dengan rincian saldo per 31 Desember 2017 dan 2016, sebagai berikut:

Persediaan		2017	2016
	Persediaan	Rp.	Rp.
1	ATK/ Pakai Habis	581.388.850,00	422.414.774,00
2	Cetakan	554.651.520,50	413.105.203,50
3	Alat Listrik	100.422.175,00	23.276.350,00
4	Alat Kebersihan	88.161.850,00	122.601.950,00
5	Obat	9.427.912.023,99	12.573.379.732,46
6	Bahan Kimia dan Bahan/alat Radiologi	73.477.510,00	108.095.505,00
7	Materai dan Perangko	2.077.000,00	3.304.500,00
8	Bahan Makanan	171.704.170,00	23.116.170,00
9	Peralatan Rumah Tangga	-	4.308.230,00
10	Bibit tanaman dan Bibit ternak	344.200.750,00	143.263.050,00
11	Pakan Ikan Ternak	9.048.000,00	9.963.000,00
12	Alat Lab	700.612.731,27	283.649.956,40
13	Bahan dan alat CSSD	186.939.628,51	216.072.519,80
14	Alat Kesehatan	1.042.718.713,12	955.445.253,81
15	Lain-lain	319.555.921,00	690.741.817,96
	Jumlah Persediaan	13.602.870.843,39	15.992.738.012,93



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

- a) Rincian saldo persediaan ATK dan barang pakai habis lainnya yang belum terpakai di SKPD per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp581.388.850,00 dan Rp422.414.774,00 sebagai berikut :

Saldo Persediaan ATK dan Barang Pakai Habis per SKPD

No.	SKPD	2017 (Rp.)	2016 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	0,00	217,863,102.00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	97,446,241.00	0,00
3	Dinas Kesehatan	13,237,800.00	47,355,300.00
4	RSUD Tidar	121,487,500.00	25,476,650.00
5	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	416,000.00
6	DPUPR	239,500.00	0,00
7	Disperkim	179,000.00	0,00
8	Badan Perencanaan pembangunan Daerah	10,938,500.00	8,320,400.00
9	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	0,00	703,000.00
10	Dishub	1,090,500.00	0,00
11	Diskominsta	1,192,250.00	0,00
12	Dinas Kebersihan Pertamanan & T. kota	0,00	982,250.00
13	DLH	715,500.00	0,00
14	Dinas Kependudukan & Capil	230,450,184.00	45,102,562.00
15	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	0,00	3,081,100.00
16	Dinas Tenaga Kerja	3,235,000.00	0,00
17	Dinas Sosial	684,500.00	0,00
18	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	0,00	667,200.00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,377,750.00	0,00
20	Kantor Penanaman Modal	0,00	48,000.00
21	DPMPTSP	5,412,200.00	0,00
22	Dinas Pemuda, Olah Raga, Budpar	0,00	467,500.00
23	DISPORAPAR	122,250.00	0,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	383,500.00	207,750.00
25	Badan Kesatuan Politik & Linmas	760,000.00	190,200.00
26	DPRD & Sekretariat DPRD	2,944,250.00	4,696,400.00
27	Sekretariat Daerah	10,793,710.00	6,945,400.00
28	Kantor Penelitian, Pengemb. & Statistik	0,00	575,000.00
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	166,500.00	0,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No.	SKPD	2017 (Rp.)	2016 (Rp.)
30	Kantor Kec. Magelang Utara	1,856,250.00	838,500.00
31	Kantor Kec. Magelang Selatan	923,750.00	1,012,500.00
32	Kantor Kec. Magelang Tengah	2,775,810.00	6,980,975.00
33	Kelurahan Rejowinangun Selatan	110,000.00	205,750.00
34	Kelurahan Magersari	617,500.00	1,775,500.00
35	Kelurahan Jurangombo Utara	320,500.00	94,500.00
36	Kelurahan Jurangombo Selatan	11,250.00	61,600.00
37	Kelurahan Tidar Utara	779,250.00	433,215.00
38	Kelurahan Tidar Selatan	182,250.00	210,000.00
39	Kelurahan Wates	621,000.00	878,500.00
40	Kelurahan Potrobangsari	1,408,600.00	2,200,100.00
41	Kelurahan Kedungsari	529,750.00	356,500.00
42	Kelurahan Kramat Utara	1,080,500.00	638,900.00
43	Kelurahan Kramat Selatan	160,000.00	190,000.00
44	Kelurahan Kemirirejo	556,950.00	302,350.00
45	Kelurahan Cacaban	681,000.00	204,000.00
46	Kelurahan Rejowinangun Utara	516,000.00	865,000.00
47	Kelurahan Magelang	2,692,900.00	893,630.00
48	Kelurahan Panjang	521,000.00	262,500.00
49	Kelurahan Gelangan	377,000.00	686,000.00
50	Inspektorat	967,000.00	273,500.00
51	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	1,015,400.00
52	BKPP	787,000.00	0,00
53	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	0,00	3,331,460.00
54	DPPKD	0,00	30,785,800.00
55	BPKAD	15,768,650.00	0,00
56	Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	1,018,500.00
57	Badan Pemberd. Masy. Perempuan & KB	1,398,500.00	258,000.00
58	Kantor Perputastakaan, arsip & Dokumentasi	907,250.00	759,750.00
59	Dinas Pertanian, Peternakan & Perikanan	0,00	2,784,530.00
60	Dinas Pertanian dan Pangan	2,044,070.00	0,00
61	Puskesmas Magelang Selatan	16,334,150.00	0,00
62	Puskesmas Magelang Utara	5,804,810.00	0,00
63	Puskesmas Magelang Tengah	558,000.00	0,00
64	Puskesmas Jurangombo	7,183,875.00	0,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No.	SKPD	2017 (Rp.)	2016 (Rp.)
65	Puskemas Kerkopan	9,958,650.00	0,00
	Jumlah ATK	581,388,850.00	422,414,774.00

- b) Saldo persediaan cetakan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp554.651.520,50 dan Rp413.105.203,50 dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Cetakan pada:		2017 (Rp.)	2016 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	0,00	8,717,400.00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,175,900.00	0,00
3	Dinas Kesehatan	18,190,140.00	38,063,860.50
4	RSUD Tidar	59,378,125.00	28,282,625.00
5	Bappeda	11,197,700.00	5,958,200.00
6	Dinhubkominfo	0,00	56,046,952.00
7	Dishub	103,930,486.00	0,00
8	DKPTK	0,00	64,000.00
9	DLH	0,00	0,00
10	Dinas Kependudukan dan Capil	202,184,940.00	194,726,000.00
11	Disnakertransos	0,00	3,859,000.00
12	Disnaker	1,352,500.00	0,00
13	Dinsos	425,000.00	0,00
14	Kantor Penanaman Modal	0,00	62,000.00
15	DPMPTSP	0,00	0,00
16	Sekretariat Daerah	41,225,100.00	18,481,400.00
17	Kelurahan Kramat Utara	0,00	164,000.00
18	Dinas Pertanian	0,00	31,752.00
19	Kel. Potrobangsan	218,000.00	444,800.00
20	Kel. Magelang	0,00	554,700.00
21	BKD	0,00	738,000.00
22	BKPP	895,000.00	0,00
23	Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	38,831,654.00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Persediaan Cetakan pada:		2017 (Rp.)	2016 (Rp.)
24	Disperindag	36,482,356.00	0,00
25	BPPT	0,00	2,496,310.00
26	Kan Perpus arsip dan dokumentasi	39,100,500.00	13,059,000.00
27	DPPKD	0,00	2,523,550.00
28	BPKAD	4,817,200.00	0,00
29	Dipertan	16,072.00	0,00
30	Puskesmas Magelang Selatan	1,648,310.00	0,00
31	Puskesmas Magelang Utara	7,296,915.00	0,00
32	Puskesmas Magelang Tengah	3,250,960.00	0,00
33	Puskesmas Jurangombo	10,151,296.50	0,00
34	Puskemas Kerkopan	9,715,020.00	0,00
	Jumlah	554,651,520.50	413,105,203.50

c) Saldo Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp100.422.175,00 dan Rp23.276.350,00.

Persediaan Alat Listrik pada :		2017	2016 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	0,00	10,267,000.00
2	Disdikbud	2,002,900.00	0,00
3	DKK	2,648,300.00	5,677,400.00
4	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota	0,00	4,106,500.00
5	DLH	87,474,275.00	0,00
6	Dispendukcapil	2,128,500.00	1,658,050.00
7	Kec. Magelang Utara	162,000.00	0,00
8	BKD	0,00	286,000.00
9	BKPP	673,500.00	0,00
10	Dinas Pertanian, Peternakan & Perikanan	0,00	10,900.00
11	Dinas Pertanian dan Pangan	918,000.00	0,00
12	Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	315,500.00
13	Disperindag	208,500.00	0,00
14	Setwan	180,000.00	955,000.00
15	Dinsos	1,473,000.00	0,00
16	Puskesmas Magelang Utara	401,150.00	0,00
17	Puskesmas Magelang Tengah	296,000.00	0,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Persediaan Alat Listrik pada :		2017	2016 (Rp.)
18	Puskesmas Jurangombo	774,250.00	0,00
19	Puskemas Kerkopan	1,081,800.00	0,00
Jumlah Alat Listrik		100,422,175.00	23,276,350.00

- d) Saldo Persediaan Alat Kebersihan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing Rp88.161.850,00 dan Rp122.601.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Alat Kebersihan		2017 (Rp.)	2016 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	0,00	28,375,695.00
2	Disdikbud	15,124,300.00	0,00
3	RSUD Tidar	43,615,400.00	11,088,400.00
4	DKK	2,929,600.00	14,490,375.00
5	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	128,000.00
6	DPUPR	681,500.00	0,00
7	DKPTK	0,00	58,565,000.00
8	DLH	3,879,000.00	0,00
9	Dinas Kependudukan & Capil	2,796,000.00	1,739,500.00
10	Disnakertransos	0,00	399,400.00
11	Disnaker	765,000.00	0,00
12	Dinsos	673,100.00	0,00
13	DPRD & Sekretariat DPRD	1,195,000.00	899,500.00
14	Kantor Kesbang Polinmas	81,600.00	78,350.00
15	Sekretariat Daerah	2,707,500.00	1,318,900.00
16	Kec. Magelang Selatan	388,000.00	276,000.00
17	Kelurahan Wates	68,900.00	306,350.00
18	Kec. Magelang Utara	257,600.00	333,500.00
19	BKD	0,00	317,500.00
20	BKPP	129,500.00	0,00
21	Kelurahan Kramat Utara	518,500.00	0,00
22	Kel. Magersari	153,000.00	0,00
23	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	0,00	2,332,580.00
24	DPMPSTSP	0,00	0,00
25	Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	195,500.00
26	Dinas Pertanian, Peternakan & Perikanan	0,00	1,223,800.00
27	Dinas Pertanian dan Pangan	1,532,900.00	0,00
28	Disperindag	171,500.00	0,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Persediaan Alat Kebersihan		2017 (Rp.)	2016 (Rp.)
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	272,900.00	533,600.00
30	Puskesmas Magelang Selatan	481,100.00	0,00
31	Puskesmas Magelang Utara	5,484,000.00	0,00
32	Puskesmas Magelang Tengah	59,500.00	0,00
33	Puskesmas Jurangombo	1,628,550.00	0,00
34	Puskemas Kerkopan	1,861,400.00	0,00
35	Balitbang	303,500.00	0,00
36	BPKAD	403,000.00	0,00
Jumlah Alat Kebersihan		88,161,850.00	122.601.950,00

- e) Saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp9.427.912.023,99 dan Rp12.573.379.732,46 dengan rincian sebagai berikut:

SKPD		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	DIKNAS	925.200,00	2.169.650,00
2	Dinas Kesehatan	1.497.828.269,28	2.285.888.932,75
3	Puskesmas Mgl Selatan	79.796.725,00	0,00
4	Puskesmas Mgl Utara	96.384.109,95	0,00
5	Puskesmas Mgl Tengah	57.165.697,35	0,00
6	Puskesmas Jurangombo	57.100.036,32	0,00
7	Puskesmas Kerkopan	50.704.959,00	0,00
8	RSUD	7.573.834.527,09	10.278.436.299,71
4	BPMPKB	14.087.500,00	5.624.250,00
5	Dispertan	85.000,00	1.260.600,00
Jumlah		9.427.912.023,99	12.573.379.732,46

Persediaan obat pada RSUD Tidar yang termasuk obat kadaluarsa/ rusak yang belum dimusnahkan per 31 Desember 2017 di gudang Farmasi RSUD Tidar sebesar Rp32.710.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Periode Persediaan Obat	2017 (Rp)	2016 (Rp)
	Periode Tahun 2017	32.710.583,00	9.741.312,00
	Jumlah	32.710.583,00	9.741.312,00

Persediaan obat pada UPTD Farmasi yang termasuk obat kadaluarsa/rusak yang belum dimusnahkan per 31 Desember 2017 di gudang Farmasi Dinas Kesehatan sebesar Rp514.460.799,83. dengan rincian sebagai berikut :

No	Periode Persediaan Obat Kadaluarsa/Rusak	2017 (Rp)
	Januari s.d Desember 2017	128.839.267,30
	Jumlah	128.839.267,30



- f) Saldo Persediaan Bahan Kimia / Bahan Radiologi per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing Rp73.477.510,00 dan Rp108.095.505,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	DKK	65.534.000,00	44.835.000,00
2	RSUD Tidar	0,00	47.729.593,00
3	DLH	3.690.000,00	3.690.000,00
4	Dipertan	4.253.510,00	11.840.912,00
	Jumlah Bahan Kimia / Bahan Radiologi	73.477.510,00	108.095.505,00

- g) Saldo Persediaan Meterai dan Perangko per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.077.000,00 dan Rp3.304.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.069.000,00	2.002.500,00
2	DKK	150.000,00	462.000,00
3	Puskesmas Jurangombo	90.000,00	360.000,00
4	Dinas Pertanian	768.000,00	270.000,00
5	Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	210.000,00
	Jumlah Meterai dan Perangko	2.077.000,00	3.304.500,00

- h) Saldo persediaan Bahan Makanan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp171.704.170,00 dan Rp23.116.170,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	RSUD	171.704.170,00	23.116.170,00
	Jumlah Bahan Makanan	171.704.170,00	23.116.170,00

- i) Saldo persediaan Peralatan Rumah Tangga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.308.230,00 dan Rp225.961.560,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	2016 (Rp)	2016 (Rp)
1	DKK	0,00	4.308.230,00
	Jumlah Peralatan Rumah tangga	0,00	4.308.230,00

- j) Saldo Persediaan Bibit Tanaman dan Bibit Ternak per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp344.200.750,00 dan Rp143.263.050,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	2017 (Rp)	Saldo Awal 2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dispertan	318.955.500,00	103.779.300,00	103.779.300,00
2	DKPTK	0,00	0,00	39.483.750,00
3	DLH	25.245.250,00	39.483.750,00	0,00
	Jumlah Bibit Ternak	344.200.750,00	143.263.050,00	143.263.050,00



- k) Saldo Persediaan Pakan Ikan Ternak per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.048.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dinas Pertanian	9.048.000,00	9.963.000,00
	Jumlah Alat Kesehatan	9.048.000,00	9.963.000,00

- l) Saldo persediaan Persediaan Alat Laboratorium per 31 Desember 2017 sebesar RRp700.612.731,27 dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	2016 (Rp)	2016 (Rp)
1	RSUD Tidar	700.612.731,27	283.649.956,00
	Jumlah Alat Kesehatan	700.612.731,27	283.649.956,00

- m) Saldo Persediaan Bahan/Alat CSSD per 31 Desember 2017 Rp216.072.519,80 dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	RSUD Tidar	186.939.628,51	216.072.519,80
	Jumlah Alat Kesehatan	186.939.628,51	216.072.519,80

- n) Saldo Persediaan Alat Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.042.718.713,81 dan Rp955.445.253,81 dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	DKK	238.314.265,72	393.050.533,81
2	Puskesmas Magelang Selatan	33.917.451,00	0,00
3	Puskesmas Magelang Utara	34.597.742,40	0,00
4	Puskesmas Magelang Tengah	47.290.617,00	0,00
5	Puskesmas Jurangombo	48.344.093,00	0,00
6	Puskesmas Kerkopan	39.504.548,00	0,00
7	DPMP4KB	600.749.996,00	0,00
8	BPMPKB	0,00	562.394.720,00
	Jumlah Alat Kesehatan	1.042.718.713,12	955.445.253,81

- o) Saldo Persediaan Lain-Lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp319.555.921,00 dan Rp690.741.871,96 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1)	Dinas Pendidikan	1.180.000,00	346.502.596,96
2)	Puskesmas Magelang Utara	128.700,00	0,00
3)	Dinas Pekerjaan Umum	316.069.221,00	344.093.221,00
4)	Disperindag	2.178.000,00	0,00
5)	BP2T	0,00	146.000,00
	Jumlah Persediaan	319.555.921,00	690.741.871,96



Berikut ini penjelasan persediaan lain-lain:

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.180.000,00 terdiri dari persediaan pot tanaman, pupuk tanaman, obat serangga dan lain-lain.
2. Puskesmas Magelang Utara sebesar Rp128.700,00 merupakan persediaan karet gelang dan plastic clip untuk obat.
3. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp316.069.221,00 terdiri dari persediaan aspal dan begesting precast tribun.
4. Dinas Perindag sebesar Rp2.178.000,00 terdiri dari persediaan timah justir dan timah plombir

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang:	2017	2016
	(Rp)	(Rp)
a. Investasi Non Permanen	0,00	0,00
b. Investasi Permanen	109.334.517.241,24	89.338.735.769,75
Jumlah Investasi Jangka Panjang	109.334.517.241,24	89.338.735.769,75

1) Investasi Jangka Panjang Permanen

Berikut rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2017 dan 2016:

KETERANGAN	2016	2015
	(Rp)	(Rp)
a. PDOW Taman Kiai Langgeng	20.445.485.756,60	18.335.111.678,36
b. PD Bank Magelang	36.413.029.180,28	31.544.047.269,28
c. PDAM	24.463.410.142,98	17.924.141.257,98
d. PD Percetakan	3.825.469.219,00	2.926.101.410,25
e. PD Perbengkelan	1.940.168.461,20	1.379.753.981,70
f. BKK Magelang Utara	6.196.954.481,18	5.154.580.172,18
g. Bank Jateng	15.900.000.000,00	11.925.000.000,00
h. PRPP	150.000.000,00	150.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	109.334.517.241,24	89.338.735.769,75

Investasi permanen pada 6 (enam) Perusahaan Daerah telah dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sesuai saran BPK-RI pada saat pemeriksaan terinci di tahun 2014 karena kepemilikan lebih dari 20%.



Sedangkan pada Bank Jateng dan PT PRPP masih menggunakan metode *cost* karena kepemilikan dibawah 20 %.

Saat ini keberadaan tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya anjungan kabupaten-kota se Provinsi Jawa Tengah yang tengah digugat oleh PT Indo Permata Usahatama telah sampai pada tingkat kasasi dan berkekuatan hukum tetap serta telah dimohonkan eksekusi oleh penggugat.

Bahwa berdasarkan Diktum ke-16 putusan tingkat kasasi tersebut, intinya memerintahkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan PT PRPP untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada penggugat, tanah seluas 34 hektar dari bagian tanah seluas 45,6 hektar yang saat ini dikuasai oleh PT PRPP Jawa Tengah.

Sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut atas gugatan tanah dimaksud, saat ini Pemerintah Kota Magelang masih mengakui nilai penyertaan modal dimaksud.

Investasi Permanen pada BUMD

No	Nama BUMD	Neraca Per 31 Desember 2017			Neraca per 31 Desember 2017
		Investasi Pemkot dgn Metode Cost	Kepemilikan	Investasi Pemkot dgn Metode Ekuitas	
1	PDOW Taman Kyai Langgeng		100,00%	20.445.485.756,60	20.445.485.756,60
2	PD Bank Magelang		100,00%	36.413.029.180,28	36.413.029.180,28
3	PDAM		100,00%	24.463.410.142,98	24.463.410.142,98
4	PD Percetakan		100,00%	3.825.469.219,00	3.825.469.219,00
5	PD Perbengkelan		100,00%	1.940.168.461,20	1.940.168.461,20
6	BKK Magelang Utara		45%	5.004.798.473,07	5.004.798.473,07
7	Bank Jateng	15.900.000.000,00			15.900.000.000,00
8	PT PRPP Jawa Tengah	150.000.000,00	0,72%		150.000.000,00
	Jumlah	16.050.000.000,00		93.284.517.241,24	109.334.517.241,24

c. Aset tetap

- a. Pada tahun 2014 dalam rangka penataan aset dalam neraca Pemerintah Kota Magelang dan dalam rangka persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual sehingga hampir seluruh SKPD melakukan reklasifikasi aset sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan reklasifikasi aset berdasarkan usulan koreksi dan Berita Acara antara DPPKD dengan SKPD sehingga mempengaruhi penambahan dan pengurangan aset tetap.
- b. Aset Tetap Kota Magelang per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp3.207.158.465.378,68**. Berikut ini adalah rinciannya:

Aset Tetap	2017	2016
------------	------	------



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	(Rp)	(Rp)
Tanah	2.180.658.680.224,15	1.561.853.532.620,40
Peralatan dan Mesin	489.719.252.800,70	424.799.734.189,27
Gedung dan Bangunan	653.744.418.177,17	601.388.084.569,48
Jalan, Irigasi dan Jaringan	844.320.054.861,76	784.700.988.086,56
Aset Tetap Lainnya	27.793.539.650,19	43.811.793.704,31
Konstruksi dalam Pengerjaan	25.596.070.040,00	12.389.754.400,00
Akumulasi Penyusutan	(1.014.673.550.375,29)	(928.936.697.038,22)
Total Aset	3.207.158.465.378,68	2.500.007.190.531,80

c. Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah	2017 (Rp)	2016 (Rp)
	2.180.658.680.224,15	1.561.853.532.620,40

Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2017 sebesar **Rp2.180.658.680.224,15**. Aset Tetap Tanah tersebut bertambah dan berkurang nilainya karena koreksi BPK-RI tahun 2017 dan ditindaklanjuti di tahun 2017. Penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

TANAH		
SALDO Awal	Rp	1.561.853.532.620,40
Penambahan :		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	358.130.000,00
DPUPR		1.643.728.022.896,17
Disperkim		1.052.345.000,00
PPKD		38.886.161.000,00
DLH		66.510.650,00
Penambahan karena audit BPK:		
DPUPR		1.375.133.967.203,75
Jumlah Penambahan	Rp	3.059.225.136.749,92
Pengurangan :		
Inspektorat	Rp	24.000.000,00
DPUPR		796.580.007.600,00
Disperkim		21.448.000,00
DLH		66.510.650,00
Pengurangan karena audit BPK		
DPUPR		1.643.728.022.896,17
Jumlah Pengurangan	Rp	2.440.419.989.146,17
Saldo Akhir	Rp	2.180.658.680.224,15

✓ Pada penyajian aset tetap tanah pada DPU dan PR Kota Magelang terdapat beberapa koreksi terhadap pencatatan tanah untuk jalan. Koreksi dilakukan karena telah dilakukan inventarisasi ulang atas tanah untuk jalan yang dilakukan pada Tahun 2017. Pendataan tanah untuk jalan dimaksud telah mencakup tidak hanya berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan jalan, namun telah mencakup seluruh ruang milik jalan dan sekaligus memisahkan bagian tanah untuk jalan yang



tidak termasuk dalam kepemilikan Pemerintah Kota Magelang (kepemilikan instansi lain, seperti Balai Besar Wilayah Sungai dan PT. KAI). Disamping itu telah diinventarisasi tanah untuk ruas-ruas jalan yang semula belum dicatat dalam neraca dan Kartu Inventaris Barang (KIB).

✓ Nilai tanah untuk ruang milik jalan atas jalan yang sebelumnya telah tercatat penghitungannya menggunakan hasil kali luas tanah dengan harga per meter² nilai tanah induk (nilai lama). Adapun nilai tanah ruas milik jalan yang ditambahkan pada jalan yang telah tercatat adalah sebesar Rp. 421.994.127.034,00.

✓ Penyajian nilai tanah untuk ruang milik jalan yang baru dicatatkan sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh Walikota Magelang berdasarkan hasil perhitungan tim penaksir yang dibentuk oleh Walikota dengan dasar penghitungan hasil kali luas tanah dengan harga tanah per meter² berdasarkan Zona Nilai Tanah Tahun 2016 yang diterbitkan instansi Pertanahan. Adapun tanah untuk ruang milik jalan yang baru dicatatkan untuk sebanyak 19 ruas jalan dengan total nilai Rp. 161.019.168.570,00.

✓ Disamping itu ada koreksi pencatatan atas tanah untuk jalan dari asset tetap ke asset lain-lain oleh karena telah diketahui bahwa tanah di beberapa ruas jalan bukan merupakan asset tanah Pemerintah kota Magelang, melainkan dibawah kewenangan instansi/pihak lain yaitu Balai besar wilayah Sungai dan PT KAI (Persero). Adapun Tanah yang dipindahkan pencatatannya ke Aset lain-lain sebanyak 4 ruas jalan dengan total nilai Rp. 4.459.336.000,00

✓ Pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan aset tanah yang diperoleh dari penguasaan atas tanah Negara (tidak berasal dari belanja modal) yang sudah dimiliki baik secara fisik maupun yuridis (sertifikat) sebanyak 15 bidang dengan nilai sebesar Rp 38.862.161.000,00.

✓ Terdapat penambahan belanja modal tanah sebesar Rp1.476.985.650,00 terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp358.130.000,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.052.345.000,00 merupakan tanah untuk kawasan rusunawa dan dari Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp66.510.650,00 akan tetapi direklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan karena realisasi senilai Rp66.510.650,00 tersebut masih berupa biaya jasa konsultan.

✓ PPKD sebesar Rp 13.925.423.539,28 berupa penghapusan tanah sebesar Rp. 9.873.659.149,41 serta jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp. 4.051.764.389,87 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 032/196/112 tanggal 21 November 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Jalan Beserta Bangunan Pelengkapnnya Dari Daftar Barang Pengelola Kota Magelang. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah pindahtanggankan



ke Universitas Tidar sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/061/440 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 030/380/132 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Penyerahan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang

Berikut ini data Tanah pada SKPD tahun 2017 dan 2016.

OPD	2017 (Rp.)	2016 audited (Rp.)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84.675.870.757,48	82.994.366.757,48
Dinas Kesehatan	1.455.300.000,00	1.455.300.000,00
RSUD Tidar	18.745.800.000,00	18.745.800.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.378.976.717.203,75	800.422.757.600,00
Badan Perencanaan pembangunan Daerah	0,00	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.071.897.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	25.251.000.000,00	25.515.555.674,52
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	264.555.674,52	0,00
Dinas Kebersihan Pertamanan & T. kota	0,00	18.325.745.483,00
Kantor Lingkungan Hidup	0,00	1.041.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	18.325.745.483,00	0,00
Dinas Kependudukan & Capil	4.327.499.000,00	4.327.499.000,00
Dinas Tenaga Kerja	823.000.000,00	823.000.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00
Dinas Perindustrian & Perdagangan	27.026.900.000,00	5.775.000.000,00
Kantor Penanaman Modal	0,00	0,00
DPMPSTP	0,00	0,00
Dinas Pemuda, Olah Raga,Pariwisata	4.859.840.000,00	6.183.214.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas	588.900.000,00	588.900.000,00
DPRD & Sekretariat DPRD	538.850.000,00	538.850.000,00
Sekretariat Daerah	3.987.150.000,00	208.491.275.965,40
Badan Penelitian dan Pengembangan	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00
Kantor Kec. Magelang Utara	479.194.500,00	479.194.500,00
Kantor Kec. Magelang Selatan	776.618.000,00	776.618.000,00
Kantor Kec. Magelang Tengah	636.027.000,00	636.027.000,00
Kelurahan Rejowinangun Selatan	151.656.000,00	151.656.000,00
Kelurahan Magersari	435.750.000,00	435.750.000,00
Kelurahan Jurangombo Utara	2.414.486.962,00	2.414.486.962,00
Kelurahan Jurangombo Selatan	1.109.943.805,00	1.109.943.805,00
Kelurahan Tidar Utara	7.417.142.000,00	7.417.142.000,00
Kelurahan Tidar Selatan	2.102.769.300,00	2.102.769.300,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

OPD	2017 (Rp.)	2016 audited (Rp.)
Kelurahan Wates	2.245.675.000,00	2.245.675.000,00
Kelurahan Potrobangsari	2.641.017.500,00	2.641.017.500,00
Kelurahan Kedungsari	3.427.230.000,00	3.427.230.000,00
Kelurahan Kramat Utara	252.635.475,00	252.635.475,00
Kelurahan Kramat Selatan	2.735.225.000,00	2.735.225.000,00
Kelurahan Kemirirejo	2.195.974.288,00	2.195.974.288,00
Kelurahan Cacaban	1.943.750.050,00	1.943.750.050,00
Kelurahan Rejowinangun Utara	3.524.114.000,00	3.524.114.000,00
Kelurahan Magelang	339.480.000,00	339.480.000,00
Kelurahan Panjang	1.034.821.000,00	1.034.821.000,00
Kelurahan Gelangan	1.657.888.260,00	1.657.888.260,00
Inspektorat	0,00	24.000.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00
Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	21.251.900.000,00
PPKD	240.018.286.965,40	0,00
DPMP4KB	2.387.400.000,00	738.900.000,00
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	1.723.500.000,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	325.964.070.000,00	325.964.070.000,00
JUMLAH TANAH	2.180.658.680.224,15	1.561.853.532.620,40

2) Peralatan dan Mesin	2017 (Rp)	2016(Rp)
	489.719.252.800,70	424.799.734.189,27

Peralatan dan mesin Pemerintah Kota Magelang sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp489.719.252.800,70 yang meliputi alat-alat berat, alat angkutan, alat-alat bengkel/ukur, alat-alat pertanian, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium dan alat keamanan.

Penambahan dan pengurangan asset tetap Peralatan dan Mesin tersebut dapat dirinci sebagai berikut

PERALATAN DAN MESIN		
Saldo Awal 2017	Rp	424.799.734.189,27
Penambahan :		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	8.835.775.417,00
DKK		6.529.059.422,00
RSU Tidar		53.130.266.653,53



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

DPUPR	3.172.808.650,00
Disperkim	771.144.300,00
Satpol PP	1.660.042.288,89
Badan Kesbangpolinmas	86.185.000,00
Dinas Sosial	550.829.000,00
Disnaker	146.372.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.339.592.043,00
Disdukcapil	857.069.480,00
DPMP4KB	365.961.000,00
Dishub	902.909.500,00
Diskominsta	3.401.165.820,00
DPMP4KB	452.795.564,00
Disporapar	237.716.400,00
Dinas Perpus	316.038.400,00
Disperpa	468.261.850,00
Disperindag	722.120.940,00
Sekretariat Daerah	6.865.242.323,00
DPRD & Sekretariat DPRD	2.109.877.600,00
Kec. Magelang Selatan	83.181.555,00
Kel. Jurangombo Selatan	201.965.700,00
Kel. Jurangombo Utara	100.416.750,00
Kel. Magersari	176.978.000,00
Kel. Rejo Selatan	77.730.000,00
Kel. Tidar Selatan	86.105.000,00
Kel. Tidar Utara	200.616.840,00
Kec. Magelang Tengah	131.272.200,00
Kel. Cacaban	128.177.164,00
Kel. Gelangan	85.215.000,00
Kel. Kemirirejo	125.798.900,00
Kel. Magelang	214.838.700,00
Kel. Panjang	228.142.400,00
Kel. Rejo Utara	239.578.570,00
Kec. Magelang Utara	47.095.000,00
Kel. Kedungsari	150.198.000,00
Kel. Kramat Selatan	115.100.000,00
Kel. Kramat Utara	188.211.000,00
Kel. Potrobangsari	79.251.350,00
Kel. Wates	93.845.000,00
Inspektorat	430.481.200,00
BAPPEDA	647.862.000,00
BPKAD	1.699.871.975,00
PPKD	1.161.742.500,00
BKPP	573.787.303,00
Badan Litbang	771.347.500,00
Penambahan karena audit BPK :	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	723.607.200,00
DKK	377.446.905,00
RSU Tidar	25.570.000,00
Disperkim	12.798.600,00
Disnaker	200.000,00
DPMP4KB	0,33
Diskominsta	5.050.000,00
Disperindag	631.166.500,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Setda		4.557.500,00
BPKAD		5.600.000,00
PPKD		933.014.200,00
	Jumlah Penambahan	Rp 104.679.054.663,75
Pengurangan :		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	877.504.322,00
DKK		2.434.059.171,00
RSU Tidar		11.485.296.217,00
DPUPR		285.992.967,25
Disperkim		1.400.000,00
Satpol PP		547.438.495,67
Dinas Sosial		9.160.000,00
Disnaker		83.044.450,00
Dinas Lingkungan Hidup		464.549.100,00
Disdukcapil		55.273.474,00
DPMP4KB		141.325.000,00
Dishub		319.703.500,00
Diskominsta		277.914.900,00
DPMPPTSP		172.828.200,00
Disporapar		14.585.000,00
Dinas Perpus		85.173.500,00
Disperpa		100.804.800,00
Disperindag		364.180.750,00
Sekretariat Daerah		3.707.394.898,00
DPRD & Sekretariat DPRD		430.811.000,00
Kec. Magelang Selatan		15.553.500,00
Kel. Jurangombo Selatan		21.927.719,00
Kel. Rejo Selatan		1.035.000,00
Kel. Tidar Selatan		25.365.000,00
Kel. Tidar Utara		9.900.000,00
Kel. Cacaban		15.505.474,00
Kel. Gelangan		450.000,00
Kel. Kemirirejo		16.434.000,00
Kel. Magelang		16.732.000,00
Kel. Panjang		55.563.000,00
Kel. Rejo Utara		9.325.000,00
Kec. Magelang Utara		22.930.000,00
Kel. Kedungsari		15.099.000,00
Kel. Kramat Selatan		14.800.000,00
Kel. Kramat Utara		76.350.000,00
Kel. Potrobangsari		45.190.975,00
Kel. Wates		24.745.000,00
Inspektorat		311.757.970,00
BAPPEDA		145.515.000,00
BPKAD		1.060.535.050,00
PPKD		47.921.400,00
BKPP		55.861.500,00
Badan Litbang		71.188.000,00
Pengurangan karena audit BPK:		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		14.159.478.909,07
RSU Tidar		26.591.810,00
Disperkim		37.253.600,00
Satpol PP		6.765.700,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Disnaker		200.000,00
Diskominsta		5.050.000,00
Disperdan		0,33
Disperindag		631.166.500,00
Setda		2.323.500,00
Kelurahan Magersari		13.080.000,00
Kelurahan Rejowinangun Utara		887.500,00
BPKAD		5.600.000,00
PPKD		933.014.200,00
Jumlah Pengurangan	Rp	39.759.536.052,32
Saldo Akhir 2017	Rp	489.719.252.800,70

Berikut ini rincian Peralatan dan Mesin per SKPD :

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	53.855.017.140,00	59.232.592.654,00
2	Dinas Kesehatan	36.378.832.493,00	31.906.385.337,00
3	RSUD Tidar	208.250.398.393,53	166.606.449.767,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	10.924.050.785,41	15.247.387.961,20
5	Badan Perencanaan pembangunan Daerah	3.396.788.829,66	2.919.964.829,66
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.206.913.554,25	0,00
7	Dinas Perhubungan	7.958.127.353,00	16.163.718.220,33
8	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	12.636.690.351,33	0,00
9	Dinas Kebersihan Pertamanan & T. kota	0,00	21.114.619.287,00
10	Kantor Lingkungan Hidup	0,00	3.252.509.175,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	25.489.151.960,00	0,00
12	Dinas Kependudukan & Cakil	3.833.952.037,00	3.032.156.031,00
13	Dinas Tenaga Kerja	3.240.227.295,00	3.564.032.600,00
14	Dinas Sosial	1.137.995.097,00	0,00
15	Dinas Perindustrian & Perdagangan	11.622.396.415,00	4.359.622.116,00
16	Kantor Penanaman Modal	0,00	851.782.772,00
17	DPMPPTSP	2.911.818.364,00	0,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.321.035.573,00	2.197.983.273,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	9.772.320.992,52	1.620.903.450,00
20	Badan Kesatuan Bangsa Politik & Linmas	1.521.268.821,00	1.653.096.721,00
21	DPRD & Sekretariat DPRD	13.157.812.997,00	11.478.746.397,00
22	Sekretariat Daerah	25.227.124.600,50	31.633.625.525,50
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.656.775.151,00	968.748.651,00
24	Kantor Kec. Magelang Utara	942.333.964,00	918.168.964,00
25	Kantor Kec. Magelang Selatan	1.321.108.715,00	1.253.480.660,00
26	Kantor Kec. Magelang Tengah	1.052.300.102,00	921.027.902,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
27	Kelurahan Rejowinangun Selatan	573.106.368,00	496.411.368,00
28	Kelurahan Magersari	777.396.913,00	613.498.913,00
29	Kelurahan Jurangombo Utara	700.106.903,00	599.690.153,00
30	Kelurahan Jurangombo Selatan	759.723.784,00	579.685.803,00
31	Kelurahan Tidar Utara	604.198.994,00	413.482.154,00
32	Kelurahan Tidar Selatan	733.605.465,00	672.865.465,00
33	Kelurahan Wates	451.776.013,00	382.676.013,00
34	Kelurahan Potrobangsari	715.958.728,00	681.898.353,00
35	Kelurahan Kedungsari	627.745.438,00	492.646.438,00
36	Kelurahan Kramat Utara	757.549.028,00	645.688.028,00
37	Kelurahan Kramat Selatan	530.440.853,00	430.140.853,00
38	Kelurahan Kemirirejo	637.090.945,00	527.726.045,00
39	Kelurahan Cacaban	615.970.731,00	503.299.041,00
40	Kelurahan Rejowinangun Utara	721.201.083,00	491.835.013,00
41	Kelurahan Magelang	700.384.808,00	502.278.108,00
42	Kelurahan Panjang	665.896.821,00	493.317.421,00
43	Kelurahan Gelangan	572.430.663,00	487.665.663,00
44	Inspektorat	1.765.075.458,00	1.646.352.228,00
45	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	2.628.062.521,50	2.110.136.718,50
46	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	0,00	1.989.260.970,00
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.174.638.382,00	6.254.560.192,00
48	Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	7.205.329.609,00
49	PPKD	8.825.037.446,00	0,00
50	DPMP4KB	4.750.338.215,33	4.518.160.632,00
51	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	4.743.828.720,00	3.677.598.145,00
52	Dinas Pertanian dan Pangan	7.873.193.535,67	7.486.528.569,00
	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	489.719.252.800,70	424.799.734.189,27

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin antara lain berasal dari Belanja Modal sebesar Rp82.151.639.808,00, kemudian terdapat reklas dari peralatan dan mesin intracomptable ke extracomptable dan dari peralatan mesin intracomptable ke aset lain-lain intracomptable.

Terdapat Penghapusan peralatan mesin berupa alat angkut sebesar Rp.444283.510,00 karena sudah dipindahtangankan/dijual sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 032/202/112 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan dinas Dari Daftar Barang Pengguna Barang Sekretariat Daerah Kota Magelang.



3) Gedung dan Bangunan	<u>2017 (Rp)</u>	<u>2016 (Rp)</u>
	653.744.418.177,17	601.388.084.569,48

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Magelang sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp653.744.418.177,17 yang berupa gedung dan bangunan.

Berikut ini tabel penambahan dan pengurangan Bangunan dan Gedung

BANGUNAN GEDUNG	
Saldo Awal	Rp 601.388.084.569,48
Penambahan	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.772.953.886,00
DKK	7.021.267.900,00
RSU Tidar	12.900.406.688,27
DPUPR	25.135.599.750,00
Disperkim	1.676.445.890,00
Satpol PP	806.484.225,00
Badan Kesbangpolinmas	155.489.000,00
Dinas Sosial	18.583.950,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.552.958.000,00
Disdukcapil	77.756.061,00
DPMP4KB	381.782.000,00
Dishub	7.689.831.400,00
Diskominsta	6.781.500,00
DPMPPTSP	193.382.363,00
Disporapar	189.800.000,00
Dinas Perpustakaan	19.436.806.170,00
Disperpa	1.739.212.400,00
Disperindag	5.937.907.917,43
Sekretariat Daerah	20.951.256.312,05
DPRD & Sekretariat DPRD	1.409.588.500,00
Kec. Magelang Selatan	42.843.000,00
Kel. Jurangombo Selatan	159.814.900,00
Kel. Jurangombo Utara	458.240.005,00
Kel. Magersari	196.466.000,00
Kel. Rejo Selatan	250.821.000,00
Kel. Tidar Selatan	73.792.500,00
Kel. Tidar Utara	906.329.550,00
Kec. Magelang Tengah	4.480.113.000,00
Kel .Cacaban	573.797.000,00
Kel .Gelangan	144.208.000,00
Kel. Kemirirejo	117.544.500,00
Kel. Magelang	302.041.575,00
Kel .Panjang	92.311.000,00
Kel .Rejo Utara	1.059.597.500,00
Kec. Magelang Utara	529.865.000,00
Kel .Kedungsari	79.801.300,00
Kel .Kramat Selatan	855.423.871,00
Kel. Kramat Utara	1.568.526.500,00
Kel. Potrobangsari	158.701.000,00
Kel .Wates	253.555.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

BAPPEDA	129.883.000,00
BPKAD	456.504.450,00
PPKD	410.046.000,00
Badan Litbang	39.699.000,00
Penambahan karena audit BPK:	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.159.572.410,00
DKK	4.533.724.136,00
Dinas Perhubungan	1.803.401.350,00
Disperindag	217.562.500,00
Setda	123.831.845,05
Kelurahan Kramat Selatan	420.660.000,00
PPKD	225.000.000,00
Jumlah Penambahan	138.877.970.804,80

Pengurangan	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.982.916.122,00
DKK	507.339.301,00
RSU Tidar	43.686.000,00
DPUPR	42.119.588.696,00
Satpol PP	411.579.225,00
Dinas Sosial	24.745.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	322.884.850,00
Disdukcapil	22.162.459,03
DPMP4KB	190.891.000,00
Dishub	2.176.139.039,50
Diskominsta	6.781.500,00
DPMP4KB	8.950.000,00
Dinas Perpus	1.514.600.000,00
Disperpa	277.519.550,00
Disperindag	1.295.884.279,43
Sekretariat Daerah	12.274.470.599,05
DPRD & Sekretariat DPRD	90.887.731,00
Kec. Magelang Selatan	24.888.000,00
Kel. Jurangombo Utara	17.599.000,00
Kel. Tidar Utara	64.193.000,00
Kec. Magelang Tengah	1.126.228.400,00
Kel. Gelangan	72.104.000,00
Kel. Magelang	39.815.425,00
Kel. Panjang	6.793.000,00
Kel. Rejo Utara	97.510.000,00
Kec. Magelang Utara	196.295.000,00
Kel. Kedungsari	11.565.765,00
Kel. Kramat Utara	85.175.000,00
Kel. Potrobangsari	38.639.000,00
Inspektorat	95.046.000,00
BPKAD	66.962.750,00
PPKD	186.610.900,00
Pengurangan karena audit BPK	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.979.645.946,00
DKK	5.447.342.150,00
Dishub	2.394.955.950,00
Disperindag	1.161.162.500,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Setda	228.931.345,10
Kel. Kramat Selatan	6.859.264,00
PPKD	2.902.289.450,00
Jumlah Pengurangan	86.521.637.197,11
JUMLAH BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2017	Rp 653.744.418.177,17

Penambahan Gedung dan Bangunan antara lain berasal dari Belanja Modal sebesar Rp91.263.642.710,00 selain itu merupakan asset bangunan gedung yang dimutasi antar SKPD.

Berikut ini rincian Gedung dan Bangunan per SKPD :

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 Audited (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	133.201.330.050,90	138.784.556.072,90
2	Dinas Kesehatan	32.089.663.278,14	26.489.352.693,14
3	RSUD Tidar	53.502.041.631,30	40.645.320.943,03
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	139.000.216.025,00	158.343.953.921,00
5	Badan Perencanaan pembangunan Daerah	2.244.403.900,00	2.114.520.900,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.565.407.040,00	0,00
7	Dinas Perhubungan	16.701.935.705,50	12.434.365.010,00
8	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	654.567.065,00	0,00
9	Dinas Kebersihan Pertamanan & T. kota	0,00	11.173.342.450,00
10	Kantor Lingkungan Hidup	0,00	1.920.525.250,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	18.898.225.100,00	0,00
12	Dinas Kependudukan & Capil	2.289.649.231,97	2.234.055.630,00
13	Dinas Tenaga Kerja	5.376.178.000,00	5.543.415.000,00
14	Dinas Sosial	252.402.330,00	0,00
15	Dinas Perindustrian & Perdagangan	92.981.708.516,31	8.999.901.955,00
16	Kantor Penanaman Modal	0,00	91.326.380,00
17	DPMPSTP	1.161.543.313,00	0,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata	5.084.463.120,00	5.341.472.870,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	3.550.477.300,00	42.553.000,00
20	Badan Kesatuan Bangsa Politik & Linmas	725.804.682,86	570.315.682,86
21	DPRD & Sekretariat DPRD	7.650.844.855,00	6.332.144.086,00
22	Sekretariat Daerah	34.435.114.535,00	50.852.657.004,05
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.478.762.000,00	1.439.063.000,00
24	Kec. Magelang Utara	1.827.658.200,00	1.494.088.200,00
25	Kec. Magelang Selatan	2.567.767.850,00	2.549.812.850,00
26	Kec. Magelang Tengah	3.961.299.500,00	607.414.900,00
27	Kelurahan Rejowinangun Selatan	854.486.250,00	603.665.250,00
28	Kelurahan Magersari	1.297.425.150,00	1.100.959.150,00
29	Kelurahan Jurangombo Utara	1.794.672.905,00	1.354.031.900,00
30	Kelurahan Jurangombo Selatan	1.180.431.750,00	1.020.616.850,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 Audited (Rp)
31	Kelurahan Tidar Utara	1.236.544.300,00	394.407.750,00
32	Kelurahan Tidar Selatan	2.373.963.550,00	2.300.171.050,00
33	Kelurahan Wates	1.243.704.275,00	990.149.275,00
34	Kelurahan Potrobangsari	1.214.744.200,00	1.094.682.200,00
35	Kelurahan Kedungsari	764.799.317,00	696.563.782,00
36	Kelurahan Kramat Utara	1.551.046.100,00	67.694.600,00
37	Kelurahan Kramat Selatan	2.453.554.607,00	1.184.330.000,00
38	Kelurahan Kemirirejo	788.351.912,00	670.807.412,00
39	Kelurahan Cacaban	872.607.500,00	298.810.500,00
40	Kelurahan Rejowinangun Utara	2.007.528.500,00	1.045.441.000,00
41	Kelurahan Magelang	1.182.341.750,00	920.115.600,00
42	Kelurahan Panjang	1.039.606.300,00	954.088.300,00
43	Kelurahan Gelangan	712.002.000,00	639.898.000,00
44	Inspektorat	0,00	95.046.000,00
45	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00
46	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	0,00	977.110.950,00
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.353.270.399,00	2.903.728.699,00
48	Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	81.499.898.673,31
49	PPKD	19.070.379.332,00	0,00
50	DPMP4KB	5.294.763.877,00	2.017.017.877,00
51	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	19.020.072.670,00	779.726.500,00
52	Dinas Pertanian Pangan	21.236.658.303,19	19.774.965.453,19
	JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN	653.744.418.177,17	601.388.084.569,48

- 1) Penghapusan gedung dan bangunan sebesar Rp.1.936.836.407,05 serta jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.91.748.300,00 sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang Nomor 028/619/440 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan Rumah Jabatan Walikota Magelang Dari Daftar Barang Pengguna Pada Sekretariat Daerah Kota Magelang. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah dibongkar dan material hasil bongkarannya telah dijual dan dimusnahkan
 - a. Kecamatan Magelang Tengah sebesar Rp 747.628.580,00 yang terdiri dari:
 - 1) Penghapusan gedung dan bangunan sebesar Rp.97.510.000,00 sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang Nomor 028/620/440 tanggal 20 Desember 2017 tentang



- Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Kantor Kelurahan, Aula dan Ruang Pelayanan Perusahaan Listrik Negara Kelurahan Rejowinangun Utara Dari Daftar Barang Pengguna Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah dibongkar dan material hasil bongkarannya telah dijual dan dimusnahkan.
- 2) Penghapusan gedung dan bangunan sebesar Rp. 607.414.900,00 serta jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 42.703.680,00 sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang Nomor 028/595/440 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Serta Jalan Irigasi dan Jaringan Kecamatan Magelang Tengah Dari Daftar Barang Pengguna Barang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah dibongkar dan material hasil bongkarannya telah dijual dan dimusnahkan.
- b. Sekretariat DPRD sebesar Rp.90.887.731,00 berupa penghapusan gedung dan bangunan sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang Nomor 028/596/440 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Garasi Dari Daftar Barang Pengguna Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah dibongkar sebagian dan material hasil bongkarannya telah dijual dan dimusnahkan.
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.158.732.225,00 berupa penghapusan gedung dan bangunan sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang Nomor 028/594/440 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Los dan Kios Pasar Cacaban pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah dibongkar sebagian dan material hasil bongkarannya telah dijual dan dimusnahkan.



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	2017 (Rp)	2016 (Rp)
---------------------------------------	-----------	-----------

	844.320.054.861,76	784.700.988.086,56
--	--------------------	--------------------

Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Magelang sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp844.320.054.861,76. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar Rp784.700.988.086,56 terdapat penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Saldo Awal 2017	Rp	784.700.988.086,56
Penambahan Tahun 2017		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	16.180.500,00
DKK		13.944.000,00
RSU Tidar		3.196.003.928,20
DPUPR		34.503.720.449,00
Disperkim		16.633.606.056,00
Dinas Lingkungan Hidup		4.490.361.350,00
Disdukcapil		41.737.113,00
Dinas Perpus		1.119.400.000,00
Disperpa		60.990.200,00
Disperindag		30.562.750,00
Sekretariat Daerah		249.943.850,00
Kel. Jurangombo Utara		2.000.000,00
Kel. Kemirirejo		26.184.400,00
Kel. Kedungsari		117.836.000,00
PPKD		225.032.000,00
Penambahan karena audit BPK:		
DKK		535.571.109,00
Dishub		591.554.600,00
Disperindag		77.881.000,00
PPKD		2.739.838.500,00
Jumlah Penambahan Th.2017	Rp	64.672.347.805,20
Pengurangan Tahun 2017		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		11.720.000,00
RSU Tidar		342.000.000,00
DPUPR		1.377.959.800,00
Disperkim		58.985.000,00
Disdukcapil		665.000,00
Dishub		39.599.000,00
Sekretariat Daerah		323.992.150,00
Kec. Magelang Tengah		42.703.680,00
Kel. Kemirirejo		9.599.700,00
Pengurangan karena audit BPK:		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		15.545.000,00
Disperindag		77.881.000,00
Sekretariat Daerah		12.792.200,00
PPKD		2.739.838.500,00
Jumlah Pengurangan Tahun 2017		5.053.281.030
Saldo Akhir 2017	Rp	844.320.054.861,76



Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan antara lain berasal dari belanja modal sebesar Rp53.058.480.005,00.

Terdapat penghapusan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp.471.802.244,00 serta aset tetap lainnya sebesar Rp.1.964.425.202,00 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 030/90/112 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penghapusan barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas Pendidikan Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2017. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah diserahkan ke Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.137/396/113 Tahun 2016 tentang Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Kota Magelang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

PPKD terdapat penghapusan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp. 4.051.764.389,87 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 032/196/112 tanggal 21 November 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Jalan Beserta Bangunan Pelengkapannya Dari Daftar Barang Pengelola Kota Magelang. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah pindahtangankan ke Universitas Tidar sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/061/440 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 030/380/132 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Penyerahan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.

Berikut ini rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD :

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 Audited (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.385.650.558,00	1.392.326.808,00
2	Dinas Kesehatan	4.477.893.752,00	3.928.378.643,00
3	RSUD Tidar	10.093.295.735,10	7.239.291.806,90
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	646.426.282.174,46	715.758.980.852,39
5	Badan Perencanaan pembangunan Daerah	5.842.860,00	5.842.860,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	119.214.225.540,93	0,00
7	Dinas Perhubungan	623.626.040,00	73.670.440,00
8	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	31.100.000,00	0,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 Audited (Rp)
9	Dinas Kebersihan Pertamanan & T. kota	0,00	26.178.287.652,00
10	Kantor Lingkungan Hidup	0,00	916.270.191,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	31.397.874.035,00	0,00
12	Dinas Kependudukan & Capil	358.271.624,00	317.199.511,00
13	Dinas Tenaga Kerja	30.508.170,00	75.808.170,00
14	Dinas Sosial	45.300.000,00	0,00
15	Dinas Perindustrian & Perdagangan	5.744.308.440,27	46.106.042,00
16	Kantor Penanaman Modal	0,00	0,00
17	DPMPSTP	49.707.000,00	0,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata	56.218.474,00	60.626.724,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	12.400.000,00	0,00
20	Badan Kesatuan Bangsa Politik & Linmas	21.063.255,00	21.063.255,00
21	DPRD & Sekretariat DPRD	0,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	1.816.084.105,00	2.437.429.297,00
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	54.838.127,00	54.838.127,00
24	Kantor Kec. Magelang Utara	16.051.290,00	16.051.290,00
25	Kantor Kec. Magelang Selatan	14.764.290,00	14.764.290,00
26	Kantor Kec. Magelang Tengah	599.149.000,00	641.852.680,00
27	Kelurahan Rejowinangun Selatan	668.407.400,00	668.407.400,00
28	Kelurahan Magersari	578.384.330,00	578.384.330,00
29	Kelurahan Jurangombo Utara	575.043.600,00	573.043.600,00
30	Kelurahan Jurangombo Selatan	879.197.090,00	879.197.090,00
31	Kelurahan Tidar Utara	1.324.826.580,00	1.324.826.580,00
32	Kelurahan Tidar Selatan	521.667.161,00	521.667.161,00
33	Kelurahan Wates	1.197.049.250,00	1.197.049.250,00
34	Kelurahan Potrobangsari	1.143.453.500,00	1.143.453.500,00
35	Kelurahan Kedungsari	1.627.945.722,00	1.510.109.722,00
36	Kelurahan Kramat Utara	574.685.100,00	574.685.100,00
37	Kelurahan Kramat Selatan	614.994.000,00	614.994.000,00
38	Kelurahan Kemirirejo	770.642.560,00	754.057.860,00
39	Kelurahan Cacaban	885.069.600,00	885.069.600,00
40	Kelurahan Rejowinangun Utara	1.553.079.350,00	1.553.079.350,00
41	Kelurahan Magelang	692.914.475,00	692.914.475,00
42	Kelurahan Panjang	830.480.230,00	830.480.230,00
43	Kelurahan Gelangan	518.236.360,00	518.236.360,00
44	Inspektorat	0,00	0,00
45	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00
46	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	0,00	49.707.000,00
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	352.049.775,00	343.464.445,00
48	Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	5.674.139.648,27



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 Audited (Rp)
49	PPKD	497.134.546,00	0,00
50	DPMP4KB	15.728.600,00	15.728.600,00
51	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	1.359.066.816,00	14.950.000,00
52	Dinas Pertanian dan Pangan	4.665.544.346,00	4.604.554.146,00
	JUMLAH JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	844.320.054.861,76	784.700.988.086,56

5) Aset Tetap Lainnya	2017 (Rp)	2016 (Rp)
	27.793.539.650,19	43.811.793.704,31

Aset tetap lainnya Pemerintah Kota Magelang sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp27.793.539.650,19 yang meliputi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga, hewan, ikan, tanaman. Apabila dibandingkan dengan Aset tetap lainnya pada tahun 2016 sebesar Rp43.811.793.704,31 terdapat penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

ASET TETAP LAINNYA

Saldo Awal Tahun 2017	Rp	43.811.793.704,31
Penambahan tahun 2017		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	2.290.023.533,00
DKK		36.692.800,00
Puskesmas Magelang Selatan		7.979.700,00
Puskesmas Jurangombo		7.979.700,00
Puskesmas Magelang Utara		7.979.700,00
Puskesmas Kerkopan		7.979.700,00
RSU Tidar		138.180.000,00
DPUPR		1.848.000,00
Satpol PP		1.375.000,00
Badan Kesbangpolinmas		2.296.000,00
Disnaker		1.600.000,00
Dinas Lingkungan Hidup		559.727.300,00
DPMP4KB		700.000,00
Dishub		3.444.000,00
DPMPTSP		9.681.000,00
Disporapar		31.196.000,00
Dinas Perpus		89.442.500,00
Disperpa		6.680.000,00
Disperindag		5.600.000,00
Sekretariat Daerah		21.382.900,00
DPRD & Sekretariat DPRD		15.790.000,00
Kec. Magelang Selatan		4.200.000,00
Kel. Jurangombo Selatan		4.400.000,00
Kel. Jurangombo Utara		1.400.000,00
Kel. Magersari		4.200.000,00
Kel. Rejo Selatan		1.400.000,00
Kel. Tidar Selatan		4.800.000,00
Kel. Tidar Utara		2.100.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Kel. Magelang		1.400.000,00
Kel. Cacaban		12.700.000,00
Kel. Kemirirejo		5.040.000,00
Kel. Rejo Utara		1.489.600,00
Kec. Magelang Utara		2.800.000,00
Kel. Kedungsari		700.000,00
Kel. Kramat Selatan		2.100.000,00
Kel. Kramat Utara		4.800.000,00
Kel. Potrobangsari		2.100.000,00
Kel. Wates		2.100.000,00
Inspektorat		10.369.600,00
BPKAD		9.540.000,00
BKPP		1.716.300,00
BALITBANG		2.770.000,00
KOREKSI BPK		
Dinas Pendidikan		475.000,00
Kel. Wates		1.311.324,88
Jumlah Penambahan Tahun 2017	Rp	3.331.489.657,88
Pengurangan		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	17.529.487.920,64
DPMPSTP		8.367.200,00
Dinas Kesehatan		31.918.800,00
Puskesmas		
Puskesmas Magelang Selatan		7.979.700,00
Puskesmas Jurangombo		7.979.700,00
Puskesmas Magelang Utara		7.979.700,00
Puskesmas Kerkopan		7.979.700,00
Dinas Lingkungan Hidup		226.619.100,00
Dinas Perpus		81.851.350,00
Sekretariat Daerah		758.900,00
Kel. Jurangombo Selatan		2.192.000,00
Kel. Tidar Selatan		2.000.000,00
Kel. Kemirirejo		2.443.500,00
Kel. Rejo Utara		889.600,00
Kel. Kramat Utara		1.564.000,00
Inspektorat		6.154.600,00
BPKAD		1.580.000,00
BKPP		1.356.300,00
BALITBANG		566.000,00
KOREKSI BPK		
Dinas Pendidikan		1.419.756.641,36
Dinas Tenaga Kerja		200.000,00
Setda		119.000,00
Jumlah Pengurangan Tahun 2017	Rp	19.349.743.712,00
Total Aset Tetap lainnya tahun 2017	Rp	27.793.539.650,19



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Berikut ini rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD :

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.187.288.394,33	27.840.784.423,33
2	Dinas Kesehatan	13.691.500,00	8.917.500,00
3	RSUD Tidar	339.635.100,00	201.455.100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.842.315.203,82	2.917.685.703,82
5	Badan Perencanaan pembangunan Daerah	8.124.550,00	8.124.550,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	78.689.688,00	0,00
7	Dinas Perhubungan	29.723.000,00	60.579.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	34.300.000,00	0,00
9	Dinas Kebersihan Pertamanan & T. kota	0,00	11.450.707.110,00
10	Kantor Lingkungan Hidup	0,00	16.429.619,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	11.798.773.741,00	0,00
12	Dinas Kependudukan & Capil	480.000,00	480.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja	2.748.000,00	1.348.000,00
14	Dinas Sosial	0,00	0,00
15	Dinas Perindustrian & Perdagangan	50.575.294,00	41.965.294,00
16	Kantor Penanaman Modal	0,00	6.575.400,00
17	DPMPSTP	8.449.200,00	0,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata	62.583.500,00	36.637.500,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	1.375.000,00	0,00
20	Badan Kesatuan Bangsa Politik & Linmas	2.296.000,00	0,00
21	DPRD & Sekretariat DPRD	89.386.600,00	73.596.600,00
22	Sekretariat Daerah	415.243.700,00	395.763.700,00
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	6.261.400,00	4.057.400,00
24	Kantor Kec. Magelang Utara	3.050.000,00	250.000,00
25	Kantor Kec. Magelang Selatan	4.350.000,00	150.000,00
26	Kantor Kec. Magelang Tengah	3.300.000,00	3.300.000,00
27	Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.545.000,00	145.000,00
28	Kelurahan Magersari	7.363.850,00	3.050.000,00
29	Kelurahan Jurangombo Utara	13.796.800,00	12.510.650,00
30	Kelurahan Jurangombo Selatan	2.358.000,00	150.000,00
31	Kelurahan Tidar Utara	2.432.500,00	332.500,00
32	Kelurahan Tidar Selatan	3.423.000,00	623.000,00
33	Kelurahan Wates	136.521.324,88	133.110.000,00
34	Kelurahan Potrobangsari	10.178.791,00	8.078.791,00
35	Kelurahan Kedungsari	700.000,00	0,00
36	Kelurahan Kramat Utara	10.761.000,00	7.525.000,00
37	Kelurahan Kramat Selatan	2.310.212,00	210.212,00
38	Kelurahan Kemirirejo	3.167.050,00	570.550,00
39	Kelurahan Cacaban	84.776.883,00	72.076.883,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp.)
40	Kelurahan Rejowinangun Utara	740.000,00	140.000,00
41	Kelurahan Magelang	1.400.000,00	0,00
42	Kelurahan Panjang	111.325,00	111.325,00
43	Kelurahan Gelangan	3.126.207,16	3.126.207,16
44	Inspektorat	14.630.500,00	10.415.500,00
45	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	12.107.625,00	11.747.625,00
46	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	0,00	560.000,00
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	56.305.000,00	47.320.000,00
48	Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	3.010.000,00
49	PPKD	0,00	0,00
50	DPMP4KB	1.613.000,00	913.000,00
51	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	325.282.541,00	317.691.391,00
52	Dinas Pertanian dan Pangan	116.249.170,00	109.569.170,00
	JUMLAH ASET TETAP LAINNYA	27.793.539.650,19	43.811.793.704,31

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat penghapusan aset tetap lainnya sebesar Rp.1.964.425.202,00 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 030/90/112 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penghapusan barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas Pendidikan Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2017. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah diserahkan ke Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.137/396/113 Tahun 2016 tentang Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Kota Magelang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	<u>2017 (Rp)</u>	<u>2016 (Rp)</u>
	25.596.070.040,00	12.389.754.400,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2017 sebesar **Rp25.596.070.040,00**. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Magelang tahun 2017 terdiri dari:

KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp	1,136,249,250.00
KDP Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp	156,000,000.00
KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp	244,300,140.00
KDP Bangunan Gedung Olahraga	Rp	20,453,017,250.00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

KDP Bangunan Bersejarah Lainnya	Rp	143,313,500.00
KDP Bangunan Pos Jaga	Rp	54,192,000.00
KDP Tanah	Rp	122,491,000.00
KDP Jalan	Rp	2,031,948,550.00
KDP Jembatan	Rp	44,146,000.00
KDP Bangunan Air Kotor	Rp	729,622,500.00
KDP Gedung Pertokoan/Pasar	Rp	31,120,000.00
KDP Bangunan Rambu-Rambu	Rp	189,970,000.00
Outlineplan Prasarana Dasar TPA Banyu Urip	Rp	51,500,000.00
DED TPST	Rp	47,170,000.00
Penataan Jalur Hijau Bantaran Kalimanggis	Rp	10,726,000.00
DED Taman Jend. Sudirman	Rp	29,310,000.00
Pengadaan Tanah Appraisal	Rp	66,510,650.00
Alat Pengolah Sampah	Rp	299,700.00
Penyusunan DED Pasar Stres	Rp	50,883,500.00
Pembangunan Pasar Strs	Rp	3,300,000.00
Jumlah KDP Tahun 2017	Rp	25,596,070,040.00

Tambah kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal Tahun 2017	12.389.754.400,00
Penambahan :	
- RSUD TIDAR MAGELANG	19.348.445.300,00
- DPUPR	12.933.348.900,00
- DISPERKIM	345.126.000,00
- DLH	66.810.350,00
KOREKSI BPK	
DINAS PERKIM	47.954.140,00
SATPOL PP	32.064.450,00
DPMP4KB	52.511.000,00
Jumlah Penambahan Tahun 2017	32.826.260.140,00

Pengurangan :

- RSUD TIDAR MAGELANG	18.683.200.000,00
- DPUPR	441.279.900,00
- DISPERKIM	-
- DLH	53.703.700,00
- DPMP4KB	-
- DISHUB	-
- DINAS PERPUS	181.266.900,00
- DISPERINDAG	-
- SETDA BAG. PKP	156.000.000,00
- SETWAN	50.310.500,00



KOREKSI BPK

DISPERINDAG	54.183.500,00
Jumlah Pengurangan Tahun 207	19.619.944.500,00
Saldo Akhir Tahun 2017	25.596.070.040,00

7) Akumulasi Penyusutan	<u>2017 (Rp)</u>	<u>2016 (Rp)</u>
	1.014.673.550.375,29	928.936.697.038,22

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.1.014.673.550.375,29**. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2017

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	315.106.932.737,35	267.826.346.503,55
2	Gedung dan Bangunan	120.802.591.784,82	111.626.680.526,42
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	578.764.025.853,13	549.483.670.008,25
4	Aset tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	1.014.673.550.375,29	928.936.697.038,22

Pada akumulasi penyusutan aset tetap pada bangunan gedung terdapat penghitungan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang sudah diuraikan antara bangunan induk dan bangunan rehab.

d. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp52.147.911.848,65. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2017

No	Akun	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2017		Saldo per 31 Des 2017 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.468.000.000,00	0,00	0,00	12.468.000.000,00
2	Aset Tak Berwujud	10.631.176.588,00	1.147.343.623,00	492.005.334,00	11.286.514.877,00
3	Amortisasi	(9.447.984.658,53)	818.990.445,93	510.026.384,00	(9.756.948.720,46)
4	Aset Lain-Lain	146.596.567.716,88	43.293.988.176,68	127.093.097.367,45	62.797.458.526,11
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(40.203.443.820,45)	18.394.570.180,55	33.950.901.167,00	(24.647.112.834,00)
	Jumlah	120.044.315.825,90			52.147.911.848,65



Penghapusan Aset Lainnya Intra sebesar Rp.9.275.877.703,00 terdiri dari 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu :

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 12.469.716,00 berupa penghapusan aset laindua kendaraan bermotor yang menjadi Tuntutan Ganti Rugi sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 979.4/98/112 tanggal 4 April 2017 tentang Penetapan Pelunasan Pembebanan Ganti Rugi Atas Nama Sdr. Ismoyo sebesar Rp.5.769.716,00 dan sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 979.4/96/112 tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan Pelunasan Pembebanan Ganti Rugi Atas Nama Sdr. Muhtadi sebesar Rp.6.700.000,00.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 9.263.407.987,00 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 030/90/112 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penghapusan barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas Pendidikan Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2017. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah diserahkan ke Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.137/396/113 Tahun 2016 tentang Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Kota Magelang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1) Aset Kemitraan

Penjelasan atas kemitraan pihak ketiga sebesar Rp12.468.000.000,00 yang merupakan rekomendasi BPK tahun 2011 terdiri dari :

- a) Tanah Pasar Gotong Royong yang merupakan kerjasama kemitraan pembangunan Pasar Gotong Royong sebesar Rp4.038.750.000,00
- b) Tanah Pasar Kebonpolo yang merupakan kerjasama kontak bagi tempat usaha sebesar Rp3.669.250.000,00
- c) Tanah Pasar Rejowinangun yang merupakan kerjasama bangun guna serah sebesar Rp4.760.000.000,00

2) Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp11.286.514.877,00 terdiri dari :

Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2017

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Saldo Akhir per 31 Desember 2016 (Rp)
Aset tak berwujud	10.631.176.588,00	1.147.343.623,00	492.005.334,00	11.286.514.877,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 201

Uraian	Nilai Aset tak berwujud	Amortisasi 2017	Nilai Buku per 31 Desember 2017
Aset Tak Berwujud	11.286.514.877,00	(9.756.948.720,46)	1.529.566.156,54

Mutasi Aset Tak Berwujud selama tahun 2017

ASET TAK BERWUJUD

awal Tahun 2017 Rp 10.631.176.588,00

Penambahan

Dinas Pendidikan	20.000.000,00
Disperkim	20.244.250,00
Dinas Perhubungan	51.420.000,00
Diskominsta	100.865.000,00
DPMPPTSP	52.224.400,00
Dinas Perpustakaan	199.472.473,00
Setda Bagian Hukum	3.960.000,00
Badan Perencanaan Daerah	29.890.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	383.084.500,00
PPKD	50.225.000,00
BKPP	39.250.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	20.275.000,00

Koreksi BPK

Dinas Pendidikan	88.216.500,00
PPKD	88.216.500,00

Jumlah Penambahan Th.2017 **Rp 1.147.343.623,00**

Pengurangan

Dinas Kesehatan	68.697.070,00
Pusk. Magelang Selatan	85.479.966,00
Pusk. Magelang Tengah	65.142.266,00
Pusk. Kerkopan	65.142.266,00
Pusk. Magelang Utara	65.142.266,00
Setda Bagian PKP	3.960.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	50.225.000,00

Koreksi BPK

PPKD 88.216.500,00

Jumlah Pengurangan Th.2017 **Rp 492.005.334,00**

Jumlah Aset Tak Berwujud Th.2017 **Rp 11.286.514.877,00**

Berikut ini rincian Aset Tak Berwujud per SKPD :

	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.775.883.138,00	1.667.666.638,00
2	Dinas Kesehatan	194.044.639,00	262.741.709,00
3	Pusk Magelang Selatan	69.970.499,00	155.450.465,00
4	Pusk Jurangombo	76.934.781,00	76.934.781,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
5	Pusk Magelang Tengah	90.863.352,00	156.005.618,00
6	Pusk Kerkopan	69.970.499,00	135.112.765,00
7	Pusk Magelang Utara	97.827.638,00	162.969.904,00
8	RSUD Tidar	1.736.213.000,00	1.736.213.000,00
9	Dinas PU-PR	257.187.550,00	257.187.550,00
10	Disperkim	20.244.250,00	
11	Satpol PP	45.974.000,00	45.974.000,00
12	Badan Kesbangpol	9.340.000,00	9.340.000,00
13	DLH	300.202.700,00	300.202.700,00
14	Dinsos	12.950.000,00	12.950.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja	30.102.293,00	30.102.293,00
16	Disdukcapil	1.292.612.815,00	1.292.612.815,00
17	DPMP4KB	3.000.000,00	3.000.000,00
18	Dinas Perhubungan	166.944.000,00	115.524.000,00
19	Diskominfo	1.173.806.850,00	1.072.941.850,00
20	DPMPPTSP	195.978.200,00	143.753.800,00
21	Dinas Perpustakaan	568.777.473,00	369.305.000,00
22	Dinas Pertanian	65.221.750,00	65.221.750,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.427.800,00	49.427.800,00
24	Setda Bagian Tapem	80.000.000,00	80.000.000,00
25	Setda Bagian Organisasi	-	-
26	Setda Bagian Hukum	18.205.000,00	14.245.000,00
27	Setda Bagian Pembangunan	48.950.000,00	48.950.000,00
28	Setda Bagian Kesra	-	-
29	Setda Bagian Humas	16.775.000,00	16.775.000,00
30	Setda Bagian PKP	0,00	3.960.000,00
31	Setda Bagian Umum	-	-
32	Kantor Kec. Magelang Selatan	14.669.600,00	14.669.600,00
33	Kantor Kec. Magelang Tengah	8.502.000,00	8.502.000,00
34	Kantor Kec. Magelang Utara	10.984.000,00	10.984.000,00
35	Inspektorat	39.399.000,00	39.399.000,00
36	Badan Perencanaan Daerah	1.175.927.500,00	1.146.037.500,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.123.197.200,00	790.337.700,00
38	PPKD	147.669.800,00	97.444.800,00
39	BKPP	264.347.800,00	225.097.800,00
40	Badan Litbang	34.410.750,00	14.135.750,00
	JUMLAH	11.286.514.877,00	10.631.176.588,00

3) Aset Lain-Lain

Nilai buku Aset Lain-Lain setelah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017			
Uraian	Nilai Aset Lain-Lain	Akumulasi Penyusutan 2017	Nilai Buku per 31 Desember 2017
Aset lain-lain	62.797.458.526,11	(24.647.112.834,00)	38.150.345.692,11



Penjelasan atas mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

Terdapat berita acara koreksi dari SKPD tentang reklasifikasi dari asset tetap intracomptable ke asset lain-lain intracomptable dikarenakan kondisi barang yang rusak berat dan atau hilang atau sudah dibongkar tetapi belum dihapuskan dari daftar barang milik daerah dan ada pula berita acara koreksi asset lain-lain intracomptable yang direklas ke extracomptable karena nilainya dibawah kapitalisasi tetapi kondisi barangnya rusak berat dan ada pula barang yang hilang tidak ditemukan.

Mutasi asset Lain-lain Tahun 2017

Saldo awal Tahun 2017	Rp	146.596.567.716,88
Penambahan		
Dinas Pendidikan		1.338.295.775,00
Dinas Kesehatan		363.954.843,00
Pusk.Magelang Selatan		23.400.000,00
Pusk.Jurangombo		145.860.200,00
Pusk.Magelang Tengah		26.000.000,00
Pusk.Kerkopan		83.656.400,00
Pusk.Magelang Utara		69.260.000,00
Dinas PU-PR		936.491.917,25
RSUD Tidar		9.138.807.067,00
Satpol PP		158.727.244,43
DLH		300.558.250,00
Dinas Perhubungan		1.125.638.000,00
Dinas Tenaga Kerja		83.044.450,00
Dinas Perpustakaan		83.998.500,00
Dinas Pertanian		23.240.000,00
Setda Bagian Tapem		31.204.500,00
Setda Bagian Organisasi		32.187.389,00
Setda Bagian Hukum		50.370.650,00
Setda Bagian Pembangunan		17.298.500,00
Setda Bagian Kesra		15.149.350,00
Setda Bagian Humas		9.190.000,00
Setda Bagian PKP		20.311.400,00
Setda Bagan Umum		225.786.361,00
Kec.Magelang Utara		53.582.000,00
Kel. Potrobangsan		15.250.000,00
Inspektorat		126.844.670,00
BPKAD		47.806.800,00
Badan Litbang		60.592.000,00
KOREKSI BPK		
Dinas Pendidikan		20.552.548.810,00
RSUD Tidar		524.150,00
DISPERINDAG		997.783.500,00
PPKD		2.677.289.450,00
DPUPR		4.459.336.000,00
Jumlah Penambahan Th.2017	Rp	43.293.988.176,68
Pengurangan		
Dinas Pendidikan		117.190.627.416,04
Kel.Wates		778.302,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

BPKAD	15.075.000,00
KOREKSI BPK	
RSUD TIDAR	4.507.590,00
SATPOL PP	1.876.750,00
DPMP4KB	329.045,00
PPKD	9.873.659.149,41
SETDA	6.244.115,00
Jumlah Pengurangan Th.2017	Rp 127.093.097.367,45
Jumlah Aset Lain-lain Th.2017	Rp 62.797.458.526,11

Berikut rincian Aset Lain – Lain masing-masing SKPD per 31 Desember 2017:

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	22.861.390.355,00	118.161.173.186,04
2	Dinas Kesehatan	363.954.843,00	-
3	Pusk Magelang Selatan	23.400.000,00	
4	Pusk Jurangombo	145.860.200,00	
5	Pusk Magelang Tengah	26.000.000,00	
6	Pusk Kerkopan	83.656.400,00	
7	Pusk Magelang Utara	69.260.000,00	
8	RSUD Tidar	9.134.823.627,00	
9	Dinas PU-PR	10.319.190.960,32	9.382.699.043,07
10	Satpol PP	306.316.656,33	149.466.161,90
11	Badan Kesbangpol	65.713.550,00	65.713.550,00
12	DLH	535.284.053,00	234.725.803,00
13	Dinsos		
14	Dinas Tenaga Kerja	83.044.450,00	-
15	DPMP4KB	339.915.381,00	340.244.426,00-
16	Dinas Perhubungan	1.310.951.496,67	185.313.496,67
17	Diskominfo	389.774.300,00	389.774.300,00-
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, Budpar	53.571.000,00	53.571.000,00
19	Dinas Perpustakaan	101.236.500,00	17.238.000,00
20	Dinas Pertanian	35.039.750,00	11.799.750,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	223.333.232,00	223.333.232,00-
22	Setda Bagian Tapem	95.421.000,00	64.216.500,00
23	Setda Bagian Organisasi	86.528.611,00	54.341.222,00
24	Setda Bagian Hukum	50.370.650,00	0,00
25	Setda Bagian Pembangunan	18.871.250,00	1.572.750,00
26	Setda Bagian Kesra	23.948.750,00	8.799.400,00
27	Setda Bagian Humas	195.003.872,00	185.813.872,00
28	Setda Bagian PKP	2.231.957.998,45	2.211.646.598,45
29	Setda Bagian Umum	383.926.122,00	158.139.761,00
30	Kel. Jurangombo Utara	26.006.750,00	26.006.750,00
31	Kel. Rejowinangun Selatan	13.350.000,00	13.350.000,00
32	Kel. Tidar Selatan	39.574.500,00	39.574.500,00
33	Kel. Tidar Utara	14.438.500,00	14.438.500,00
34	Kantor Kec. Magelang Tengah	18.537.900,00	18.537.900,00
35	Kel. Cacaban	329.560.000,00	329.560.000,00
36	Kel. Gelangan	43.762.000,00	43.762.000,00-



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
37	Kel.Kemirirejo	74.863.500,00	74.863.500,00
38	Kel.Rejowinangun Utara	183.880.000,00	183.880.000,00
39	Kecamatan Magelang Utara	53.582.000,00	
40	Kel.Kedungsari	179.875.000,00	179.875.000,00
41	Kel. Kramat Utara	22.375.050,00	22.375.050,00
42	Kel.Potrobangsan	998.350.000,00	983.100.000,00
43	Kel.Wates	116.535.400,00	117.313.702,00
44	Inspektorat	126.844.670,00	-
45	Badan Perencanaan Daerah	221.364.433,34	221.364.433,34
46	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.164.272.580,00	2.131.540.780,00
47	PPKD	2.821.289.450,00	10.017.659.149,41
48	BKPP	180.415.200,00	180.415.200,00
49	Badan Litbang	159.961.200,00	99.369.200,00
	JUMLAH ASET LAIN-LAIN	58.344.366.641,11	146.596.567.716,88

Penghapusan Aset Lainnya Intra sebesar Rp.9.275.877.703,00 terdiri dari 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu :

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 12.469.716,00 berupa penghapusan aset laindua kendaraan bermotor yang menjadi Tuntutan Ganti Rugi sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 979.4/98/112 tanggal 4 April 2017 tentang Penetapan Pelunasan Pembebanan Ganti Rugi Atas Nama Sdr. Ismoyo sebesar Rp.5.769.716,00 dan sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 979.4/96/112 tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan Pelunasan Pembebanan Ganti Rugi Atas Nama Sdr. Muhtadi sebesar Rp.6.700.000,00.
- b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 9.263.407.987,00 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 030/90/112 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penghapusan barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas Pendidikan Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2017. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah diserahterimakan ke Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.137/396/113 Tahun 2016 tentang Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Kota Magelang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat penghapusan tanah sebesar Rp.37.801.146.590,00 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 030/90/112 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penghapusan barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas Pendidikan Kota



Magelang Kota Magelang Tahun 2017. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah diserahkan ke Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.137/396/113 Tahun 2016 tentang Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Kota Magelang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp.27.254.746.858,00 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 030/90/112 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penghapusan barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas Pendidikan Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2017. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah diserahkan ke Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.137/396/113 Tahun 2016 tentang Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Kota Magelang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- e) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar gedung dan bangunan sebesar Rp.47.576.658.507,00 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 030/90/112 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penghapusan barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas Pendidikan Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2017. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah diserahkan ke Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.137/396/113 Tahun 2016 tentang Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Kota Magelang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- f) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat penghapusan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp.471.802.244,00 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 030/90/112 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penghapusan barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas Pendidikan Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2017. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah diserahkan ke Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.137/396/113 Tahun 2016 tentang Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Kota Magelang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



Penjelasan lain atas penghapusan aset tetap baik intracomptable maupun aset extracomptable :

1. Penghapusan Aset tetap ekstra sebesar Rp.1.895.362.847,00 terdiri dari 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu :
 - a. Kecamatan Magelang Tengah sebesar Rp 21.424.000,00 berupa penghapusan gedung dan bangunan sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang Nomor 028/595/440 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Serta Jalan Irigasi dan Jaringan Kecamatan Magelang Tengah Dari Daftar Barang Pengguna Barang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah dibongkar dan material hasil bongkarannya telah dijual dan dimusnahkan.
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 1.873.938.847,00 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 030/90/112 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penghapusan barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas Pendidikan Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2017. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah diserahkan ke Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.137/396/113 Tahun 2016 tentang Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Kota Magelang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Penghapusan Aset Lainnya Intra sebesar Rp.9.275.877.703,00 terdiri dari 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu :
 - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 12.469.716,00 berupa penghapusan aset lain dua kendaraan bermotor yang menjadi Tuntutan Ganti Rugi sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 979.4/98/112 tanggal 4 April 2017 tentang Penetapan Pelunasan Pembebanan Ganti Rugi Atas Nama Sdr. Ismoyo sebesar Rp.5.769.716,00 dan sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 979.4/96/112 tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan Pelunasan Pembebanan Ganti Rugi Atas Nama Sdr. Muhtadi sebesar Rp.6.700.000,00.



- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 9.263.407.987,00 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 030/90/112 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penghapusan barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas Pendidikan Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2017. Penghapusan ini dikarenakan aset sudah diserahkan ke Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.137/396/113 Tahun 2016 tentang Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Kota Magelang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Aset lain-lain Pemerintah Kota Magelang termasuk didalamnya Asuransi Jiwa Bakrie Program Golden Age dan Dwiguna sebesar Rp.1.549.299.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Bakrie yang berkedudukan di Gedung Artha Graha Lt 16 Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 yakni perjanjian kerja sama pengelolaan program asuransi Golden Age bagi pegawai negeri sipil dan program Asuransi Dwi Guna bagi tenaga kontrak pemerintah Kota Magelang yang berlaku sejak tanggal 11 Desember 2003 sampai dengan 10 Desember 2011 yang terdaftar resmi sesuai polis Nomor 60.2003.0022, polis nomor 80.2003.0023 dan polis nomor 62.2003.2006 tercantum Pemegang polis Nama Perusahaan/Instansi Pemerintah Kota Magelang.
 - b. Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun Anggaran 2005 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Yogyakarta Nomor : 69/R/XIV.Yk/06/2006 tanggal 22 Juni 2006 dinyatakan bahwa bantuan asuransi bagi PNS dan tenaga kontrak daerah pada APBD Tahun Anggaran 2005 tidak tepat. Selanjutnya terhadap temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan agar Walikota Magelang menghentikan program pembayaran asuransi atas beban APBD dengan cara PNS dan tenaga kontrak mengambil alih dan meneruskan program tersebut atas beban masing-masing. Apabila PNS dan tenaga kontrak tidak bersedia meneruskan program tersebut, maka perjanjian diakhiri dengan memperhitungkan jumlah klaim asuransi yang dapat diterima pemerintah kota Magelang yang selanjutnya disetor ke kas daerah.
 - c. Sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI tersebut pada tanggal 11 Desember 2006 telah diadakan penandatanganan Addendum I Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Magelang dengan PT.Asuransi Jiwa Bakrie tentang Pengelolaan Program Asuransi Golden Age bagi Pegawai



Negeri Sipil dan Program Asuransi Dwi Guna Bagi Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Magelang Nomor: ADD.120 Tahun 2005 Nomor : ADD.PKS/633/AJB/DIR/XII/2005.

- d. Berdasarkan Addendum I pasal 7 ayat 2 (e) disebutkan bahwa saat berakhirnya masa asuransi pada tanggal 10 Desember 2011, maka Pihak Kedua (PT Asuransi Jiwa Bakrie) dalam jangka waktu 14 hari kerja akan memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran uang pertanggungan kepada Pihak Pertama (Pemerintah Kota Magelang) dengan perhitungan $4.295 \text{ orang tertanggung} \times \text{jumlah uang pertanggungan sebesar Rp. } 362.250,00 = \text{Rp. } 1.556.937.500,00$ (satu miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pembayaran klaim meninggal dunia tahun berjalan.
- e. Sebagai tindak lanjut dari Addendum I Perjanjian Kerja Sama tersebut, Pemerintah Kota Magelang telah mengirimkan surat Nomor 900/246/290 tanggal 29 Maret 2011 tentang laporan berakhirnya kerja sama Program Asuransi Golden Age dan Dwi Guna kepada PT Asuransi Jiwa Bakrie. Surat kami tersebut dijawab oleh Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Bakrie dengan surat Nomor S.2227/AJB/DII/IX/2011 perihal pemberitahuan berupa manfaat pembayaran klaim program asuransi Golden Age dan Dwi Guna, yang isinya bahwa klaim yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Magelang adalah sebesar Rp.1.549.299.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa berakhirnya asuransi adalah tanggal 10 Desember 2011
- f. Pada tanggal 31 Oktober 2011, pemerintah Kota Magelang mengirimkan surat tanggapan kepada Dirut PT Asuransi Jiwa Bakrie dengan surat Nomor 842.3/1999/290 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan pembayaran uang pertanggungan, yang pada intinya kami meminta pembayaran klaim Program Asuransi Golden Age dan Dwi Guna untuk dapat ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 1.549.299.000,00. Surat tersebut dijawab oleh Dirut PT. Asuransi Jiwa Bakrie dengan surat Nomor S/2264/AJB/DIR/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang menjelaskan bahwa PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak dapat melaksanakan komitmen sesuai dengan perjanjian kerja sama yakni pembayaran klaim atas pengelolaan program asuransi Golden Age bagi pegawai negeri sipil dan program Asuransi Dwi Guna bagi tenaga kontrak pemerintah Kota Magelang dan dijadwalkan ulang pada tanggal 29 Februari 2012 .
- g. Pada tanggal 8 Februari 2012 Pemerintah Kota Magelang mengirimkan Surat Nomor 900/268/290 tentang permintaan pernyataan tertulis kepada PT.Asuransi Jiwa Bakrie yang intinya kami meminta Pihak PT. Asuransi Jiwa Bakrie untuk membuat pernyataan tertulis tentang kesanggupan untuk dapat membayar klaim tersebut pada tanggal 29 Februari 2012



- h. Selanjutnya, Surat Walikota Magelang nomor 900/268/290 tanggal 8 Februari 2012 ditanggapi oleh pihak PT.Asuransi Jiwa Bakrie yang diwakili oleh Direktur Utama yakni Sdr. Timoer Sutanto dan Hary Prianto sebagai Direktur dengan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar kewajiban terhadap klaim pada tanggal 29 Februari 2012, dan surat pernyataan tersebut diterima pada tanggal 6 Maret 2012.
- i. Sampai saat ini, pihak PT.Asuransi Jiwa Bakrie tidak dapat menepati kewajibannya kepada pemerintah Kota Magelang untuk membayar klaim Asuransi Golden Age dan Dwi Guna sebesar Rp. 1.549.299.000,00 beserta dengan kompensasi keterlambatan pembayaran klaim sebesar 4% pa (per tahun) dari nilai total klaim tersebut.
- j. Surat Aduan keempat dari Walikota Magelang Nomor 900/814/440 tanggal 28 September 2017 kepada Ketua Dewan Komisiner OJK . Selanjutnya dari Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK aduan diteruskan ke Pihak Asuransi Jiwa Bakrie untuk mendapatkan tanggapan penyelesaian atas permasalahan ini.
- k. Pihak PT Asuransi Jiwa Bakrie menjawab Surat Aduan dari Pemerintah Kota Magelang melalui jawaban surat nomor : S.5512/DIR/AJB/2018 tanggal 29 Januari 2018 Perihal : Menindaklanjuti pengaduan Walikota Magelang terkait Klaim Asuransi Golden Age dan Dwiguna yang pada intinya Pihak PT Asuransi Jiwa Bakrie menawarkan penggantian kewajiban atas klaim pemerintah kota Magelang dengan saham Bakrie and Brothers (BNBR) sejumlah 30.985.980 lembar saham @Rp50,-

2. KEWAJIBAN

Akun kewajiban per 31 Desember 2017 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.768.128.797,17. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2017

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	10.734.064,00	97.114.938,00	200.000,00	107.849.002,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	672.985.716,63	826.448.167,17	672.985.716,63	826.448.167,17
3	Utang Beban	5.134.044.504,00	768.961.561,00	5.134.044.504,00	768.961.561,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.468.620,00	65.070.067,00	9.468.620,00	65.070.067,00
	Jumlah	5.827.232.904,63	1.757.594.733,17	5.816.698.840,63	1.768.128.797,17



1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2017 sebesar Rp107.849.002,00 merupakan utang pemerintah Kota Magelang kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2017

No	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Nilai (Rp)	Ket
1	PPh Pasal 21 DISPORAPAR	10.417.500,00	Utang pajak DISPORAPAR yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2017
2	PPh Pasal 22 DISPORAPAR	1.818.000,00	Utang pajak DISPORAPAR yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2017
3	PPh Pasal 23 DISPORAPAR	1.105.871,00	Utang pajak DISPORAPAR yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2017
4	PPN DISPORAPAR	13.379.817,00	Utang pajak DISPORAPAR yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2017
5	PPh Pasal 22 (DPU)	8.715.957,00	Utang pajak DPU dari pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2017
6	PPN (DPU)	1.818.107,00	Utang pajak DPU dari pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2017
7	Utang PFK Dinas Perkim	62.378.750,00	Terdapat SP2D yang masih di rek bendahara per tgl.31 Desember 2017
8	Utang PFK Kel. Rejo Utara	8.015.000,00	Terdapat SP2D yang masih di rek bendahara per tgl.31 Desember 2017
	Jumlah	107.649.002,00	

2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pengertian dari pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima tetapi belum sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah karena pendapatan tersebut masih untuk 1 periode atau beberapa periode yang akan datang. Rincian dari pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2017

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	DLH	436.318.202,63	594.696.304,17	436.318.202,63	594.696.304,17
2	BPKAD	236.667.514,00	231.751.863,00	236.667.514,00	231.751.863,00
	Jumlah	672.985.716,63	826.448.167,17	672.985.716,63	826.448.167,17

3) Utang Beban

Utang beban sebesar Rp768.961.561,00 timbul karena Pemerintah Kota Magelang menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut. Utang beban ini terdiri dari utang air, telepon, listrik, internet dan lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Rincian Utang Beban per SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	DIKNAS	116.149.932,00
2	DKK	13.203.651,00
3	PUSKESMAS MGL SELATAN	2.755.270,00
4	PUSKESMAS MGL UTARA	5.258.091,00
5	PUSKESMAS MGL TENGAH	4.192.192,00
6	PUSKESMAS JURANGOMBO	3.852.857,00
7	PUSKESMAS KERKOPAN	2.686.118,00
8	RSUD	196.019.604,00
9	DPUPR	7.333.714,00
10	DISPERKIM	26.839.201,00
11	BAPPEDA	6.875.884,00
12	DISHUB	6.199.629,00
13	DISKOMINSTA	5.317.802,00
14	DLH	5.793.199,00
15	DINAS SOSIAL	3.551.850,00
16	DISDUKCAPIL	9.857.506,00
17	DISNAKER	6.907.017,00
18	DISPERINDAG	4.423.6943,00
19	DISPORAPAR	2.413.260,00
20	SATPOL PP	3.444.051,00
21	KESBANGPOL	2.859.709,00
22	SETWAN	13.818.718,00
23	BAGIAN UMUM	16.3341.113,00
24	BAGIAN PKP	30.460.748,00
25	BADAN LITBANG	1.652.715,00
26	KEC MGL UTARA	2.398.270,00
27	KEC MGL SELATAN	2.790.273,00
28	KEC MGL TENGAH	2.893.543,00
29	REJO SELATAN	1.230.166,00
30	MAGERSARI	1.802.608,00
31	JURANGOMBO UTARA	1.062.402,00
32	JURANGOMBO SELATAN	1.494.380,00
33	TIDAR UTARA	1.775.733,00
34	TIDAR SELATAN	1.085.512,00
35	WATES	839.797,00
36	POTROBANGSAN	1.391.712,00
37	KEDUNGSARI	810.456,00
38	KRAMAT UTARA	1.020.326,00
39	KRAMAT SELATAN	637.037,00
40	KEMIRIREJO	1.077.249,00
41	CACABAN	1.381.497,00
42	REJO UTARA	1.022.760,00
43	MAGELANG	1.826.299,00
44	PANJANG	1.166.525,00
45	GELANGAN	917.483,00
46	INSPEKTORAT	590.400,00
47	BKD	1.953.000,00
48	DPMPPTSP	9.010.043,00
49	BPKAD	15.059.525,00
50	DPMP4KB	3.320.829,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)
51	DINAS PERPUS	15.354.208,00
52	DIPERTAN	10.028.754,00
JUMLAH		768.961.561,00

Berikut ini uraian Utang Beban Tahun 2017 :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang Listrik	404.186.773,00
2	Utang Air	139.192.375,00
3	Utang Telepon	24.896.896,00
4	Utang Internet	75.935.337,00
5	Utang BBM	29.139.148,00
6	Utang Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang	6.319.000,00
7	Utang Barang Jasa BOS	89.292.032,00
JUMLAH		768.961.561,00

4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp65.070.067,00, nilai utang jangka pendek lainnya tersebut diantaranya kegiatan prolansia dan protesa gigi pada Puskesmas Jurangombo sebesar Rp2.964.500,00 dan Puskesmas Magelang Utara Rp7.108.000,00, klaim dari Jamkesda sebesar Rp42.797.567,00, dan utang jasa dokter jaga pada RSUD Tidar sebesar Rp12.200.000,00.

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	42.797.567,00
2	Puskesmas Kerkopan	7.108.000,00
3	Puskesmas Magelang Utara	2.964.500,00
4	RSUD Tidar Magelang	12.200.000,00
JUMLAH		65.070.067,00

3. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar **Rp3.580.935.487.859,34** dengan uraian sebagai berikut:

- Ekuitas Awal	Rp 2.915.066.351.702,81
- Surplus/ Defisit LO	150.203.962.267,51
- Penyesuaian/Mutasi	
Penambahan dan Pengurangan	<u>Rp 515.665.173.889,02</u>
- Ekuitas Akhir	Rp3.580.935.487.859,34



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

**D. PENJELASAN POS-POS AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2017. Struktur Laporan Operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN - LO	XXXX
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	XXXX
PENDAPATAN TRANSFER - LO	XXXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	XXXX
BEBAN	XXXX
BEBAN PEGAWAI	XXXX
BEBAN PERSEDIAAN	XXXX
BEBAN JASA	XXXX
BEBAN PEMELIHARAAN	XXXX
BEBAN PERJALANAN DINAS	XXXX
BEBAN HIBAH	XXXX
BEBAN BANTUAN SOSIAL	XXXX
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	XXXX
BEBAN LAIN-LAIN	XXXX
BEBAN TRANSFER	XXXX
	<hr/>
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	XXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXXX
SURPLUS PENJUALAN ASET NON LANCAR - LO	XXXX
SURPLUS DARI KEG. OPERASIONAL LAINNYA - LO	XXXX
DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR - LO	XXXX
DEFISIT DARI KEG., OPERASIONAL LAINNYA - LO	XXXX
	<hr/>
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEG NON OPERASIONAL	XXXX
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	XXXX
POS LUAR BIASA	XXXX
PNDAPATAN LUAR BIASA - LO	XXXX
BEBAN LUAR BIASA	XXXX
	<hr/>
SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	XXXX
SURPLUS/ DEFISIT - LO	XXXX



LO tahun 2017 disajikan dengan perbandingan Laporan Operasional tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO Kota Magelang adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar **Rp903.674.069.546,35** dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2016 dan 2017

No	Pendapatan – LO	2017	2016
1	PAD – LO	228.190.148.358,35	213.493.027.099,16
2	Transfer – LO	652.227.026.858,00	618.446.656.378,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	23.256.894.330,00	18.400.977.401,00
	Jumlah	903.674.069.546,35	850.340.660.878,16

a. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kota Magelang adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar **Rp228.190.148.358,35** dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2016 dan 2017

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Pajak Daerah – LO	31.232.450.736,00	25.921.432.727,00
	a. Pajak Hotel	3.304.979.480,00	2.910.250.748,00
	b. Pajak Restoran	3.388.469.448,00	2.418.552.101,00
	c. Pajak Hiburan	1.886.056.938,00	1.617.776.946,00
	d. Pajak Reklame	906.930.725,00	771.834.201,00
	e. Pajak Penerangan Jalan	8.189.824.792,00	7.460.306.497,00
	f. Pajak Parkir	207.502.220,00	148.069.500,00
	g. Pajak Air Tanah	338.391.300,00	203.971.000,00
	h. Pajak Sarang Burung Walet	10.925.000,00	10.925.000,00
	i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.257.673.488,00	5.125.582.290,00
	j. BPHTB	6.741.697.345,00	6.600.664.580,00
2	Retribusi Daerah – LO	6.073.906.418,46	6.100.118.962,05
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	486.829.000,00	223.107.500,00
	b. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	326.865.600,00	326.808.600,00
	c. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	62.838.895,83	104.246.583,00



No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
	d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	654.850.000,00	590.544.000,00
	e. Retribusi Pelayanan Pasar	1.576.138.050,00	1.485.793.575,00
	f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	388.045.500,00	511.755.500,00
	g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7.520.000,00	10.755.000,00
	h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	24.890.000,00	18.110.000,00
	i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0,00
	j. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	609.040.120,00	954.700.638,00
	k. Retribusi Terminal	0	575.465.000,00
	l. Retribusi Tempat Khusus Parkir	229.560.000,00	231.960.000,00
	m. Retribusi Rumah Potong Hewan	96.345.000,00	89.160.000,00
	n. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	241.598.000,00	59.800.000,00
	o. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	916.262.000,00	1.305.048.000,00
	p. Retribusi Izin Gangguan	444.929.252,63	(395.125.433,95)
	q. Retribusi Izin Trayek	8.195.000,00	7.990.000,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	7.711.404.121,00	6.182.279.953,00
	a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusda	7.710.904.121,00	6.181.763.286,00
	b. Bagian laba atas penyertaan modal pada koperasi		0,00
	c. Bagian laba atas penyertaan modal pada pengusaha kecil menengah	500.000,00	516.667,00
	Lain Lain PAD yang Sah – LO	183.172.387.082,89	175.289.195.457,11
	a. Hasil penjualan peralatan mesin	31.200.000,00	0,00
	b. Hasil penjualan aset lainnya	89.135.000,00	0,00
	c. Jasa giro	8.605.560.627,00	7.565.252.536,00
	d. Pendapatan bunga deposito	1.636.609.788,89	2.658.904.123,11
	e. Tuntutan ganti kerugian daerah	3.000.000,00	0,00
	f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umum	0,00	98.085.049,00
	g. Pendapatan denda pajak	225.991.584,00	0,00
	h. Pendapatan denda retribusi	10.339.600,00	9.246.330,00
	i. Pendapatan dari pengembalian	0,00	2.048.000,00
	j. Pendapatan sewa aset daerah	479.235,00	0,00
	k. Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa	431.459.685,00	1.200.000,00
	l. Pendapatan BLUD	170.303.590.814,00	150.830.502.401,00
	m. Lain-lain PAD yang sah lainnya	1.835.020.749,00	902.757.243,00
	JUMLAH	228.190.148.358,35	204.231.498.343,65

**b. Pendapatan Transfer – LO**

Pendapatan Transfer – LO Kota Magelang adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar **Rp652.227.026.858,00** dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2017 dan 2016

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1)	Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan – LO	553.630.731.358,00	567.120.983.799,00
	a. Bagi hasil pajak	23.233.937.205,00	31.154.650.385,00
	b. Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam	1.617.366.830,00	1.012.873.951,00
	c. Dana Alokasi Umum	440.041.244.000,00	447.909.575.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus	88.738.183.323,00	87.043.884.463,00
2)	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	47.039.466.000,00	0,00
	Dana penyesuaian (tunj sertifikasi guru dan tambahan penghasilan guru SD)	47.039.466.000,00	0,00
3)	Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya – LO	41.855.667.000,00	37.179.177.579,00
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	41.855.667.000,00	37.179.177.579,00
4)	Bantuan Keuangan – LO	9.701.162.500,00	14.146.495.000,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	9.701.162.500,00	14.146.495.000,00
	JUMLAH	652.227.026.858,00	618.446.656.378,00

c. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kota Magelang adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar **Rp23.256.894.330,00** dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2016

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1)	Pendapatan Hibah – LO	23.050.892.937,00	17.636.579.702,00
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO	23.050.892.937,00	17.521.873.951,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta-LO	0,00	113.730.751,00
	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan-LO	0,00	975.000,00
2)	Pendapatan Lainnya – LO	206.001.393,00	764.397.699,00
	Pendapatan Lainnya-LO	206.001.393,00	764.397.699,00
	Jumlah	23.256.894.330,00	33.192.977.441,00

Rincian Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp23.050.892.937,00 terdiri dari :

- Penerimaan dana BOS tahun 2017 ke Dinas Pendidikan (sekolah-sekolah) sebesar Rp23.011.050.737,00
- Penerimaan 2 unit sepeda motor Torlin dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai 37.842.000,00



- Hibah dari Pemerintah untuk sarana air minum senilai Rp2.000.000,00
- Hibah Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar senilai Rp.217.567.000,00
- Hibah dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah senilai Rp.1.028.663.700,00
- Hibah dari Direktorat Jendral Cipta Karya senilai Rp.2.341.424.000,00
- Hibah dari ESDM senilai Rp.398.414.000,00

Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2017 sebesar Rp206.001.393,00 merupakan pendapatan dari kompensasi pajak PPh 21 gaji yang disebabkan karena adanya peraturan baru pada tahun 2015 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, pada Tahun 2016 terdapat kelebihan pajak yang sudah terlanjur disetor ke Kas Negara, sesuai saran dari BPK bahwa kelebihan setor tersebut harus dikompensasikan ke dalam PPh 21 mulai Tahun 2017.

2. Beban

Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp753.339.362.738,85** yang terdiri dari Beban Operasi sebesar **Rp752.778.660.438,85** dan Beban Transfer sebesar **Rp560.702.300,00** dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Beban Tahun 2017

No	Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a	Beban Pegawai	321.794.027.524,00	354.934.145.043,00
b	Beban Persediaan	73.954.988.655,54	72.343.256.140,41
c	Beban Jasa	183.602.016.228,00	177.672.866.800,60
d	Beban Pemeliharaan	26.693.340.922,00	25.229.330.787,00
e	Beban Perjalanan Dinas	28.299.063.037,00	25.271.966.044,00
f	Beban Hibah	8.385.895.620,00	1.486.806.000,00
g	Beban Bantuan Sosial	4.962.870.000,00	3.192.264.000,00
h	Beban Penyusutan dan Amortisasi	104.799.043.752,01	92.548.597.074,93
i	Beban Lain-lain	287.414.700,30	236.721.873,25
j	Beban Transfer Bantuan Keuangan	560.702.300,00	641.828.500,00
	Jumlah	753.339.362.738,85	753.557.782.263,19

Berikut uraian Beban selama tahun 2017:

a. Beban Pegawai

Beban pegawai sebesar Rp321.794.027.524,00 terdiri dari :

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016

No	Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	234.441.235.209,00	260.519.904.266,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	31.307.670.000,00	87.650.779.750,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.926.800.000,00	2.489.975.000,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.394.699.275,00	1.094.175.703,00



No	Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	191.540.347,00	587.037.039,00
6	Beban Uang Lembur	2.712.038.650,00	2.592.273.285,00
7	Beban Pegawai BOS	1.542.564.700,00	0,00
8	Beban Honorarium	36.472.912.843,00	0,00
9	Beban Pegawai Rumah Sakit	10.804.566.500,00	0,00
	Jumlah	321.794.027.524,00	354.934.145.043,00

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan sebesar Rp73.954.988.655,54 dapat dirinci sebagai berikut:

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2017

No	Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	11.984.831.448.96,96	11.596.188.221,04
2	Beban Persediaan Bahan/Material	61.972.335.206.58	10.890.727.369,17
3	Beban Barang Untuk Diserahkan kpd masyarakat	0,00	20.800.000,00
4	Beban Persediaan RSUD	0,00	49.213.453.801,56
5	Beban Persediaan Puskesmas	0,00	622.086.748,64
6	Beban Persediaan Lain - lain	(2.178.000,00)	0,00
	Jumlah	73.954.988.655,54	72.343.256.140,41

c. Beban Jasa

Beban Jasa sebesar Rp183.602.016.228,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Realisasi Beban Jasa Tahun 2017

No	Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	111.158.731.454,00	93.025.997.968,00
2	Beban Premi Asuransi	8.045.914.383,00	8.041.836.241,00
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		0,00
4	Beban Cetak dan Penggandaan	7.521.526.572,00	6.488.872.614,60
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang	997.058.000,00	743.448.000,00
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	712.995.000,00	421.135.000,00
7	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.704.658.470,00	1.512.294.770,00
8	Beban Makanan dan Minuman	17.859.372.125,00	12.377.782.640,00
9	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.664.606.575,00	817.593.900,00
10	Beban Pakaian Kerja	501.530.550,00	451.094.800,00
11	Beban Pakaian Khusus dan Hari2 Tertentu	1.186.853.000,00	1.234.856.175,00
12	Beban Jasa Konsultasi	6.143.251.205,00	1.810.837.250,00
13	Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00
14	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	60.000.000,00	87.200.000,00
15	Beban Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.351.194.189,00	1.916.536.018,00
16	Beban Honorarium PNS	(33.000.000,00)	27.316.040.000,00
17	Beban Honorarium Non PNS	0,00	3.558.212.000,00
18	Beban Uang Untuk Diberikan Pihak Ketiga	1.668.245.000,00	1.808.850.000,00
19	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	9.786.557.947,00
20	Beban Yang Bersumber Dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	2.000.000,00
21	Beban Jasa Tenaga Ahli Instruktur/Nara Sumber	4.729.759.076,00	4.284.261.350,00
22	Beban Ijin Operasional	61.992.817,00	25.147.072,00
23	Beban Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimtek	1.968.304.876,00	1.838.658.055,00



No	Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
24	Beban Pengembangan Sekolah	2.010.974.400,00	0,00
25	Beban Peralatan dan Perlengkapan	810.993.600,00	0,00
26	Beban Promosi	81.950.245,00	71.455.000,00
27	Beban Honor Pengelolaan Keuangan BLUD		52.200.000,00
28	Beban Barang dan Jasa BOS	13.395.104.691,00	0,00
	Jumlah	183.602.016.228,00	177.672.866.800,60

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sebesar **Rp26.693.340.922,00** dapat dirinci sebagai berikut :

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2017

No	Beban	2016 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	20.034.520.881,00	6.378.025.608,00
2	Beban Pemeliharaan	6.658.820.041,00	13.785.321.683,00
3	Beban Pemeliharaan RSUD	0,00	4.422.509.654,00
4	Beban Pemeliharaan Puskesmas	0,00	643.473.842,00
	Jumlah	26.693.340.922,00	25.229.330.787,00

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sebesar **Rp28.299.063.037,00** dapat dirinci sebagai berikut :

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017

No	Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.425.000,00	12.045.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.801.018.251,00	25.085.677.430,00
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	228.261.829,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas BLUD	259.357.957,00	174.243.614,00
	Jumlah	28.299.063.037,00	25.271.966.044,00

f. Beban Hibah

Beban Hibah sebesar **Rp8.385.895.620,00** terdiri dari:

- Beban hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp1.413.259.010,00
- Beban hibah kepada sekolah sebesar Rp6.972.636.610,00

g. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sebesar **Rp4.962.870.000,00** terdiri dari:

- Beban Bantuan Sosial kepada masyarakat sebesar Rp4.492.870.000,00
- Beban Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp470.000.000,00

h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp104.799.043.752,01 terdiri dari :

**Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017**

No	Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	62.779.885.571,33	54.028.419.933,58
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.610.877.189,67	12.674.225.233,18
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.610.877.189,67	24.948.298.397,64
4	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	639.423.895,93,93	897.653.510,53
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
6	Beban Aset Tetap RSUD Tidar	0,00	0,00
	Jumlah	104.799.043.752,01	92.548.597.074,93

i. Beban Lain-Lain

Beban Lain – Lain sebesar Rp287.414.700,30 terdiri dari :

Beban Lain – lain Tahun 2017

No	Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban penyisihan piutang pendapatan	280.199.700,30	(30.000,00)
2	Beban penyisihan piutang lainnya	6.500.000,00	236.751.873,25
3	Beban Lain - lain	715.000,00	0,00
	Jumlah	287.414.700,30	236.721.873,25

j. Beban Transfer

Beban Transfer sebesar Rp560.702.300,00 terdiri dari:

Realisasi Beban Transfer Tahun 2017

No	Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	560.702.300,00	641.828.500,00
	Jumlah	560.702.300,00	641.828.500,00

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, beban dapat diungkapkan per SKPD. Rincian Beban Operasi per SKPD adalah sebagai berikut:

Realisasi Beban Operasi per SKPD Tahun 2017

No	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp) Audited
1	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	163.077.887.471,19	240.651.500.322,04
2	Dinas Kesehatan	47.592.216.259,89	43.967.914.308,16
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	192.496.058.167,11	166.256.175.352,14
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.356.431.551,06	37.128.152.707,79
	Dinas perumahan dan Kawasan Pemukiman	12.77.325.764,89	0,00
5	Bappeda	8.686.264.295,59	8.116.911.916,21
6	DishubKominfo	0,00	13.411.613.424,86
7	Dinas Perhubungan	8.792.633.418,15	0,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8.932.020.019,74	0,00
9	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota	0	24.301.137.293,41
10	Dinas/Kantor Lingkungan Hidup	29.820.947.299,94	3.719.258.041,59



No	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp) Audited
11	Dinas kependudukan dan Catatan Sipil	4.809.135.705,31	4.661.493.799,00
12	Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan sosial	0,00	8.551.573.837,10
13	Dinas Tenaga Kerja	8.419.060.762,55	0,00
14	Dinas Sosial	3.728.241.926,89	0,00
15	Dinas Koperasi. Perindustrian dan Perdagangan	0,00	6.654.358.722,27
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.511.545.241,61	0,00
17	Kantor Penanaman Modal	0,00	2.098.489.111,06
18	DPMPSTP	4.430.200.929,62	0,00
19	Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	8.967.461.543,87	10.083.917.804,01
20	Satuan Polisi Pamong Praja	10.094.926.124,96	5.129.559.281,00
21	Badan Kesbangpolinmas	4.565.402.765,40	4.239.901.562,69
22	DPRD	7.149.983.838,00	6.127.577.722,00
23	Sekretariat DPRD	20.188.509.229,43	17.790.227.173,72
24	KDH dan Wakil KDH	759.801.927,00	744.939.685,00
25	Sekretariat Daerah	38.204.263.930,31	38.692.757.008,24
26	Kantor Penelitian. Pengembangan dan Statistik	3.771.228.966,75	2.585.075.389,50
27	Kantor Kecamatan Magelang Utara	6.497.945.275,43	2.172.234.792,00
28	Kantor Kecamatan Magelang Selatan	7.113.652.481,67	2.232.384.035,45
29	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	7.592.083.627,29	2.174.463.161,82
30	Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.000.522.292,23	1.946.448.857,09
31	Kelurahan Magersari	1.039.332.081,80	1.982.969.404,80
32	Kelurahan Jurangombo Utara	716.315.467,49	1.475.554.803,16
33	Kelurahan Jurangombo Selatan	1.097.572.702,74	2.132.818.708,07
34	Kelurahan Tidar Utara	1.713.695.726,14	1.920.547.313,36
35	Kelurahan Tidar Selatan	1.051.483.852,50	2.090.958.238,09
36	Kelurahan Wates	1.177.420.024,20	1.853.846.698,69
37	Kelurahan Potrobangsari	1.163.575.590,89	1.875.000.234,82
38	Kelurahan Kedungsari	1.336.949.306,59	2.266.756.147,32
39	Kelurahan Kramat Utara	773.047.830,21	1.561.167.323,00
40	Kelurahan Kramat Selatan	1.217.283.336,63	2.133.364.086,07
41	Kelurahan Kemirirejo	1.177.027.469,41	1.763.223.650,09
42	Kelurahan Cacaban	1.081.135.152,68	1.725.994.041,90
43	Kelurahan Rejowinangun Utara	1.251.591.922,09	2.123.652.371,95
44	Kelurahan Magelang	1.267.400.028,48	1.826.825.425,68
45	Kelurahan Panjang	785.308.773,20	1.543.595.255,26
46	Kelurahan Gelangan	820.496.896,21	1.540.826.898,93
47	Inspektorat	4.698.242.501,03	4.391.959.215,95
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.367.424.065,49	8.101.745.920,91
49	Badan Pelayanan Perzinan Terpadu	0,00	2.481.904.936,26
50	DPPKD/BPKAD	35.570.815.334,82	19.651.834.445,14
51	Dinas Pengelolaan Pasar	0	12.781.510.652,81
52	BPMPKB/DP4KB	9.810.915.494,08	8.122.021.859,30
53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.810.790.738,42	3.540.594.762,71
54	Dinas Pertanian. Peternakan dan Perikanan	10.415.085.327,88	9.841.644.060,77
	JUMLAH	752.778.660.438,85	752.168.381.763,19

3. Kegiatan Non Operasional

Pada tahun 2017 tidak terdapat adanya aktivitas Non Operasional yang bersifat menambah Surplus Non Operasional - LO.



4. Surplus Defisit Non Operasional

Surplus Defisit Non Operasional tahun 2017 sebesar Rp0,00.

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00

b. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit penjualan aset non lancar sebesar Rp0,00

5. Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2016 sebesar Rp.

6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2017 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

a. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan	Rp 0,00
Pendapatan	<u>Rp 0,00 +</u>
Pendapatan Luar Biasa	Rp 0,00

b. Beban Luar Biasa

Beban Bencana Alam	Rp130.744.540,00
Beban	<u>Rp 0,00 +</u>
Beban Luar Biasa	Rp130.744.540,00

7. Surplus/ Defisit LO

Surplus/ Defisit LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp, **150.203.962.267,51**



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



E. PENJELASAN POS-POS AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar **Rp 2.915.066.351.702,81** merupakan rincian dari ekuitas dana tahun 2016 sebagai berikut:

a. Ekuitas Dana Lancar sebesar	Rp 211.503.342.479,99
b. Ekuitas Dana Investasi sebesar	Rp 2.703.563.009.222,82
c. Ekuitas Dana Cadangan sebesar	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah	Rp 2.915.066.351.702,81

2. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai **Rp150.203.962.267,51**.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi nilai persediaan senilai Rp0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap
Penilaian kembali aset tetap sebesar Rp0,00.
- Koreksi Ekuitas Lainnya
Koreksi ekuitas lainnya senilai Rp515.665.173.889,02 merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2017, adanya reklasifikasi antar pos-pos akun, perubahan pos akun aset tetap, aset tetap lainnya dan aset lainnya, adanya berita acara koreksi asset dari asset tetap intacomptable ke asset lain-lain intracomptable, adanya berita acara koreksi asset tetap intracomptable ke ektracomptable, adanya penghapusan asset, adanya penambahan asset tanah.

4. Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas akhir sebesar Rp 3.580.935.487.859,34 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas Dana Lancar sebesar	Rp 214.062.722.187,94
b. Ekuitas Dana Investasi sebesar	Rp 3.366.872.765.671,40
c. Ekuitas Dana Cadangan sebesar	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah	Rp 3.580.935.487.859,34



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.



F. PENJELASAN POS-POS AKUN LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan BLUD Pemerintah Kota Magelang. Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran selama periode akuntansi. Penjelasan masing-masing aktivitas sebagai berikut :

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menghasilkan Arus Kas Bersih sebesar **Rp255.987.286.015,00** yang terdiri dari Arus Kas Masuk sebesar **Rp887.470.133.471,00** dan Arus Kas Keluar sebesar **Rp631.482.847.456,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar **Rp887.470.133.471,00** merupakan penerimaan Pemerintah Kota Magelang dalam Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2017	2016
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk		
a. Pendapatan Pajak Daerah	31.207.000.485,00	25.974.837.133,00
b. Pendapatan Retribusi Daerah	6.243.021.736,00	6.663.308.913,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.711.404.121,00	6.182.279.953,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	188.391.402.624,00	13.068.525.542,00
e. Dana Bagi Hasil Pajak	25.341.079.039,00	29.047.508.551,00
f. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.344.690.250,00	1.285.550.531,00
g. Dana Alokasi Umum	440.041.244.000,00	447.909.575.000,00
h. Dana Alokasi Khusus	86.387.994.323,00	89.394.073.463,00
i. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
j. Dana Penyesuaian	0,00	0,00
k. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.039.466.000,00	37.179.177.579,00
l. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	41.855.667.000,00	14.146.495.000,00
m. Pendapatan Hibah	9.701.162.500,00	0,00
n. Pendapatan Dana Darurat	2.000.000.000,00	0,00
o. Pendapatan Lainnya	206.001.393,00	764.397.699,00
Jumlah Arus Masuk Kas	887.470.133.471,00	671.615.729.364,00



Penjelasan atas Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp188.391.402.624,00 terdiri dari :

No	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017
1	Hasil penjualan peralatan/ mesin	Rp 31.200.000,00
2	Hasil penjualan gedung dan bangunan	Rp 64.300.000,00
3	Hasil penjualan asset tetap lainnya	Rp 24.835.000,00
4	Penerimaan Jasa Giro	Rp 8.605.560.627,00
5	Penerimaan Bunga deposito	Rp 1.760.068.693,00
6	Penerimaan piutang TGR	Rp 3.000.000,00
7	Pendapatan denda Pajak	Rp 225.991.584,00
8	Pendapatan denda retribusi	Rp 10.339.600,00
9	Pendapatan denda pemanfaatan asset daerah	Rp 479.235,00
10	Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah	Rp 421.509.035,00
11	Pendapatan BLUD	Rp 175.474.291.221,00
12	Lain-lain PAD yang sah lainnya	Rp 1.769.827.629,00
	JUMLAH	Rp 887.470.133.471,00

b. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar **Rp631.482.847.456,00** merupakan pengeluaran kas untuk biaya operasional pemerintah dalam Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Arus Kas Keluar	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Belanja Pegawai	320.214.212.824,00	338.052.908.068,00
b. Belanja Barang	297.228.422.172,00	185.673.895.228,00
c. Bunga	0,00	0,00
d. Subsidi	0,00	0,00
e. Bantuan Hibah	8.385.895.620,00	1.486.806.000,00
f. Bantuan Sosial	4.962.870.000,00	3.192.264.000,00
g. Bantuan Keuangan	560.702.300,00	641.828.500,00
h. Belanja Tak Terduga	130.744.540,00	706.972.000,00
I Belanja Bagi Hasil Pajak Belanja Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
J Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	631.482.847.456,00	529.754.673.796,00



Dari seluruh aktivitas operasional Pemerintah Kota Magelang diperoleh Arus Kas Bersih sebesar **Rp255.987.286.015,00**

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menghasilkan Arus Kas Bersih sebesar **(Rp230.260.086.246,00)** dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan.

b. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar **Rp230.260.086.246,00** dipergunakan untuk :

Arus Kas Keluar	2017	2016
	(Rp)	(Rp)
a. Belanja Tanah	1.476.985.650,00	52.100.000,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	82.151.639.808,00	46.418.846.441,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	91.263.642.710,00	55.090.159.130,00
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.058.480.055,00	57.482.755.890,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	1.392.612.400,00	1.756.599.100,00
f. Belanja Aset Lainnya	916.725.623,00	533.870.700,00
Jumlah Arus Keluar Kas	230.260.086.246,00	161.334.331.261,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Defisit sebesar **(Rp230.260.086.246,00)**.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar **Rp11.469.816.549,00** terdiri dari Arus Kas Masuk sebesar **Rp2.697.840.451,00** dan Arus Kas Keluar sebesar **Rp14.167.657.000,00** dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari aktivitas pembiayaan sebesar **Rp2.697.840.451,00** dengan perincian sebagai berikut:



Arus Kas Masuk	2015	2016
	(Rp)	(Rp)
a. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
b. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
c. Penerimaan Kembali Dana Bergulir	47.840.451,00	21.309.165,00
d. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
e. Penerimaan hasil penarikan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	2.697.840.451,00	21.309.165,00

b. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari aktivitas pembiayaan sebesar **Rp14.167.657.000,00** dipergunakan untuk :

Arus Keluar Kas	2017	2016
	(Rp)	(Rp)
a. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.167.657.000,00	7.087.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	14.167.657.000,00	7.087.000.000,00

Penyertaan Modal sebesar **Rp14.167.657.000,00** terdiri dari :

URAIAN		NILAI
- Bank Jateng	Rp	3.975.000.000,00
- PD Percetakan	Rp	665.000.000,00
- Bank Magelang	Rp	3.000.000.000,00
- BPR BKK Magelang	Rp	500.000.000,00
- PD. PDAM	Rp	4.527.657.000,00
- PD. Perbengkelan	Rp	500.000.000,00
- PDOW Taman Kiai Langgeng	Rp	1.000.000.000,00
JUMLAH	Rp	14.167.657.000,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar **Rp11.469.816.549,00**).

4. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran adalah Arus Kas yang berasal dari transaksi di luar APBD sebesar **Rp73.639.614,00** terdiri dari Arus Kas Masuk sebesar **Rp33.823.151.424,00** dan Arus Kas Keluar sebesar **Rp33.749.511.810,00** dengan penjelasan sebagai berikut :



a. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran sebesar **Rp33.823.151.424,00** terdiri dari :

- 1) Penerimaan penyeteroran kembali sisa UUDP (UP) Tahun 2016 yang disetor pada Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp76.680.474,00** terdiri dari:

Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>2017</u> <u>(Rp)</u>
Sisa Uang Persediaan (UP)	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76.680.474,00
Jumlah	<u>76.680.474,00</u>

- 2) Perhitungan Fihak Ketiga sebesar **Rp33.735.860.950,00** yang terdiri dari Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, PPH 21 dan Askes dari seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Fihak Ketiga :

- Iuran Wajib Pegawai (IWP)	Rp. 28.270.195.917,00
- Iuran Taperum	Rp. 269.769.000,00
- PPH 21	Rp. 244.853.579,00
- Askes	Rp. 4.247.213.317,00
- JKK	Rp. 312.812.459,00
- JKM	Rp. 391.016.678,00
JUMLAH	<u>Rp. 33.735.860.950,00</u>

- 3) Pendapatan Terdapat SP2D Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp9.970.000,00 yang cair sebanyak dua kali kepada pihak ketiga pada bulan Desember 2016, sehingga RKUD Kota Magelang berkurang sebesar **Rp9.970.000,00**, kemudian pada tahun 2017 sudah dipindahbukukan kembali ke RKUD.
- 4) Terdapat penerimaan pengembalian dana BOS Propinsi dari SMP Muhammadiyah yang salah masuk di RKUD Kota Magelang sebesar Rp640.000,00 pada tahun 2017, tetapi sudah dikeluarkan atau dipindahbukukan di awal tahun 2018.



b. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran sebesar **Rp33.749.511.810,00** terdiri dari:

- a. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga yang merupakan penyetoran atas Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, PPH 21 dan Askes dari seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebesar **Rp33.735.860.950,00** terdiri dari :

Perhitungan Pihak Ketiga :

- Iuran Wajib Pegawai (IWP)	Rp.	28.270.195.917,00
- Iuran Taperum	Rp.	269.769.000,00
- PPH 21	Rp.	244.853.579,00
- Askes	Rp.	4.247.213.317,00
- JKK	Rp.	312.812.459,00
- JKM	Rp.	391.016.678,00
JUMLAH	Rp.	33.735.860.950,00

- b. Terdapat pendapatan dari Dinas Kesehatan Kota Magelang sebesar Rp12.907.311,00 yang belum disetorkan ke Kasda sampai tanggal 31 Desember 2017 sehingga menjadi sisa kas di bendahara penerimaan akan tetapi sudah diakui menjadi pendapatan pada LRA.
- c. Terdapat penerimaan BLUD Puskesmas Kerkopan yang salah masuk di RKUD Kota Magelang pada tahun 2016 sebesar Rp607.000,00 tetapi sudah dikeluarkan atau dipindahbukukan ke rekening BLUD di awal tahun 2017.
- d. Terdapat saldo Bank Mandiri pada RSUD Tidar di Tahun 2016 sebesar Rp136.549,00 yang merupakan selisih biaya MDR (Merchant Discount Rate) yang dibebankan dari konsumen, sampai dengan 31 Desember 2017 ini saldonya bertambah menjadi Rp3.361.713,00 dan sudah diakui menjadi pendapatan BLUD pada RSUD Tidar.

5. Kenaikan/ Penurunan Kas

Kenaikan Kas Bersih selama periode Tahun Anggaran 2017 dari keseluruhan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non



Anggaran Pemerintah Kota Magelang surplus sebesar **Rp14.331.022.834,00** dengan rincian sebagai berikut :

Arus Kas :

a. Dari aktivitas operasi	Rp	255.987.286.015,00
b. Dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(230.260.086.246,00)
c. Dari aktivitas pembiayaan	Rp	(11.469.816.549,00)
d. Dari aktivitas non anggaran	Rp	73.639.614,00
Jumlah	Rp	(14.331.022.834,00)

6. Saldo Awal Kas di BUD

Saldo Awal Kas BUD sebesar **Rp131.816.826.289,00** yang merupakan Saldo Akhir Kas di BUD pada 31 Desember Tahun 2016.

Saldo Awal Kas di BLUD

Saldo Awal Kas di BLUD per 31 Desember 2017 sebesar **Rp30.441.940.189,00** terdiri dari:

- RSUD Tidar	Rp.	26.144.432.315,00
- Puskesmas Magelang Selatan	Rp.	827.941.998,00
- Puskesmas Magelang Jurangombo	Rp.	447.104.399,00
- Puskesmas Magelang Tengah	Rp.	1.375.242.457,00
- Puskesmas Magelang Kerkopan	Rp.	406.760.908,00
- Puskesmas Magelang Utara	Rp.	1.240.458.112,00
JUMLAH	Rp.	30.441.940.189,00

7. Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD

Saldo Akhir Kas di BUD pada 31 Desember 2017 sebesar **Rp176.589.789.312,00** terdiri dari :

- Kenaikan/Penurunan Kas	Rp	14.331.022.834,00
- Saldo awal Kas di BUD	Rp	131.816.826.289,00
- Saldo Awal Kas di BLUD	Rp	30.441.940.189,00
Jumlah Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	176.589.789.312,00



8. Saldo Akhir Kas di BOS

Saldo Akhir Kas di BOS sebesar **Rp4.385.596.314,00** merupakan saldo kas akhir periode pada masing-masing sekolah di Kota Magelang

9. Saldo Akhir Kas Lainnya

Kas Lainnya sebesar Rp80.466.250,00 terdiri dari :

- Puskesmas Kerkopan	Rp 7.108.000,00
- Puskesmas Magelang Utara	Rp 2.964.500,00
- Dinas Perumahan dan permukiman	Rp 62.378.750,00
- Kelurahan Rejowinangun Utara	<u>Rp 8.015.000,00</u>
Jumlah	Rp 80.466.250,00

10. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar **Rp37.255.252,00** terdiri dari :

- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan Pemungutan / Pemotongan Pajak sebesar **Rp10.534.064,00** dari Pihak Ketiga yang sampai pada akhir periode akuntansi 2016 belum disetorkan ke Kantor Pajak.
- Saldo kas di bendahara pengeluaran Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata sebesar **Rp26.721.188,00** yang merupakan hutang Pajak terdiri dari :
 - a. PPh 21 Rp10.417.500,00
 - b. PPh 22 Rp 1.818.000,00
 - c. PPh 23 Rp 1.105.871,00
 - d. PPN Rp 13.379.817,00

11. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan sebesar **Rp12.907.311,00** yang merupakan pendapatan yang belum disetor ke Kasda sampai dengan 31 Desember 2017 tetapi sudah diakui menjadi realisasi pendapatan DKK.



12. Saldo Akhir Kas

Dengan demikian, Saldo Akhir Kas Pemerintah Kota Magelang per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp181.106.014.439,00** yang terdiri dari :

a. Kas di Kas Daerah	Rp149.893.959.461,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 107.649.002,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 89.926.584,00
d. Kas di BLUD	Rp 26.618.810.578,00
e. Kas di Bendahara BOS	Rp 4.385.596.314,00
f. Kas Lainnya	<u>Rp 10.072.500,00</u>
Jumlah	Rp181.106.014.439,00
Kas di Kasda pada Neraca	Rp181.105.374.439,00
Kas di Kasda pada Laporan Arus Kas	<u>Rp181.106.014.439,00</u>
Jumlah Selisih	Rp 640.000,00

Penjelasan atas selisih Rp640.000,00 merupakan sisa dana BOS Propinsi yang disetor ke kasda oleh SMP Muhammadiyah yang seharusnya disetor ke Propinsi.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dengan mempertimbangan terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintahan ini dijelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut pelaksanaan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang tentu saja ini berdampak terhadap perubahan terhadap identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan. Perubahan identitas ini tentu saja akan berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Saldo Awal Perangkat Daerah dijelaskan antara lain:

- a. Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang mengalami kondisi antara lain:
 - 1) Tidak lagi beroperasi sebagai Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan;
 - 2) Perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang antara lain disebabkan karena;
 - a) Penggabungan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan atau;
 - b) Pemecahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan.
- b. Perubahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan disebabkan antara lain:
 - 1) Penggabungan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan;
Penggabungan ini berasal dari penggabungan entitas akuntansi dan entitas pelaporan menjadi 1(satu) Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dengan;
 - 2) Menggunakan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan baru; atau
 - 3) Menggunakan salah satu Identitas Entitas Pelaporan yang digabung
 - 4) Pemecahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan.



Pemecahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan berasal dari penggabungan beberapa entitas akuntansi atau entitas pelaporan menjadi 1 (satu) entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dengan:

- a. 1 (satu) atau beberapa Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menggunakan identitas Entitas Akuntansi atau Entitas pelaporan yang dipecah masih digunakan; atau
- b. Seluruh Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menggunakan identitas Entitas Pelaporan baru.
- c. Penyelesaian hak dan kewajiban bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan/atau Entitas Akuntansi dibawah Entitas Pelaporan yang dilikuidasi, meliputi penyelesaian:
 - 1) Saldo kas di bendahara pengeluaran;
 - 2) Saldo kas di bendahara penerimaan;
 - 3) Saldo kas lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - a) Kas lainnya di bendahara pengeluaran;
 - b) Kas lainnya di bendahara penerimaan; dan
 - c) Piutang dan utang
 - d) Persediaan, aset tetap, dan aset lainnya;
- d. Penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil.

2. ENTITAS AKUNTANSI

Dalam pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan Kota Magelang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi berdasarkan pada:

- a. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota;
- c. Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
- d. Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang;
- e. Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang;



- f. Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang;
- g. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang;
- h. Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Magelang;
- i. Peraturan Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Magelang;
- j. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Magelang;
- k. Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang;
- l. Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang;
- m. Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang;
- n. Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang;
- o. Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
- p. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang;
- q. Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang;
- r. Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;



- s. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Kota Magelang;
- t. Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Magelang;
- u. Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Magelang;
- v. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang;
- w. Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang;
- x. Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Magelang;
- y. Peraturan Walikota Magelang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Magelang;
- z. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang;
- aa. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Magelang Selatan;
- bb. Peraturan Walikota Magelang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Magelang Tengah;
- cc. Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Magelang Utara;
- dd. Peraturan Walikota Magelang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat.

3. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016



tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Entitas Pelaporan berdomisili pada Komplek Gedung Sekretariat Daerah Kota Magelang Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Magelang.

4. **KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL**

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kota Magelang mengacu pada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota;
- k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang;
- l. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan
- m. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- n. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

5. PENGELOLAAN DANA BOS SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Konsekuwensi dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat. Pemerintah Pusat menggalakan Program Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah sejalan dengan amanat dari undang-undang untuk terselenggaranya program wajib belajar 9 tahun dan dua belas tahun. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 Pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis dan transparan dan bertanggungjawab khususnya dalam pengelolaan dana BOS yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada APBD, serta untuk menghindari permasalahan hukum yang timbul dikemudian hari, untuk penganggaran Dana Bos bagi Satuan Pendidikan Negeri dalam APBD didasarkan pada alokasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan jumlah Dana Bos pada setiap Satuan Pendidikan yang tertuang dalam RKA –SKPD, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dalam Perubahan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017. Untuk Pendapatan dianggarkan pada rekening Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada OPD BPKAD rincian obyek Hibah Dana BOS, sedangkan untuk belanja dianggarkan pada OPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada belanja langsung pada Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kegiatan Penyelenggaraan BOS Sekolah yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal.